

FINAL REPORT

# AKADEMI KAMPUNG SIGAP #2

## Daftar Isi

1	Prolog.....	4
1.1	Strategi Percepatan Kemandirian Desa .....	4
1.2	Program Sigap Sejahtera.....	4
1.3	Akademi Kampung SIGAP .....	7
1.3.1	Akademi Kampung SIGAP – Angkatan 1 (Desember 2020 – Juni 2021) .....	10
1.3.2	Akademi Kampung SIGAP angkatan 2 (Februari – Juli 2022).....	12
2	<i>Launching</i> Akademi Kampung SIGAP Angkatan 2.....	16
3	Penguatan Tata Kelola Pemerintah Kampung .....	18
3.1	Rapid Assessment .....	19
3.2	Kelas Belajar 1.....	20
3.2.1	Lingkup Pembahasan .....	21
3.2.2	Fasilitator .....	22
3.2.3	Peserta .....	23
3.2.4	Proses Pelatihan.....	23
3.3	Kelas Belajar 2 .....	30
3.3.1	Lingkup Pembahasan .....	31
3.3.2	Fasilitator .....	31
3.3.3	Peserta .....	31
3.3.4	Proses Pelatihan.....	32
3.3.5	Pre-test dan Post-Test.....	34
3.4	Proses Pendampingan dan Capaian.....	36
3.5	Rekomendasi.....	39
4	Penguatan Tata Kelola BUMK .....	40
4.1	Rapid Assessment .....	43
4.2	Kelas Belajar 1 .....	46
4.2.1	Lingkup Pembahasan .....	46
4.2.2	Fasilitator .....	47
4.2.3	Peserta .....	47
4.2.4	Proses Pelatihan.....	49

4.2.5	Pre-test dan Post-Test.....	52
4.3	Kelas Belajar 2.....	53
4.3.1	Lingkup Pembahasan.....	54
4.3.2	Fasilitator.....	55
4.3.3	Peserta.....	55
4.3.4	Proses Pelatihan.....	55
4.3.5	Pre-test dan Post-Test.....	61
4.4	Proses Pendampingan dan Capaian.....	61
4.5	Rekomendasi.....	63
5	Penguatan Ekosistem Saling Belajar Antar-Kampung di Berau.....	64
5.1	Surya Banua Sekolah BUMK Labanan Makarti.....	64
5.2	Sekolah Desa Labanan Makmur.....	67
5.3	Upaya Penguatan Ekosistem Saling Belajar.....	69
5.4	Rekomendasi.....	71
6	Festival Kampung SIGAP.....	72
7	<i>Gender Balance</i> dalam Kegiatan Akademi Kampung SIGAP.....	79
8	Lampiran.....	80
8.1	Materi Launching Akademi Kampung SIGAP #2.....	80
8.1.1	Materi <i>Sharing Session</i> .....	80
8.1.2	Materi Pembekalan Programatik.....	106
8.2	Materi Kelas Belajar 1.....	112
8.2.1	Materi PEMKAM.....	112
8.2.2	Materi BUMK.....	124
8.3	Materi Kelas Belajar 2.....	139
8.3.1	Materi Pemkam.....	139
8.3.2	Materi BUMK.....	157

# 1 PROLOG

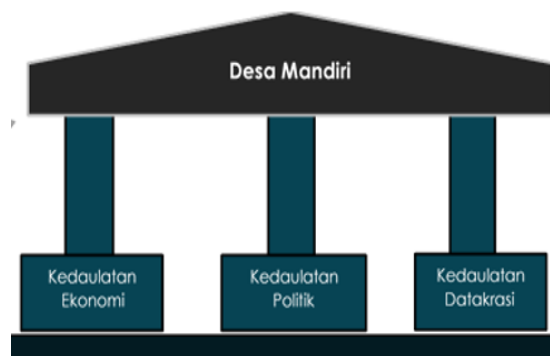
---

## 1.1 STRATEGI PERCEPATAN KEMANDIRIAN DESA

Paradigma pembangunan desa bergeser pasca lahirnya UU Nomor 6 tahun 2014. Dari yang sebelumnya menjadikan desa sebagai objek pembangunan, menjadikan desa dalam posisi strategis sebagai subjek utama penggerak pembangunan otonom yang berada dalam wilayah kabupaten. Desa didorong sebagai aktor utama pembangunannya sendiri, serta dituntut menjadi entitas yang mendekatkan peran negara dalam membangun kesejahteraan, kemakmuran dan kedaulatan bangsa. Jadi, kedaulatan negara sejatinya terletak pada kemandirian desa-desanya sebagai entitas penyusun dan penyangga nama besar Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Negara telah merekognisi kewenangan bagi desa untuk mengatur rumah tangganya sendiri, yang berarti membuka kesempatan yang sama bagi semua desa mencapai kemandiriannya. Bak proposisi *no mandate without funding*, pemberian kewenangan tersebut juga dibarengi dengan alokasi anggaran sebagai stimulan pembangunan desa.

Namun, berbagai laporan mengindikasikan bahwa segala kewenangan dan mandat anggaran yang diemban belum mampu dioptimalkan sebagai stimulan bagi desa untuk menopang ketahanan ekonomi, sosial dan lingkungannya. Hasil Pendataan Indeks Desa Membangun yang dikeluarkan Kemendes PDTT sesuai dengan SK Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan Nomor. 398.4.1 Tahun 2021, menunjukkan bahwa jumlah Desa Mandiri sebanyak 3.268 desa dari total 81.616 desa di seluruh Indonesia.



Gambar 1 Pilar Kemandirian Desa

Lalu pertanyaannya, dengan kesempatan sama, mengapa ada desa yang melesat maju, dan masih ada desa yang jalan ditempat? Simpulan empiris yang dipotret mengindikasikan kemampuan desa dalam mendayagunakan aset dan kewenangan menjadi kunci bagi desa untuk melesat. Salah satu langkah strategis yang dapat diambil adalah melakukan pola replikasi atas pengalaman serta praktik baik desa-desa yang telah mampu membangun kemandirian melalui serangkaian inovasi, untuk kemudian disebar tulkarkan ke desa-desa lainnya.

## 1.2 PROGRAM SIGAP SEJAHTERA

Sejak tahun 2010, *The Nature Conservancy* (TNC), sekarang Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) mengembangkan model pendekatan sosial yang sederhana dan inovatif yang disebut SIGAP REDD+ atau Aksi Inspiratif Warga untuk Perubahan, yang disingkat dengan SIGAP dan dalam pendekatan tersebut, tahapan dan proses yang dikembangkan bertumpu pada aksi kolektif warga untuk menemukan kekuatan, impian serta solusi kreatif dan inovatif dalam menghadapi tantangan, menguatkan eksistensi diri mereka sebagai komunitas atau warga kampung dan pendekatan tersebut merupakan salah satu *tools* yang akan

diperkenalkan dalam upaya peningkatan kapasitas masyarakat kampung, termasuk kepada para pemangku kepentingan dan pendamping yang bekerja bersama masyarakat di Kalimantan Timur lainnya.

Dalam pendekatan SIGAP, proses pendokumentasi kegiatan dilakukan dengan baik dan metode pendekatan tersebut terdiri dari tujuh tahapan yang didalamnya juga termasuk *Appreciative Inquiry*, mulai dalam proses pelibatan masyarakat hingga pelaksanaan dan pemantauan program. Tujuh tahapan tersebut adalah:

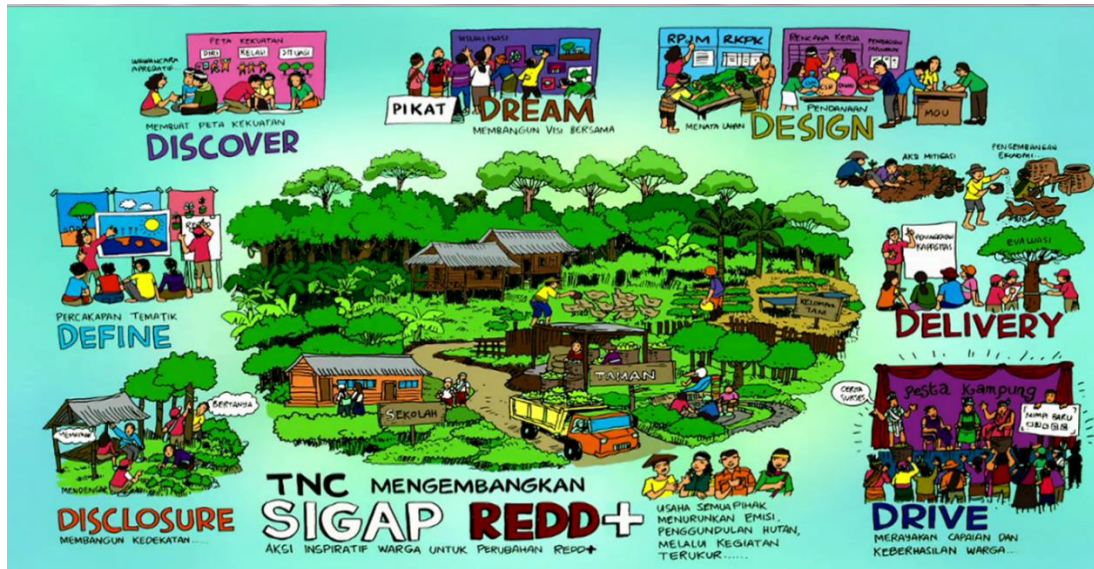
1	Disclosure	Mendekatkan diri, hati dan pikiran bersama masyarakat	Inspirasi
2	Define	Dialogkan tema perubahan/ membangun percakapan tematik	
3	Discover	Dapatkan kekuatan untuk menemukan dan memetakan kekuatan (potensi) dan aset yang dimiliki masyarakat	
4	Dream	Deklarasikan impian bersama	Impian
5	Design	Detailkan rencana perubahan	
6	Delivery	Daya upayakan keberhasilan	Inovasi
7	Drive	Dengungkan keberhasilan	

Berawal dari penerapan pada dua kampung model, pendekatan SIGAP terus diperluas dan sejak tahun 2018, bersama para pihak, Yayasan Konservasi Alam Nusantara bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Berau melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK), Universitas Gadjah Mada, Yayasan Dharma Bhakti Berau Coal menginisiasi program Sigap Sejahtera, salah satunya adalah menyiapkan dan menyebarkan para pendamping di seluruh kampung di Kabupaten Berau, melalui program Pejuang Sigap Sejahtera (PSS).



Gambar 2 Infografik Proses Perumusan SIGAP

Keberpihakan pemerintah pada masyarakat perdesaan atau semangat membangun Indonesia dari pinggiran, ditanggapi dengan baik oleh pemerintah Kabupaten Berau, Kalimantan Timur dan bukti atas respon positif tersebut adalah dikembangkannya Kampung SIGAP pada 100 kampung yang ada di Kabupaten Berau dimana para Pejuang SIGAP Sejahtera akan bertugas sebagai pendamping kampung.



Gambar 3 Pendekatan SIGAP

Dalam perkembangannya, pada tahun 2021, Pejuang SIGAP Sejahtera (PSS) kemudian terintegrasi dalam Program SIGAP Sejahtera Kabupaten Berau dan menjadi program pertama dari 18 program unggulan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Berau, Kalimantan Timur.

PSS diharapkan memiliki pengetahuan handal serta memiliki kemampuan dalam melakukan inovasi untuk mendukung kemajuan kampung dimana mereka ditempatkan, dengan tiga bidang utama dalam penerapan SIGAP, yaitu Tata Kelola Pemerintahan Kampung, Pemanfaatan Sumberdaya Alam yang berkelanjutan dan Pengembangan Kelembagaan Ekonomi melalui Badan Usaha milik Kampung (BUMKAM) dan pengembangan UMKM. Keberadaan para Pejuang SIGAP sejak 2019, 2020 dan 2021 telah menunjukkan perkembangan yang positif di tingkat kampung, antara lain:

1	Tata Kelola Pemerintahan Kampung	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bersinergi dengan pendamping Kemendes PDDT melakukan survey dan input data IDM pada seluruh kampung di Kabupaten Berau</li> <li>Kenaikan IDM (11 kampung Mandiri, 38 kampung Maju, 50 kampung Berkembang dan 1 kampung Tertinggal);</li> <li>Sebanyak 50 kampung telah memiliki peta 3 dimensi dan peta tataguna lahan/rencana tata ruang kampung;</li> <li>97 kampung telah memiliki domain desa.id untuk website kampung dengan dengan 27 kampung yang aktif dan pada tahun 2020 mengalami penurunan, tetapi salah satu kampung, yaitu Kampung Labanan Makmur berhasil menjadi Juara III dalam Lomba Digitalisasi Desa se-Kalimantan Timur;</li> <li>Sebanyak 23 orang PSS telah menjadi aparatur pemerintah kampung (1 orang kepala kampung, 3 orang Sekdes dan 19 orang sebagai Kaur/Kasie)</li> </ul>
2	Pemanfaatan Sumberdaya Alam melalui	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bersinergi dengan mitra pembangunan lainnya di Berau dalam upaya mendorong upaya pengelolaan SDA yang berkelanjutan</li> </ul>

	Program Perhutanan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sebanyak 12 kampung telah mendapatkan hak pengelolaan hutan desa dari KemenLHK dengan total luasan mencapai 77.466 hektar;</li> <li>• Sebanyak 2 KTH mendapatkan ijin kemitraan kehutanan dan 4 KTH lainnya sedang menunggu persetujuan;</li> <li>• Sebanyak 1 koperasi mendapatkan ijin HTR;</li> </ul>
3	Kelembagaan Ekonomi melalui BUMKAM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sebanyak 97 kampung telah membentuk BUMKAM dengan 69 BUMKAM aktif, 21 BUMKAM belum aktif dan 3 kampung belum membentuk BUMKAM;</li> <li>• Teridentifikasi sebanyak 70% BUMKAM mengalami kesulitan dalam pembuatan LPJ kepada Pemerintah Kampung;</li> <li>• Pada tahun 2021, identifikasi potensi produk lokal yang potensial terus dilakukan oleh para Pejuang SIGAP bekerjasama dengan berbagai stakeholders lainnya, mulai dari tingkat individu/kelompok maupun kampung atau skala antar kampung;</li> </ul>

Selain dukungan pada program PSS, Pemerintah Kabupaten Berau melalui DPMK Berau selaku instansi teknis telah mendorong berbagai kegiatan dukungan peningkatan kapasitas bagi Pemerintahan Kampung, maupun upaya-upaya dalam peningkatan ekonomi masyarakat kampung melalui pengembangan Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam). Hal tersebut selaras dengan kebijakan di tingkat Kabupaten Berau melalui dukungan dalam Alokasi Dana Desa (ADD) sejak 2017.

Sementara itu, pada tahun 2017 dan 2018, YKAN bekerjasama dengan DPMPD Provinsi Kalimantan Timur mendorong pengembangan sebuah ekosistem untuk saling belajar antar desa kepada 150 Kampung di Kalimantan Timur yang meliputi Kabupaten Berau, Kutai Timur, Kutai Kertanegara, Penajam Paser Utara dan Kabupaten Paser dan diharapkan akan terus berlanjut dalam mendorong aksi bersama untuk saling belajar dan berbagi pengetahuan dalam mencapai kemandirian Kampung.

Mempertimbangkan hal-hal di atas, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Program Karbon Hutan Berau (PKHB), Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) tetap berkomitmen dan konsisten melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan SIGAP yang bertumpu pada kekuatan masyarakat atau *Strength-Based Approach*, sehingga pada tahun 2021/2022 telah direncanakan untuk melanjutkan program tersebut dengan jangkauan yang diperluas dari tingkat Kabupaten Berau menjadi tingkat Provinsi Kalimantan Timur.

### 1.3 AKADEMI KAMPUNG SIGAP

Seperangkat kewenangan telah dibuka melalui kran UU Desa di tahun 2014 silam, memberi desa kesempatan yang sama untuk maju. Namun kenyataannya sewindu implementasi UU Desa masih banyak desa yang belum mampu mengoptimalkan kewenangan dan mandat anggaran sebagai stimulan bagi desa untuk menopang ketahanan ekonomi, sosial dan lingkungannya. Marjinalisasi desa di masa lalu menstrukturkan pelemahan desa secara sistemik, mencengkeramnya sebagai aparatus administrasi semata, dan masih tercahar kuat jejaknya hingga kini.

Tantangan memajukan desa bisa muncul dari kapasitas internal kampung dalam memahami ruang berdesa, mulai elaborasi konteks, menemukan pendekatan dan perspektif, mensistematisasikan metode kerja yang tangguh dalam merespon perubahan zaman, maupun memformulasikannya dalam berbagai kebijakan kampung. Namun, tak jarang tantangan juga bersifat eksternal, termasuk tekanan otoritas formal dari kebijakan pemerintah suprakampung maupun kekuatan ekonomi yang menghimpit desa untuk bisa membangun kemandirian atas dasar kebutuhan diri dan masyarakatnya. Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) masih kerap dipahami, misalnya oleh pemerintah suprakampung (Kabupaten sampai Pusat/Nasional) bahkan Perguruan Tinggi, sebagai jalan untuk mengatur kampung, bukan memungkinkan kampung membangun kemandirian. Kampung masih diperlakukan sebagai obyek pembangunan. Belum lagi, berbagai kebijakan sektoral yang membonsai kampung dalam labelling sektoralisme pemerintah supradesa.

Namun dengan berbagai macam tantangan tersebut, meskipun jumlahnya sedikit, terdapat desa-desa yang memiliki prestasi luar biasa. Prestasi tersebut bisa dalam berbagai macam bidang, dari bidang politik pemerintahan, sosial, ekonomi hingga lingkungan. Desa-desa yang berprestasi inilah yang kemudian coba direplikasi pengalaman serta praktik baik, untuk kemudian disebar tularkan ke desa-desa lainnya.

Sebagai langkah percepatan kapasitas kampung dalam mengelola kewenangannya dalam skema besar Program SIGAP Sejahtera, dirumuskanlah program “**Akademi Kampung SIGAP**”. Program ini bukan hanya menggunakan pendekatan pendampingan melalui pelatihan atau asistensi, tetapi juga dilengkapi dengan pendekatan ekosistem, yang mengupayakan struktur peluang dan insentif bagi terbangunnya kolaborasi dan saling tukar pengalaman antarkampung.

Ekosistem kolaborasi diharapkan mampu menyediakan pemampu bagi setiap kampung untuk melihat, menemukan, memformulasi berbagai peluang kerjasama taktis dan strategis untuk membangun kemandirian. Sektor kemandirian bisa menysar area tata kelola pemerintahan maupun ekonomi kampung. Ekosistem kolaborasi digunakan sebagai upaya mendesak agar kampung tidak mengalienasi diri, namun menempatkan dirinya sebagai kekuatan kolektif -kolaboratif untuk mengakselerasi pembangunan kampung. Metode belajar antar desa (*peer to peer*) ini diharapkan mampu menjamin proses yang adaptif dan replikatif.



Gambar 4 Roadmap Program Akademi Kampung SIGAP

Kami juga mengasumsikan bahwa pendekatan holistik memiliki impact yang lebih besar: program terkoordinasi atas multi level, multi sektoral memberi dampak yang lebih besar. Prinsip holistik dan transdisipliner penting untuk membuka proses belajar atau proses kerja yang melibatkan berbagai disiplin ilmu didalam memformulasikan dan mewujudkan capaian-capaian, produk dan tatanan yang mampu menjadi ruang belajar dan berujung pada transformasi pengetahuan dan pengalaman dalam kehidupan masyarakat desa.



Penguatan ekosistem kemandirian desa mewujudkan pada setiap level, mulai dari pemerintah supra desa, kepala desa dan aparatur pemerintahan desa, lembaga-lembaga desa, hingga warga desa. Hal ini dipahami sebagai sebuah ekosistem model. Intervensi hanya pada satu level ekosistem model atau hanya menggunakan satu intervensi mungkin akan cukup berhasil, tetapi tidak cukup berdampak. Perencanaan yang partisipatif adalah contohnya. Kualitas partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan pembangunan desa yang rendah atau bahkan tidak berkualitas maka tidak akan mampu mewujudkan tata pemerintahan yang partisipatif dan akuntabel.

Pendekatan satu sektor hanya akan berdampak kecil. Pendekatan yang terintegrasi pada multi sektoral menggunakan metode yang variatif untuk menciptakan perubahan yang lebih baik khususnya dalam penguatan kapasitas politik dan pemerintahan, kapasitas proses dan birokrasi, kapasitas sosial, dan kemampuan berjejaring dan mengadvokasi diri. Artinya, jika kapasitas politik dan pemerintahan kepala desa baik, jika tidak didukung oleh kapasitas proses dan birokrasi pada aparatur pemerintahan desa yang baik, tidak akan cukup menjadi pengungkit perubahan tata kelola pemerintahan desa.

### 1.3.1 Akademi Kampung SIGAP – Angkatan 1 (Desember 2020 – Juni 2021)

Akademi Kampung SIGAP angkatan pertama yang dimulai sejak bulan desember 2020 dan diakhiri pada bulan Juni 2021, telah melaksanakan berbagai rangkaian kegiatan sejak *Launching* hingga konsultasi tatap muka ke 21 Kampung Peserta. Pada angkatan pertama ini terdapat 20 Kampung peserta kelas tata kelola Pemerintah Kampung dan 20 Kampung peserta kelas tata kelola BUMKam.

*Launching* Akademi Kampung SIGAP dilaksanakan secara daring melalui kanal Youtube Yayasan Konservasi Alam Nusantara (Tautan : <https://youtu.be/-rMyaxfJIP8>) pada 18 Desember 2020. Kegiatan ini sekaligus sebagai penanda dukungan lintas pihak, baik di level nasional, daerah, hingga organisasi yang memiliki komitmen dalam upaya membangun kemandirian desa di Kalimantan Timur. Dalam kegiatan *Launching* ini terdapat 6 pembicara yang melakukan paparan, yaitu Abdul Halim Iskandar Menteri Desa PDTT, Suharso Monoarfa Menteri PPN/Kepala Bappenas, Isran Noor Gubernur Kalimantan Timur, M. Syirajudin Kepala DPMD Kalimantan Timur, Herlina Hartanto Direktur Eksekutif YKAN, dan Ryan Sugiarto Ketua YSID.

Tabel 1 Peserta Akademi Kampung SIGAP Angkatan 1

No	Kelas Tata Kelola Pemerintah Kampung	No	Kelas Tata Kelola BUMKam
1	Kampung Sungai Payang	1	Kampung Tepian Buah
2	Kampung Labanan Makarti	2	Kampung Harapan Jaya
3	Kampung Labanan Makmur	3	Kampung Maluang
4	Kampung Merabu	4	Kampung Melati Jaya
5	kampung Harapan Jaya	5	Kampung Labanan Makmur
6	Kampung Campursari	6	Kampung Labanan Makarti
7	Kampung Pijanau	7	Kampung Merabu
8	Kampung Tanjung Batu	8	Kampung Tanjung Batu
9	Kampung Tembudan	9	Kampung Teluk Semanting
10	Kampung Talisayan	10	Kampung Teluk Sumbang
11	Kampung Biduk-Biduk	11	Kampung Biduk-biduk
12	Kampung Karang Ilir	12	Kampung Tembudan
13	Kampung Teluk Semanting	13	Kampung Talisayan
14	Kampung Maluang	14	Kampung Campursari
15	Kampung Biatan Bapinang	15	Kampung Biatan Bapinang
16	Kampung Muara Lesan	16	Kampung Biatan Lempake
17	Kampung Biatan Lempake	17	Kampung Semurut
18	Kampung Melati Jaya	18	Kampung Pijanau
19	Kampung Teluk harapan	19	Kampung Teluk Harapan
20	Kampung Semurut	20	Kampung Sungai Payan

Setelah kegiatan *Launching*, rangkaian kegiatan selanjutnya adalah *Preliminary Assessment*. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengetahui secara mendalam tentang segala aspek kelokalan kampung yang membawa keragaman inovasi dan tahapan dalam tata kelola pemerintahan maupun BUMK. *Assessment* dilaksanakan dengan metode FGD daring melalui zoom. Pelaksanaan *assessment* dilakukan selama 12 hari, yang dimulai dalam rantang 15 – 24 Januari 2021, dilanjutkan pada 3 - 4 Februari 2021.

Kegiatan selanjutnya sebagai langkah tindak lanjut atas hasil *assessment*, dilakukan pelatihan dan pendampingan secara daring. Pelatihan dan pendampingan ini memberi pembekalan terkait transformasi pembangunan kampung dari berbagai aspek, dengan sasarannya adalah tata kelola Pemerintahan Kampung (Pemekam) dan tata kelola Badan Usaha Milik Kampung (BUMK). Secara umum model pelatihan online berjalan baik meski mendapatkan beberapa tantangan. Pada awal pelatihan dan pendampingan, banyak peserta yang terlibat. Namun seperti proses pelatihan pada umumnya, terdapat “seleksi alam” terkait atensi kelompok sasaran program. Ada yang terlibat secara kontinu, ada yang motivasinya menurun ditengah jalan, ataupun ada pemerintah kampung/pengurus BUMK yang tidak terlibat sama sekali.

Membangun perubahan juga berarti membangun pemahaman yang sama tentang urgensi dilakukannya perubahan itu sendiri. Pendampingan daring yang seharusnya diletakkan untuk membangun kesadaran bagi peserta sebagai pondasi awal melakukan perbaikan, serta saluran penguatan kapasitas dasar menuju perubahan, ternyata terdapat tantangan selama proses berjalannya. Hal ini menjadikan proses evaluasi dan konsultasi tatap muka sebagai kegiatan selanjutnya menjadi hal yang penting. Proses ini dimaksudkan untuk membangun perspektif bersama antar stakeholder di tingkat desa maupun kabupaten tentang isu kunci perubahan, arah strategis bagaimana perubahan dapat dicapai, dan beberapa simulasi teknis untuk memulai sebagian kecil perubahan. Evaluasi dan konsultasi tatap muka terdiri dari konsultasi tatap muka di 21 kampung dan paparan akhir program. Benchmark yang dipakai dalam proses ini adalah upaya – upaya mendorong perubahan didasarkan pada 4 aspek perbaikan yaitu perbaikan infrastruktur ekonomi, perbaikan infrastruktur politik, perbaikan infrastruktur sosial, dan perbaikan infrastruktur teknologi.

Dalam *roadmap* program Akademi Kampung SIGAP, angkatan pertama ini sampai pada tahap Desain Arah Perubahan. Isu strategis perubahan hingga penemuan kampung yang memiliki “bibit juara” telah dipetakan. Selama proses rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan Akademi Kampung SIGAP angkatan 1, terdapat temuan-temuan kunci terkait problem dasar yang banyak dialami kampung-kampung di Kabupaten Berau. Berikut ini merupakan rangkuman temuan kunci yang didapatkan selama proses Akademi Kampung SIGAP angkatan 1.



# Temuan Kunci

<p><b>1. Relasi Kewargaan</b></p> <p>Hubungan antara warga dengan pemerintah kampung hanya sebatas relasi administratif. Belum ada upaya sistematis guna mewujudkan inovasi perluasan dimensi pelayanan publik, khususnya pelayanan atas barang dan jasa publik.</p> <p><b>2. Kapasitas Sosial</b></p> <p>Keluasan masyarakat untuk terlibat dalam ruang pembangunan desa masih sangat rendah. Belum ada upaya programatik untuk mewujudkan partisipasi. Konversi ekonomi juga menjadi tantangan.</p> <p><b>3. Ketergantungan</b></p> <p>Ada kecenderungan ketergantungan pemerintah kampung terhadap pihak diluar kampung (con: pejuang sigap, program bantuan, dll.).</p>	<p><b>1. Perencanaan</b></p> <p>Perencanaan unit usaha belum didasarkan pada analisa usaha yang jelas. Pembentukan, pembukaan unit usaha &amp; penyertaan modal cenderung hanya untuk “menggugurkan” kewajiban.</p> <p><b>2. Akuntabilitas</b></p> <p>Isu kesejahteraan menjadi masalah kunci kenapa BUMK tidak berjalan. Pengelola BUMK umumnya menjadikan BUMK sebagai pekerjaan sampingan. Laporan kinerja BUMK juga tidak ditemukan di mayoritas kampung</p> <p><b>3. Persaingan</b></p> <p>Adanya potensi persaingan antar desa dengan karakteristik homogen. Imajinasi pengelolaan potensi berbasis alam cenderung melahirkan kompetisi antar desa dengan output produk/ layanan sama.</p>
<i>Pemkam</i>	<i>Bumkam</i>

## 1.3.2 Akademi Kampung SIGAP angkatan 2 (Februari – Juli 2022)

Akademi Kampung SIGAP angkatan 1 telah melakukan serangkaian aktivitas guna memetakan isu strategis perubahan, transfer pengetahuan, pendampingan, perbaikan aspek-aspek teknis perubahan, hingga membangun inspirasi dan mimpi bersama. Selama proses tersebut telah dirumuskan berbagai temuan kunci, peluang, tantangan, hingga rekomendasi-rekomendasi.

Rumusan-rumusan tersebut kemudian menjadi acuan untuk mendetailkan strategi dan capaian yang akan dicanangkan dalam Akademi Kampung SIGAP angkatan 2. Sebagai program lanjutan dari yang pertama, Akademi Kampung SIGAP angkatan 2 ini mencoba menajamkan dan mendetailkan sasaran strategisnya, berikut ini merupakan poin-poin sasaran strategis dari Akademi Kampung SIGAP angkatan 2 :

1. Reformulasi Pelayanan Publik dan Perencanaan Pembangunan Kampung
  - Memperkuat kualitas partisipasi melalui penyediaan ruang partisipasi dan skenario ideal untuk menjamin kualitas partisipasi.
  - Penerapan sistem informasi kampung terpadu sebagai wujud kedaulatan data kampung.
  - Membangun kultur pemanfaatan data dan informasi sebagai basis perencanaan dan kebijakan pembangunan kampung.
2. Preposisi BUMKam sebagai Penggerak Ekonomi Desa

- Reformulasi Perkam & AD-ART BUMKam sesuai PP.11/ 2021 dan Permendes.3/ 2021.
  - Penguatan perencanaan usaha BUMKam.
  - Penguatan pengelolaan keuangan BUMKam.
3. Ekosistem Kolaborasi Percepatan Kemandirian Kampung
- Terbentuknya simpul konektivitas lintaspihak sebagai ekosistem saling belajar, perluasan kerjasama, serta memperkuat akses sumberdaya dan meningkatkan skala kebermanfaatannya.

### 1.3.2.1 Tujuan

Merujuk pada sasaran strategis diatas, Program Akademi Kampung Sigap #2 bertujuan untuk :

1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Kampung
  - a. Penguatan kapasitas politik dan pemerintahan yang meliputi penguatan kapasitas politik dan kepemimpinan serta penguatan kapasitas proses dan birokrasi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan bertanggungjawab;
  - b. Pelembagaan pengelola informasi dan data kampung untuk menjamin keberlanjutan misi digitalisasi kampung;
  - c. Penerapan Sistem Informasi Kampung Terpadu untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pembangunan kampung;
  - d. Penguatan kapasitas analisis data dan informasi sebagai navigasi arah perencanaan pembangunan kampung.
2. Penguatan Tata Kelola BUMKam
  - a. Membangun mindset kewirausahaan sosial sebagai modal utama menjalankan BUMKam;
  - b. Standarisasi kelembagaan BUMKam sesuai PP No.11/2021 dan Permendes PDDT No.3/2001;
  - c. Penguatan kapasitas perencanaan usaha BUMKam;
  - d. Penerapan sistem pengelolaan keuangan BUMKam.
3. Penguatan Ekosistem Saling Belajar Antar-Kampung di Berau
  - a. Adanya pembelajaran bersama melalui diskusi publik secara berkala tentang isu strategis-inovatif kedaulatan kampung;
  - b. Penyusunan deck pembelajaran untuk inisiasi model sekolah kampung pada 3 wilayah, antara lain:
    - Wilayah Pesisir
    - Wilayah Tengah
    - Wilayah Hulu

### 1.3.2.2 Sasaran Peserta

Peserta pelatihan dan pendampingan akademi kampung SIGAP angkatan 2 awalnya adalah 25 Pemerintah Kampung dan 21 Pengurus BUMK. Namun dalam perjalanannya ada beberapa kampung yang menyatakan keinginannya untuk ikut serta dalam akademi kampung SIGAP angkatan 2. Maka berikut ini merupakan daftar penerima manfaat pelatihan dan pendampingan akademi kampung SIGAP angkatan 2:

Tabel 2 Peserta Akademi Kampung SIGAP angkatan 2

No	Kelas Tata Kelola Pemerintah Kampung	No	Kelas Tata Kelola BUMKam
1	Pemerintah Kampung Merabu	1	Pengurus BUMK Merabu
2	Pemerintah Kampung Merasa	2	Pengurus BUMK Merasa
3	Pemerintah Kampung Long Duhung	3	Pengurus BUMK Long Duhung
4	Pemerintah Kampung Sido Bangen	4	Pengurus BUMK Sido Bangen
5	Pemerintah Kampung Labanan Makmur	5	Pengurus BUMK Labanan Makarti
6	Pemerintah Kampung Labanan Jaya	6	Pengurus BUMK Labanan Jaya
7	Pemerintah Kampung Labanan Makarti	7	Pengurus BUMK Labanan Makmur
8	Pemerintah Kampung Pulau Besing	8	Pengurus BUMK Maluang
9	Pemerintah Kampung Maluang	9	Pengurus BUMK Melati Jaya
10	Pemerintah Kampung Pulau Derawan	10	Pengurus BUMK Tanjung Batu
11	Pemerintah Kampung Kasai	11	Pengurus BUMK Pegat Batumbuk
12	Pemerintah Kampung Pegat Batumbuk	12	Pengurus BUMK Gurimbang
13	Pemerintah Kampung Sukan Tengah	13	Pengurus BUMK Pegat Bukur
14	Pemerintah Kampung Bebanir Bangun	14	Pengurus BUMK Long Lanuk
15	Pemerintah Kampung Gurimbang	15	Pengurus BUMK Suaran
16	Pemerintah Kampung Pegat Bukur	16	Pengurus BUMK Payung-payung
17	Pemerintah Kampung Suaran	17	Pengurus BUMK Biatan Ulu
18	Pemerintah Kampung Payung-payung	18	Pengurus BUMK Talisayan
19	Pemerintah Kampung Manunggal Jaya	19	Pengurus BUMK Campursari
20	Pemerintah Kampung Biatan Ulu	20	Pengurus BUMK Tunggal Bumi
21	Pemerintah Kampung Talisayan	21	Pengurus BUMK Sumber Agung
22	Pemerintah Kampung Campursari	22	Pengurus BUMK Tembudan
23	Pemerintah Kampung Sukamurya	23	Pengurus BUMK Batu Putih
24	Pemerintah Kampung Tunggal Bumi	24	Pengurus BUMK Biduk-biduk
25	Pemerintah Kampung Sumber Agung	25	Pengurus BUMK Teluk Sulaiman
26	Pemerintah Kampung Tembudan		
27	Pemerintah Kampung Batu Putih		
28	Pemerintah Kampung Teluk Sulaiman		
29	Pemerintah Kampung Teluk Sumbang		

### 1.3.2.3 Kegiatan

Pada Akademi Kampung SIGAP angkatan 2 ini dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :



Pada ranah implementasi, program dirancang dengan tidak hanya mempertimbangkan keluaran saja (*output based*), melainkan juga mengutamakan proses (*process based*). Hal ini karena penguatan jaringan ke bawah (*top down*), atas (*bottom up*), dan tengah (*middle out*) menjadi bagian proses *engagement* dan *transfer of knowledge*.

a. *Top Down*

Kultur perencanaan pembangunan desa saat ini tidak dapat dilepaskan dari program pemerintah di atasnya. Hal ini tidak terlepas dari masih rendahnya kapasitas advokasi pemerintah desa dalam mengelola aset dan kewenangannya.

Pada tahap awal, model dukungan berupa mandatori program dari pemerintah supra desa akan sangat efektif mendorong arah pembangunan desa. Dengan demikian, kami akan melakukan *engagement* pemerintah kabupaten pada awal program. Pada tahap selanjutnya, model dukungan ekosistem sangat diperlukan. Seluruh stakeholder yang terlibat perlu satu suara guna mencapai tujuan akhir program.

b. *Bottom Up*

Untuk memastikan dukungan dan kepercayaan setiap pihak yang terlibat dalam mewujudkan perubahan yang diusulkan, penting untuk mengkomunikasikan cara solusi dibuat. Jika arah perubahan hanya didominasi oleh sebagian pihak, kemungkinan besar akan terjadi penolakan. Namun, jika dipahami bahwa semua peserta telah berkonsultasi, penerimaan tampaknya lebih menjanjikan.

c. *Middle Out*

Harus ada upaya untuk menemukan dan mengkomunikasikan manfaat khusus atas program yang dijalankan. Penerima manfaat program membutuhkan moderasi atas kepentingan pribadi dalam keberhasilan program. Metode ini sangat penting sebagai perspektif dalam proses transfer pengetahuan.

Dalam setiap tahapan aktivitas program, melekat aktivitas – aktivitas didalamnya. Catatan proses setiap aktivitas program akan diulas pada bagian - bagian selanjutnya.

## 2 LAUNCHING AKADEMI KAMPUNG SIGAP ANGKATAN 2

Kegiatan *Launching* Akademi Kampung SIGAP angkatan 2 dilaksanakan pada Rabu 23 Maret 2022 bertempat di Balai Mufakat Kabupaten Berau. Kegiatan ini dihadiri oleh Bupati Berau, Sekda Berau, Yayasan Konservasi Alam Nusantara, Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Kampung Berau, Kesbangpol Berau, Diskoperindag Berau, Camat, Pemerintah Kampung, Pejuang SIGAP, dan beberapa perwakilan NGO.

Kegiatan ini juga dimeriahkan oleh Pameran Produk Unggulan Kampung. Dalam pameran produk tersebut terdapat *hot* coklat kampung merasa yang dapat dinikmati oleh para tamu undangan. Cokelat merasa ini merupakan coklat organik lokal yang diproduksi oleh Kampung Merasa, coklat ini sudah mengukir prestasi hingga kancah internasional. Selain itu juga ada beberapa produk olahan UMKM Kampung Labanan Makarti dan Kampung Teluk Sulaiman.



Gambar 5 Bupati Berau Sri Juniarsih Mencicipi Coklat Merasa

Bersamaan dengan *Launching* Akademi Kampung SIGAP angkatan 2 ini, juga dilakukan peluncuran Sistem Informasi Kampung Sumber Agung, Sekolah BUMK Kampung Labanan Makarti, dan Forum Diskusi Bulanan Kampung Labanan Makmur. Peluncuran tersebut dikemas dalam sebuah video pendek yang menjelaskan sekaligus menandai secara simbolis akan dilaksanakannya kegiatan-kegiatan tersebut.

Peluncuran Sistem Informasi Kampung Sumber Agung ini selain sebagai seremoni penerapan Sistem Informasi Kampung di Sumber Agung juga dimaksudkan untuk memberi gambaran tentang pentingnya Sistem Informasi Kampung. Fitur-fitur yang memudahkan pemerintah kampung dijelaskan dalam video *launching* Sistem Informasi Kampung Sumber Agung. Sementara peluncuran sekolah BUMK Kampung Labanan Makarti dan Forum Diskusi Bulanan merupakan bagian dari penguatan ekosistem saling belajar

antar kampung yang menjadi salah satu sasaran strategis Akademi Kampung SIGAP angkatan 2. Peluncuran keduanya di kegiatan ini sebagai ajang promosi dan harapannya lebih banyak kampung yang akan terlibat.

Sambutan sekaligus pembukaan Akademi Kampung SIGAP angkatan 2 dalam kegiatan ini dilakukan oleh Bupati Berau Sri Juniarsih Mas. Dalam sambutannya Bupati menjelaskan pentingnya program Akademi Kampung SIGAP sebagai sarana pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi. Setelah dilakukan pembukaan resmi Akademi Kampung SIGAP angkatan 2, Bupati secara simbolis menyerahkan dokumen sertifikat badan hukum ke BUMK Labanan Makarti, BUMK Pegat Bukur, dan BUMK Sukan Tengah. Simbolisasi penyerahan ini dimaksudkan untuk membakar semangat kampung-kampung lain yang BUMK-nya belum mendapatkan sertifikat badan hukum. Dalam Akademi Kampung SIGAP 2 ini, transformasi BUMK sesuai dengan PP 11 merupakan salah satu menu utama, sehingga kegiatan seremoni ini diharapkan mempermudah kegiatan selanjutnya.



Gambar 6 Sharing Session oleh Wahyudi Anggoro Hadi



Gambar 7 Talkshow Penguatan Ekosistem Saling Belajar Antar Kampung

Dalam *Launching* ini juga terdapat *Sharing Session* oleh Wahyudi Anggoro Hadi serta Talkshow Penguatan Ekosistem Saling Belajar sebagai rangkaian kegiatan. Pada *sharing session* kali ini Wahyudi Anggoro Hadi berbagi cerita sukses keberhasilannya dalam memimpin desa panggungharjo. Dalam sesi ini Wahyudi Anggoro Hadi bercerita bagaimana Panggungharjo memanfaatkan potensi yang ada di desa menjadi sebuah prestasi. Panggungharjo yang tidak memiliki sumber daya alam yang melimpah ternyata tetap bisa berprestasi dengan memanfaatkan potensi warganya.

Sementara untuk Talkshow Penguatan Ekosistem Saling Belajar di Berau, dimoderatori oleh Rachmat Setiawan Kepala Kampung Talisayan. Sementara narasumber dalam talkshow ini adalah Edi Santoso Kepala Kampung Sumber Agung, Mupit Datusahlan Kepala Kampung Labanan Makmur, dan Dea Sekretaris BUMK Labanan Makarti. Talkshow ini membahas bagaimana kemungkinan-kemungkinan kerjasama dan strategi pemajuan kampung-kampung di Berau.

### 3 PENGUATAN TATA KELOLA PEMERINTAH KAMPUNG

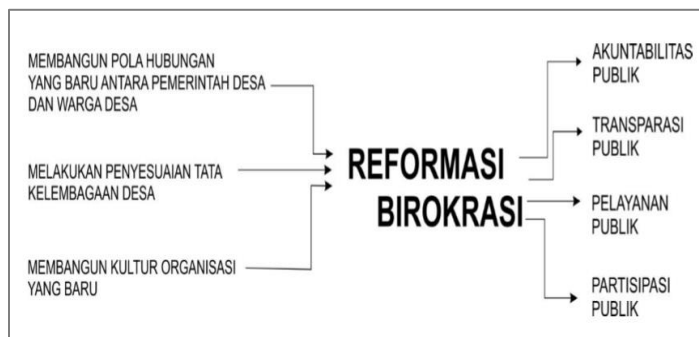
Temuan kunci yang didapatkan selama proses Akademi Kampung SIGAP angkatan 1 diantaranya masih banyak pemerintah kampung yang membangun hubungan dengan warganya hanya sebatas relasi administrasi. Belum ada upaya sistematis guna mewujudkan inovasi perluasan dimensi pelayanan publik. Keterlibatan masyarakat kampung dalam ruang pembangunan kampung juga masih rendah, belum ada upaya programatik untuk mewujudkan partisipasi warga.

Mencermati temuan-temuan tersebut, pada Akademi Kampung SIGAP angkatan 2 ini dilakukan penguatan kapasitas dasar yang meliputi penguatan kapasitas politik dan kepemimpinan bagi kepala kampung serta penguatan kapasitas proses dan birokrasi bagi aparatur pemerintah kampung (perangkat kampung).

Kapasitas politik dan kepemimpinan dibutuhkan agar kepala kampung mempunyai kemampuan untuk menentukan arah kebijakan pembangunan desa, dimana terdapat 5 kapasitas dasar yang diharuskan dimiliki oleh kepala kampung yaitu kapasitas regulasi, kapasitas eskraktif, kapasitas distributif, kapasitas responsif dan kapasitas jaringan.



Gambar 8 Lima Kapasistas Dasar yang Harus Dimiliki Kepala Kampung



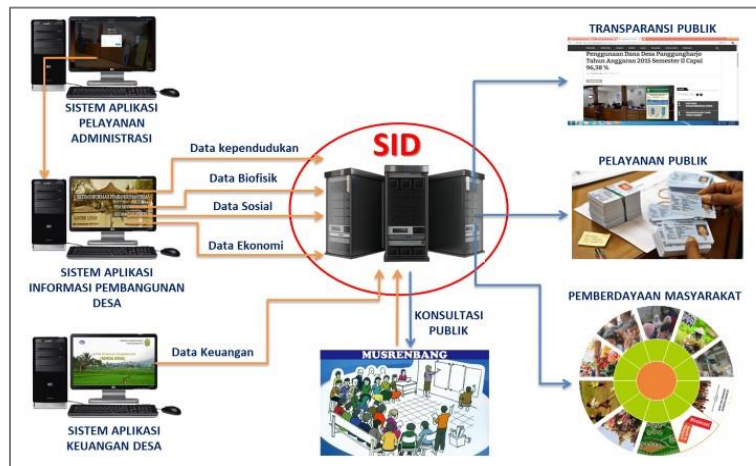
Gambar 9 Peta Reformasi Birokrasi

Kapasitas proses dan birokrasi dari aparatur pemerintah kampung akan ditingkatkan dengan menggunakan pendekatan Reformasi Birokrasi yang diawali dengan mendorong perluasan dimensi pelayanan publik untuk membangun relasi baru antara pemerintah kampung dan warga kampung. Maka ketika pola hubungan baru tersebut sudah terwujud, langkah selanjutnya adalah melakukan penyesuaian tata kelembagaan dan selanjutnya membangun kultur organisasi baru.

Merujuk pada bagan diatas, maka salah satu langkah strategis untuk melakukan reformasi birokrasi adalah penerapan Sistem Informasi Kampung Terpadu. Langkah ini merupakan pintu masuk strategis untuk melakukan perubahan sistemik mulai dari perencanaan, penatausahaan, hingga monitoring dan evaluasi pembangunan kampung. Langkah ini juga dimaksudkan untuk optimalisasi pelayanan publik, sentralisasi database kampung, serta memberi input dalam pengambilan kebijakan. Penerapan sistem informasi

kampung terpadu juga merupakan pintu masuk strategis untuk melakukan perubahan sistemik mewujudkan partisipasi serta *good governance*.

Sistem Informasi kampung diharapkan mampu menciptakan kapasitas datakrasi desa. Dimana sistem ini difungsikan untuk mengelola hidup dimasa mendatang untuk desa memperbaiki segala persoalan yang ada di masyarakat dengan berbasis data. Data bukan hanya difungsikan menggambarkan kondisi saat ini, namun data juga difungsikan untuk mengelola hidup masa mendatang. Data merupakan bagian penting pengambilan kebijakan pembangunan di tingkat kampung.



Gambar 10 Rancang Bangun Sistem Informasi Desa

Data kemudian menjadi hal yang sentral untuk didiskusikan, dikelola dan diperas manfaatnya untuk mendorong kemajuan kampung. Sehingga kampung bukan hanya berdaulat sandang, pangan dan papan tetapi juga berdaulat atas data yang mereka miliki. Program ini bermaksud membangun sistem informasi, sekaligus sebagai pangkalan data yang berguna bagi masyarakat (subjek data), pemerintah kampung, supradesa termasuk pemerintah pusat. Dengan satu data kampung yang realtime, memungkinkan kebijakan yang salah sasaran bisa diminimalisasi.

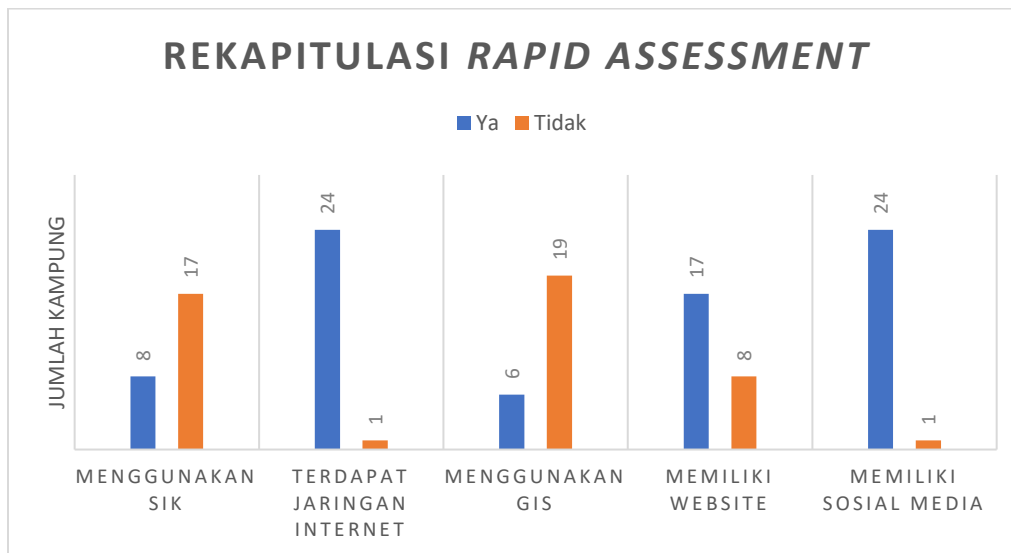
### 3.1 RAPID ASSESSMENT

*Rapid Assessment* merupakan sebuah metode untuk menilai atau mengkaji secara cepat. Asesmen untuk Pemerintah Kampung ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dasar kesiapan kampung untuk menerapkan Sistem Informasi kampung. Hal ini berkaitan dengan perumusan materi dan strategi dalam pelatihan serta pendampingan yang akan dilakukan dalam Akademi Kampung SIGAP.

Sasaran *rapid assessment* ini adalah 26 Pemerintah Kampung peserta Akademi Kampung SIGAP angkatan 2. Asesmen dilakukan dengan menyebar kuisisioner daring kepada sasaran. Pertanyaan-pertanyaan dalam kuisisioner berkaitan dengan sudah ada atau tidaknya Sistem Informasi yang dikelola oleh kampung, sudah tersedia atau tidaknya perangkat keras yang dapat digunakan untuk menjalankan Sistem Informasi Kampung, dan komitmen kampung dalam penerapan Sistem Informasi Kampung.

Hasil dari *rapid assessment* ini didapatkan informasi bahwa terdapat 8 kampung telah menggunakan Sistem Informasi Kampung. Sementara dari 18 kampung yang tidak menggunakan sistem informasi kampung 3 diantaranya sebelumnya pernah menggunakan Sistem Informasi Kampung. Untuk ketersediaan akses jaringan internet, dari seluruh kampung peserta Akademi Kampung SIGAP hanya Long Duhung yang belum ada akses jaringan internet.

Sementara untuk sosial media yang merupakan salah satu media penyampaian informasi ke publik, hanya manunggal jaya yang belum mempunyai sosial media. Terkait komitmen untuk penggunaan Sistem Informasi Kampung, semua kampung menyatakan komitmennya untuk menggunakan Sistem informasi Kampung, namun hanya ada 6 kampung yang sudah menganggarkan pengadaan Sistem Informasi Kampung dan sarana penunjangnya.



Dari data hasil asesmen ini, dilakukan penelusuran lebih lanjut pada website dan sosial media kampung. Dari 17 kampung yang memiliki website, hanya 3 kampung yang websitenya terkelola cukup baik, yaitu Labanan Makmur, Sukan Tengah, dan Sumber Agung. Sementara untuk sosial media, hanya 8 kampung yang terkelola dengan baik, yaitu Sumber Agung, Labanan Makmur, Teluk Sumbang, Talisayan, Payung-payung, Teluk Sulaiman, dan Batu Putih. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar dari kampung-kampung tersebut gagal melakukan pengelolaan website maupun sosial media. Kegagalan pengelolaan website maupun sosial media merupakan hal yang sering ditemui di banyak kampung di Indonesia. Kegagalan tersebut karena kurang disiapkannya pengelola website maupun sosial media.

Berdasarkan hasil *rapid assessment* dan pendalaman yang telah dilakukan. Salah satu kesimpulan yang dapat diambil adalah perlunya penguatan dari sisi pengelolaan Sistem Informasi Kampung yang berisi website dan sosial media di dalamnya. Komitmen yang sudah muncul dari kampung untuk menerapkan Sistem Informasi Kampung tidak boleh hanya berhenti sampai dipengadaan sistem dan sarana-sarannya saja, tetapi harus sampai pada implementasi dan pengelolaan yang baik. Untuk itu kedepannya diperlukan pelatihan dan pendampingan terkait penerapan dan pengelolaan sistem informasi kampung.

### 3.2 KELAS BELAJAR 1

Kelas Belajar 1 Akademi Kampung SIGAP angkatan 2 dilaksanakan pada tanggal 29-30 Maret 2022 bertempat di Family Café, Tanjung Redeb. Kelas belajar untuk pemerintah kampung, berfokus pada bagaimana kampung mampu mengoperasikan Sistem Informasi Kampung dengan baik. Mengoperasikan Sistem Informasi Kampung di sini tidak dimaknai semata hanya menjalankan fungsi pelayanan dengan

aplikasi, namun terdapat hal-hal strategis yang dapat dengan mudah dicapai oleh kampung apabila menerapkan Sistem Informasi Kampung. Salah satu dasar dari implementasi Sistem Informasi Kampung ini adalah pengelolaan data kampung sebagai basis perencanaan kebijakan ditingkat kampung.

Rancangan kebijakan pemerintah kampung yang tidak diformulasikan dari basis data yang memadai dan terintegrasi masih banyak ditemui pada saat ini. Perumusan kebijakan tanpa berbasiskan data niscaya menghasilkan produk kebijakan yang tidak berkualitas lantaran ketidak-lengkapan, inkonsistensi, dan ketidakjelasan basis datanya. Kualitas lumbung data yang buruk berdampak pada kualitas kebijakan publik yang buruk pula. Saat ini, Data tengah menjadi tren global yang dimanifestasikan dalam bentuk data bervolume besar, bergerak cepat, dan kompleks, yang kemudian dikenal dengan istilah Big Data. Dengan Big Data memungkinkan bagi munculnya paradigma baru dalam riset-riset sosial dan kebijakan. Terobosan penting ini perlu dilakukan dalam bentuk analisis Big Data guna memahami transformasi radikal yang terjadi dalam kehidupan sosial, ekonomi, maupun politik di era revolusi digital. Lebih jauh, Big Data juga merupakan sebuah terobosan mutakhir untuk menuju pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Datakrasi bisa menjadi alat ampuh untuk meminimalisir terjadinya korupsi.

Prinsip bahwa data bisa diakses publik dan kemampuan memberikan informasi secara real time dapat meminimalisir penyalahgunaan wewenang dan potensi korupsi. Sedari awal, korupsi bisa dicegah sedini mungkin. Datakrasi bisa menjadi pemodelan pencegahan korupsi dengan kekuatan data yang rigid dan terkontrol oleh publik. Pada titik itulah datakrasi akan menjadi sangat menentukan dalam politik, pemerintahan, dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan, maupun upaya kolektif memahami kebiasaan manusia.

Selain sebagai alat untuk mengelola data yang berimplikasi pada kualitas perencanaan kebijakan serta transparansi dan akuntabilitas pemerintah kampung. Implementasi Sistem Informasi Kampung juga berkaitan dengan reformasi birokrasi. Jika dilakukan perbandingan antara Pemerintah Kampung dengan warganya, seringkali ditemukan bahwa Pemerintah Kampung tidak ada apa-apanya dibanding dengan warganya, dari segi jumlah, pendidikan, sumber daya finansial, dan lain sebagainya. Tetapi besarnya kapasitas sosial yang ada pada warga tidak serta merta dapat di dorong menjadi modal sosial, sebagaimana yang sering dikenal sebagai partisipasi. Karena partisipasi ini mensyaratkan kepercayaan dari warga ke Pemerintah Kampung. Masih banyak warga yang memandang buruk kultur birokrasi di Pemerintah Kampung. Lamban, korup, tidak transparan, bias kepentingan elit, adalah contoh dari pandangan buruk kultur birokrasi Pemerintah Kampung oleh warganya.

Maka reformasi birokrasi yang dimaksud dalam konteks ini adalah membangun kultur organisasi yang baru. Kemudahan dan kecepatan yang didapatkan dari penerapan Sistem Informasi Kampung dalam pelayanan, diharapkan mampu merubah persepsi warga terhadap Pemerintah Kampung. Perubahan dalam pelayanan yang lebih efektif dan efisien diharapkan menumbuhkan pandangan bahwa Pemerintah Kampung sedang berbenah ke arah yang lebih baik. Dalam proses ini diharapkan nantinya memunculkan kepercayaan publik terhadap Pemerintah Kampung yang menjadi basis dalam proses partisipasi publik.

### 3.2.1 Lingkup Pembahasan

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dirumuskanlah materi Kelas Belajar Pemkam sebagai berikut,

Materi	Deskripsi
<b>Pengantar Data dan Informasi</b>	<p>Dalam materi ini akan mengulas tentang perbedaan data dan informasi. Kemudian bagaimana proses perubahan data menjadi sebuah informasi. Dan bagaimana pentingnya data dalam perumusan pembangunan desa. Dalam materi ini juga diulas tentang keterbukaan informasi publik.</p> <p>Melalui materi ini diharapkan mampu merubah prespektif peserta tentang data. Sehingga dalam melaksanakan kerja-kerjanya peserta mengerti arti pentingnya data dalam konteks perencanaan pembangunan kampung.</p>
Materi	Deskripsi
<b>Identifikasi Kebutuhan Pengelolaan Sistem Informasi Kampung</b>	<p>Dalam operasionalisasi Sistem Informasi Kampung, tentunya terdapat prasyarat-prasyarat yang harus dipenuhi. Identifikasi kebutuhan Pengelolaan SIK adalah salah satu hal yang krusial dalam menemukan prasyarat-prasyarat tersebut.</p> <p>Sesi ini akan mengajak peserta untuk melakukan pemetaan sumberdaya (resource mapping) dengan menemukan kebutuhan-kebutuhan terkait Sistem Informasi Kampung. Dalam materi ini juga diberikan penjelasan tentang kewenangan-kewenangan kampung, serta ruang partisipasi dari warga yang dapat dimunculkan dalam konteks pengelolaan Sistem Informasi Kampung.</p>
<b>Formulasi Legal Drafting Pengelolaan SID</b>	<p>Dalam mengelola Sistem Informasi Kampung, dimungkinkan untuk membuat lembaga desa yang khusus untuk mengelola Sistem Informasi Kampung. Pola pengelolaan Sistem Informasi Desa dengan model kelembagaan, tentunya membutuhkan produk hukum tersendiri dari kampung. Dalam hal ini tidak menutup kemungkinan berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan Pengelolaan Sistem Informasi Kampung, muncul model pengelolaan Sistem Informasi Kampung yang berbeda antar kampung. Model pengelolaan yang berbeda inilah yang akan perlu diformulasikan dalam legal drafting produk hukum kampung.</p>

### 3.2.2 Fasilitator

Untuk menyampaikan materi yang telah dirumuskan dengan baik, menyesuaikan dengan kapasitas dan kapabilitas dalam pembangunan kampung. Tim YSID melibatkan fasilitator yang merupakan akademisi, peneliti, sekaligus konsultan yang mumpuni dalam pelatihan dan pendampingan. Berikut ini merupakan fasilitator untuk kelas belajar pemerintahan kampung,

Nama	Profesi	Instansi
<b>Ryan Sugiarto</b>	Dosen, Peneliti, Tenaga Ahli, Ketua Yayasan	Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta, YSID
<b>Any Sundari</b>	Peneliti	YSID

### 3.2.3 Peserta

Dalam pelatihan ini kami mengundang perwakilan dari 29 kampung dari Kabupaten Berau. Secara lebih spesifik perwakilan yang kami maksud adalah Kepala Kampung/Sekretaris Kampung, Admin Kampung, dan Faskam SIGAP. Adapun list dari kampung yang diundang dalam kelas belajar ini adalah sebagai berikut,

Daftar Kampung			
1	Sukan Tengah	16	Tembudan
2	Bebanir Bangun	17	Sumber Agung
3	Gurimbang	18	Teluk Sumbang
4	Pegar Bukur	19	Teluk Sulaiman
5	Suaran	20	Merabu
Daftar Kampung			
6	Labanan Makmur	21	Merasa
7	Labanan Jaya	22	Pegat Betumbuk
8	Campur Sari	23	Long Duhung
9	Labanan Makarti	24	Manunggal Jaya
10	Pulau Derawan	25	Biatan Ulu
11	Kasai	26	Pulau Besing
12	Talisayan	27	Payung Payung
13	Tunggal Bumi	28	Maluang
14	Sukamurya	29	Sido Bangen
15	Batu Putih		

Selain list kampung - kampung yang ditetapkan sebelumnya, terdapat empat kampung lain yang ditambahkan dalam kelas belajar ini. Penambahan peserta ini berdasarkan permintaan dan inisiatif kampung untuk ikut serta menjadi peserta Akademi Kampung SIGAP angkatan 2. Empat kampung tersebut yaitu Pegat Batumbuk, Maluang, Campur Sari, dan Sido Bangen.

Dari 29 kampung yang diundang, 25 kampung terdapat perwakilan yang menghadiri kelas belajar, sementara 4 kampung tidak terdapat perwakilan yang hadir. Empat kampung tersebut adalah Kasai, Labanan Makmur, Merasa, dan Pulau Derawan.

### 3.2.4 Proses Pelatihan

#### Materi 1 : Pengantar Data dan Informasi

Materi pertama Pengantar Data dan Informasi menjelaskan apa itu data dan perbedaannya dengan informasi. Data sendiri merupakan sebuah fakta yang dapat dikumpulkan dan diinterpretasikan menjadi sebuah informasi. Atau dalam kalimat lain informasi dimaknai sebagai data yang dibunyikan/diinterpretasikan. Dengan pengetahuan dasar terkait data ini, diharapkan peserta mampu membedakan data dan informasi, agar kedepannya kampung tidak terjebak hanya menjadi pengumpul

data. Karena data-data milik kampung hanya akan menjadi sekumpulan data jika tidak diproses dan diinterpretasikan menjadi sebuah informasi.

Kaitannya dengan perencanaan pembangunan kampung, pengumpulan data dan pemrosesannya menjadi sebuah informasi merupakan perihal penting. Dengan adanya kedua hal tersebut perencanaan pembangunan kampung akan lebih tepat sasaran, dan menjawab permasalahan yang ada di kampung. Dalam konteks wilayah adminitrasinya, data kampung haruslah mewakili keadaan kampung yang sebenarnya. Data kampung haruslah berupa data riil, *by name by address*, bukan sebuah data statistik. Karena pemerintah kampunglah yang berhadapan langsung dengan warga.

## **Materi 2 : Pengantar Sistem Informasi Kampung Terintegrasi**

Materi Pengantar Sistem Informasi Kampung Terintegrasi (SIKT) ini disampaikan oleh Waldi yang merupakan Faskam SIGAP Kampung Sumber Agung. Dalam kesempatan ini Waldi menjelaskan tentang Sisitem Informasi Kampung Terpadu yang sudah terlebih dahulu diinstal di Kampung Sumber Agung. Sistem Informasi Kampung Sumber Agung meliputi 3 sistem yaitu website, webGIS, dan sistem pelayanan, sistem pelayanan sendiri sudah terintegrasi dengan aplikasi android yang diperuntukkan untuk warga Kampung Sumber Agung. Menurut pemaparan Waldi, SIKT ini mempermudah Pemerintah Kampung dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Selanjutnya Waldi memberi penjelasan secara detail terkait sistem-sistem yang terdapat dalam SIKT. Website yang tersedia di SIKT berisi berita dan artikel terkait Kampung Sumber Agung, profil aparatur kampung, profil kampung, produk unggulan kampung, laporan realisasi anggaran, produk hukum kampung, produk unggulan kampung hingga portal aduan yang dapat diakses oleh warga.

Untuk sistem pelayanan kampung, Waldi mempraktekkan bagaimana sistem ini membantu proses pelayanan persuratan yang mudah, cepat dan efisien. Waldi juga mempraktekkan bagaimana warga dapat mengakses pelayanan surat melalui aplikasi android secara mandiri, tanpa harus ke kantor kepala kamung. Selain itu Waldi juga menjelaskan bagaimana sistem pelayanan ini dapat digunakan untuk mengelola dan mengarsipkan data. Sementara untuk webGIS dapat digunakan untuk menampilkan data spasial. Penggunaan webGIS ini akan memudahkan proses pembacaan data.

Setelah pemaparan oleh Waldi ini, terdapat beberapa pertanyaan dari peserta, berikut ini pertanyaan dan jawaban yang muncul dalam forum,

Pertanyaan : bagaimana keamanan data dalam Sistem Informasi Kampung ini?

Jawaban : YSID sebagai pengembang Sistem Informasi Kampung Terpadu memiliki SOP dalam pengelolaan data. Termasuk didalamnya *back up* data secara periodik.

Pertanyaan : Apakah SIKT ini bisa terintegrasi dengan OPD-OPD terkait?, karena dari penjelasan yang diberikan tergambar terdapat irisan dengan beberapa OPD.

Jawaban : Integrasi sistem dengan lembaga supradesa, membutuhkan advokasi dari berbagai pihak, saat ini SIKT yang ada mempermudah proses dalam hal menyiapkan data-data yang dibutuhkan Lembaga supradesa.

Pertanyaan : Bagaimana proses pembuatan template surat, apakah bisa membuat template sendiri menyesuaikan kebutuhan dari kampung?

Jawaban : SIKT memiliki fitur pembuatan template surat yang dapat diakses oleh admin.

Pertanyaan : Bagaimana apabila terdapat anak/orang tua yang tidak dapat menggunakan aplikasi android?, apakah bisa diuruskan oleh orang lain?

Jawaban : Dalam sistem android SIKT pemilik akun hanya dapat mengakses datanya sendiri, artinya satu akun tidak dapat mengurus surat untuk orang lain. Hal ini berkaitan dengan keamanan data, apabila satu akun dapat mengakses data penduduk orang lain ditakutkan adanya kebocoran data. Dalam sistem pelayanan ini, pengurusan surat tetap dapat dilakukan secara langsung ke kantor kepala kampung. Artinya untuk warga yang memiliki keterbatasan akses ke aplikasi android tetap dapat mengakses pelayanan dengan langsung datang ke kantor kepala kampung.

### **Materi 3 : Identifikasi Kebutuhan Pengelolaan Informasi Kampung**

Materi Identifikasi Kebutuhan Pengelolaan Informasi Kampung menjelaskan terkait kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan dalam pengelolaan Sistem Informasi Kampung. Materi ini berkaitan dengan banyaknya kampung yang berhasil menginstal Sistem Informasi Kampung maupun Website tetapi kemudian gagal mengoperasionalkannya. Dalam hal ini banyak kemudian Sistem Informasi Kampung maupun website tidak hidup.

Dalam mengidentifikasi kebutuhan pengelolaan kampung, peserta ditugaskan mengidentifikasi hal-hal yang menjadi prasyarat dengan 4 kategori yang diberikan. Kategori tersebut adalah *Software*, *Hardware*, *SDM*, dan *Organoware*. *Software* disini merupakan perangkat lunak yang dibutuhkan oleh kampung untuk menjalankan tugas-tugasnya. Sementara untuk *hardware* adalah perangkat keras yang menjadi prasyarat berjalannya sistem informasi kampung, seperti komputer, sinyal, listrik, dan lain-lain.

SDM merupakan petugas yang menjalankan sistem informasi kampung. SDM ini berkaitan dengan kuantitas dan kualifikasi yang dibutuhkan dalam pengelolaan sistem informasi kampung. Tidak adanya SDM atau SDM yang tidak sesuai kualifikasi akan menyebabkan sistem informasi gagal dioperasionalkan atau mati. Oleh karena itu identifikasi terkait kebutuhan SDM merupakan salah satu hal kunci.

Terakhir, yaitu organoware, organoware merupakan kebutuhan kelembagaan pengelola sistem informasi kampung. Pelembagaan pengelola ini perlu diidentifikasi karena dibeberapa kasus ketika tidak adanya lembaga pengelola menyebabkan operasionalisasi sistem informasi kampung sangat bergantung pada individu yang mampu menjalankan sistem informasi kampung. Artinya ketika individu tersebut tidak lagi menjadi pengelola sistem informasi kampung, sistem informasi kampung tidak lagi beroperasi karena tidak adanya *transfer knowledge*.

Masalah lain yang dimungkinkan muncul karena tidak terlembagakannya pengelola sistem informasi kampung adalah dibeberapa kasus pengelola sistem informasi kampung dilekatkan kepada aparatur kampung, dalam kasus ini banyaknya urusan lain yang harus dijalankan aparatur kampung menyebabkan Sistem Informasi Kampung tidak terkelola. Dengan adanya pelembagaan pengelola sistem informasi

kampung diharapkan terdapat mekanisme organisasi yang menjamin standar operasional sistem informasi kampung.

Terkait organoware ini, fasilitator menjelaskan tentang kewenangan-kewenangan kampung yang dapat didistribusikan atau dibagi kepada warga kampung. Setelah hadirnya UU Desa tahun 2014 terdapat 120 kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kampung. Banyaknya kewenangan yang dimiliki kampung tidak seimbang dengan jumlah SDM yang dimiliki. Maka kebutuhan mendistribusikan kewenangan adalah hal penting. Proses ini telah dicontohkan oleh Panggungharjo yang membagi kewenangan-kewenangannya kepada warga desa melalui lembaga desa. Termasuk pengelolaan sistem informasi desa, Panggungharjo membentuk lembaga bernama Pengelola Sistem Informasi Desa (PSID).

Dalam penugasan yang diberikan, identifikasi peserta terkait kebutuhan *software* mayoritas menyebutkan *software-software* yang didapatkan dari lembaga supradesa, seperti Siskeudes, aplikasi SDGs, aplikasi Disdukcapil, dan lainnya. Para peserta mengaku cukup terbantu dengan *software-software* yang disediakan oleh lembaga supradesa, khususnya aplikasi disdukcapil, namun hal ini mengindikasikan bahwa mayoritas kampung belum memiliki inisiatif untuk membuat *software*-nya sendiri. Terkait hal ini terdapat dua asumsi yang muncul, mayoritas kampung gagal mengidentifikasi kebutuhan terkait *software* yang dapat membantu kinerjanya, sehingga belum ada inisiatif untuk mengembangkan *software* yang sesuai dengan kebutuhannya atau memang kampung sudah dicukupkan dengan *software* yang diberikan lembaga supradesa.

Meskipun mayoritas kampung hanya menyebutkan *software* yang disediakan lembaga supradesa. Namun, ada beberapa kampung yang sudah menerapkan *software* yang tidak disediakan oleh lembaga supradesa, seperti Sumber Agung, Suaran dan Sukan Tengah yang sudah menginstal sistem informasi kampung. Beberapa kampung lain sudah pernah memiliki website namun tidak terkelola. Selain itu, terdapat kampung yang berkeinginan menduplikasi sistem informasi kampung yang dimiliki Sumber Agung, kampung-kampung tersebut adalah Sei Bebanir Bangun, Payung-payung, Suka Murya, dan Pulau Besing.

Terkait dengan *Hardware*, mayoritas kampung sudah memiliki *hardware* yang mumpuni. Bahkan terdapat kampung yang memiliki kamera hingga drone. Hanya Long Duhung yang memiliki permasalahan terkait sinyal dan listrik yang hanya 6 jam. Dan beberapa kampung lain yang sudah terdapat akses jaringan internet meskipun kondisinya masih terbatas seperti pegat batumbuk, dan merabu.

Dalam identifikasi kebutuhan SDM, para peserta belum dapat menyebutkan kuantitas dan kualifikasi yang dibutuhkan dalam pengelolaan sistem informasi kampung. Untuk SDM ini semua kampung masih mengandalkan aparatur kampung, dan beberapa kampung mengandalkan Faskam SIGAP, pun demikian para peserta menyebutkan masih perlu pendampingan dan pelatihan untuk SDM yang mengelola sistem informasi kampung.

Untuk identifikasi kebutuhan organoware, hampir semua peserta menyebutkan belum memerlukan pelembagaan pengelola sistem informasi kampung. Hal ini juga dipengaruhi sulitnya mencari SDM diluar aparatur kampung untuk pengurusan kelembagaan ini. Hanya dua kampung yang sudah memiliki bayangan terkait lembaga pengelola sistem informasi kampung yaitu Suka Murya yang ingin membentuk kelompok kerja dari unsur pemuda desa dan Payung-payung yang berencana mengajak kerjasama lembaga lokal kampung dalam pengelolaan sistem informasi kampung.

Materi Identifikasi Kebutuhan Pengelolaan Sistem Informasi Kampung dilanjutkan di hari kedua, di sesi ini peserta diminta mengidentifikasi personil yang mengelola sistem informasi kampung. Mengadopsi model SIKT milik Sumber Agung, didapatkan kebutuhan personil dengan tugas dan fungsi sebagai berikut,

Personil	Tugas dan Fungsi
<b>Super Admin</b>	Set up sistem, membuat template surat, membuat akun operator, mengontrol keseluruhan sistem, mengatur menu website, mengatur publisitas data spasial pada webGIS.
<b>Operator Website</b>	Mengunggah artikel/berita, mengunggah foto/video, memposting pengumuman, mengunggah laporan/produk hukum kampung, mengelola komentar, mengelola portal pengaduan.
<b>Operator Sistem Pelayanan</b>	Melakukan pelayanan administrasi, mengelola data kependudukan dan data lainnya, membuat akun android warga.
<b>Operator WebGIS</b>	Memproses data spasial, mengunggah data spasial ke webGIS.
<b>Pengisi Konten Website</b>	Menulis berita/artikel, mengambil foto dan video.
<b>Operator Data Spasial</b>	Mengambil data spasial.

Kebutuhan personil beserta tugas dan fungsi yang terdapat dalam tabel di atas merupakan contoh atau patokan bagi peserta dalam mengidentifikasi kebutuhan personil. Artinya setiap peserta dibebaskan untuk menuliskan kebutuhan personil beserta tugas dan fungsinya, menyesuaikan ketersediaan SDM yang ada di Kampung. Proses ini dimaksudkan untuk pemetaan SDM, apabila kampung akan menerapkan SIKT di kampungnya. Dari proses ini, setiap peserta mendapatkan rancangan tim yang nantinya akan menjadi calon pengelola sistem informasi kampung.

#### **Materi 4 : Formulasi Legal Drafting Pengelolaan SID**

Di materi terakhir yaitu Formulasi Legal Drafting, fasilitator kembali menceritakan tentang kelembagaan Pengelola Sistem Informasi Desa milik Panggungharjo. Dan menjelaskan kembali tentang kewenangan-kewenangan kampung yang dapat dibagi habis kepada warga kampung. Dalam sesi ini fasilitator menunjukkan produk hukum yang dikeluarkan Panggungharjo dalam pembentukan Pengelola Sistem Informasi Desa.

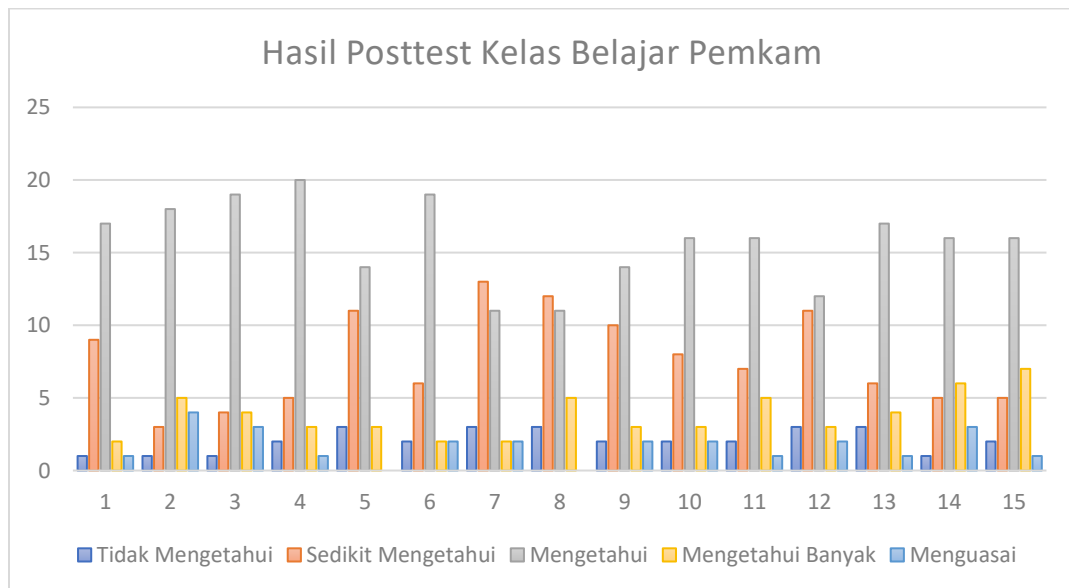
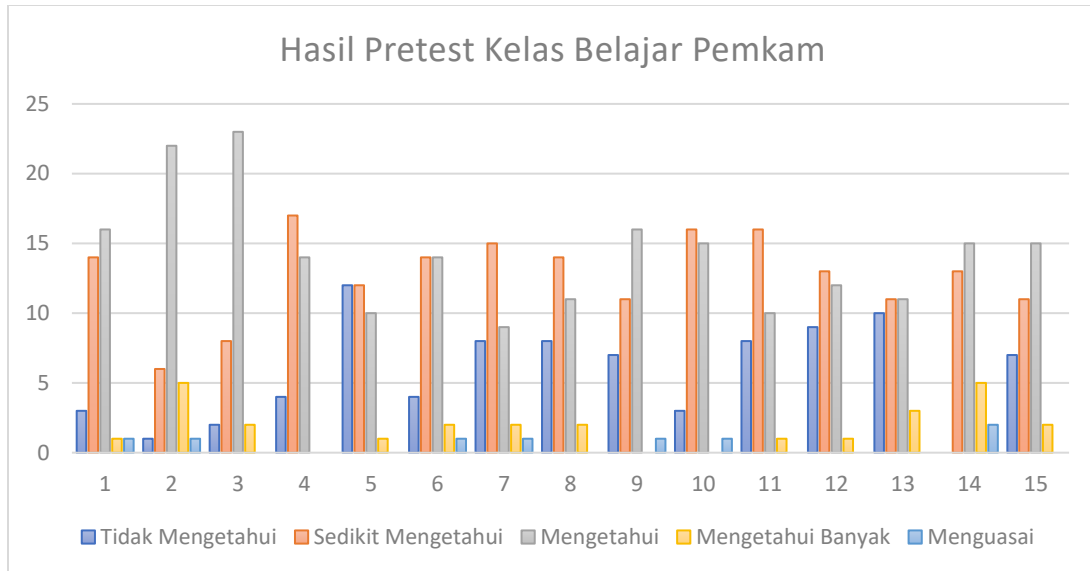
Di sesi ini fasilitator menjelaskan tentang kelebihan model pengelolaan sistem informasi kampung dengan model kelembagaan dibanding model fungsional yang bertumpu pada individu. Kelebihan yang dimaksudkan disini berkaitan dengan mekanisme organisasional yang dapat menjaga kualitas proses pengelolaan sistem informasi kampung. Termasuk kemungkinan gagalnya pengelolaan sistem informasi kampung apabila pengelolaannya dilekatkan kepada aparat kampung yang sudah memiliki tugas lain. Namun demikian, keputusan memilih model pengelolaan sistem informasi kampung diserahkan kepada masing-masing kampung dengan mempertimbangkan konteks lokal kampung.

## Pre-test dan Post-Test

Pretest dan Posttest dilakukan dengan menyebarkan kuisioner daring kepada para peserta. Pretes dan posttest ini berisi tentang pengetahuan peserta terkait berbagai macam tema, dengan 5 level tingkat pengetahuan yaitu tidak mengetahui, sedikit mengetahui, mengetahui, mengetahui banyak, dan menguasai. Adapun terkait tema yang ditanyakan adalah sebagai berikut,

1. Kewenangan-kewenangan yang dimiliki desa
2. Lembaga desa
3. Fungsi data desa
4. Jenis-jenis data desa
5. Basis data pembangunan yang akurat, terpusat dan terintegrasi;
6. Membaca data desa
7. Menghasilkan analisis kebijakan pembangunan yang tepat
8. Perencanaan pembangunan yang terukur dan komprehensif;
9. Mewujudkan monitoring dan evaluasi yang dapat dipertanggungjawabkan;
10. Pengelolaan data desa
11. Pengelolaan system informasi desa
12. Informasi pembangunan yang akurat
13. Berkomunikasi dengan warga desa berbasis system informasi desa
14. Profil desa
15. Memberikan layanan berbasis system informasi

Dalam pengisian ini terdapat perbedaan jumlah antara yang mengisi pretest dan posttest, hal ini berkaitan dengan kehadiran peserta yang berbeda antara hari pertama dan kedua. Terdapat 35 peserta yang mengisi pretest dan 31 peserta mengisi posttest. Sementara itu terdapat 9 peserta yang hanya mengisi bagian pretes dan 5 peserta yang mengisi posttest saja. Berikut ini merupakan grafik hasil *pretest* dan *posttest* kelas belajar pemerintah kampung,



Dari grafik diatas dapat dilihat, dari semua tema yang ditanyakan semuanya mengalami peningkatan. Peningkatan yang dimaksud adalah berkurangnya peseerta yang memilih tidak mengetahui serta sedikit mengetahui, dan bertambahnya peserta yang memilih mengetahui banyak serta menguasai. Pertanyaan nomor 5 terkait basis data yang sebelumnya banyak tidak ketahui peserta yaitu diangka 12 peserta, pada posttest hanya diangka 3. Sementara untuk pertanyaan nomor 13 terkait dengan komunikasi menggunakan sistem informasi kampung, di pretest terdapat 10 peserta yang tidak mengetahui, sementara di posttest hanya 3 peserta yang tidak mengetahui.



Gambar 11 Kelas Belajar 1 Tata Kelola Pemerintah Kampung

### 3.3 KELAS BELAJAR 2

Jika di Kelas Belajar 1, diadakan dengan mengumpulkan peserta di tanjung redeb. Kelas Belajar 2 dilaksanakan di 2 klaster, yaitu kelas tanjung redeb dan kelas pesisir selatan. Berikut ini merupakan waktu dan tempat pelaksanaan kedua klaster kelas tersebut,

#### **Kelas Tanjung Redeb**

Hari, Tanggal : Kamis-Jum'at, 2-3 Juni 2022

Tempat : Hotel Grand Parama, Tanjung Redeb

#### **Kelas Pesisir Selatan**

Hari, Tanggal : Senin-Selasa, 6-7 Juni 2022

Tempat : Ruang Kelas SDN 001 Talisayan

Di kelas belajar ini peserta diajak untuk lebih memahami tentang data. Dari apa itu data dan perbedaannya dengan fakta maupun informasi, karakteristik data, metode pengumpulan data, identifikasi kebutuhan data, hingga menganalisis data. Materi terkait data ini merupakan langkah penguatan kapasitas Pemerintah Kampung dalam memanfaatkan data sebagai navigasi arah perencanaan pembangunan kampung. Kampung yang selama ini hanya sebagai “penyedia” data-data yang dibutuhkan lembaga supra desa, pada kelas ini peserta diajak memahami pemetaan data yang dibutuhkan dalam proses pembangunan kampung.

Materi pokok pada kelas belajar ini, selain terkait tentang data ada materi tentang pengelolaan media. Materi tentang media ini berkaitan dengan prinsip dasar jurnalisme, teknik pembuatan berita, hingga teknik pengambilan gambar. Materi ini dirasa penting mengingat banyak kampung yang gagal melakukan aktivasi *website* yang dimiliki. Sehingga informasi yang dapat diakses di *website* sangat terbatas. Dengan materi ini diharapkan kampung dapat mengelola *website*-nya secara mandiri termasuk dalam penulisan berita ataupun konten.

Dalam penyampaian materi data maupun media, selain diberikan materi teori, peserta juga diajak untuk praktik langsung menggunakan Sistem Informasi Kampung Terintegrasi. Hal yang dipraktikkan langsung diantaranya adalah input dan pengelolaan data tematik dan pengelolaan berita di *website* kampung.

### 3.3.1 Lingkup Pembahasan

No	Materi	Sub-Materi	Output
1	Pengelolaan Data Desa (1)	Data sebagai aset strategis	1. Peserta paham terkait pentingnya data untuk pembangunan desa 2. Peserta mampu memetakan data-data yang dimiliki dan data yang dibutuhkan terkait dengan rencana pembangunan
		Mengidentifikasi data desa	
		Pemetaan dan elaborasi data desa	
2	Pengelolaan Data Desa (2)	Pengkayaan Database	1. Peserta mampu melakukan <i>updating</i> database desa 2. Peserta mampu melakukan analisis terhadap data-data yang dimiliki
		Pengantar Analisis Data	
		Teknis Analisis Data	
3	Pengelolaan Media Desa (1)	Pengantar Jurnalisme	1. Peserta memahami prinsip-prinsip dalam penulisan berita 2. Peserta memahami teknik-teknik menulis dan mengambil gambar dalam pembuatan berita
		Prinsip-prinsip penulisan berita	
		Teknik penulisan berita	
		Teknik pengambilan gambar	
4	Pengelolaan Media Desa (2)	Praktik pembuatan berita	1. Peserta mampu membuat berita 2. Peserta mampu mengelola website
		Praktik mengunggah berita ke website	

### 3.3.2 Fasilitator

Fasilitator Kelas Tata Kelola Pemerintah Kampung	
Achmad Musyaddad	Manajer Initiative Development Service YSID
Damar Saksomo Jati	Staff IT YSID

### 3.3.3 Peserta

Kelas Tanjung Redeb							
1	Bebanir Bangun	6	Labanan Makmur	11	Payung Payung	16	Sido Bangen
2	Gurimbang	7	Long Duhung	12	Pegat Bukur	17	Suaran
3	Kasai	8	Maluang	13	Pegat Betumbuk	18	Sukan Tengah
4	Labanan Jaya	9	Merabu	14	Pulau Besing		
5	Labanan Makarti	10	Merasa	15	Pulau Derawan		
Kelas Pesisir Selatan							
1	Sumber Agung	4	Teluk Sumbang	7	Batu Putih	10	Manunggal Jaya



Selanjutnya peserta diajak untuk menentukan isu strategis apa yang ingin diselesaikan oleh kampung. Dari isu strategis tersebut, peserta diminta mengidentifikasi tujuan kebijakan, sasaran, bentuk program, dan data-data apa saja yang dibutuhkan. Pada tahap ini peserta dikelompokkan sesuai dengan kampungnya masing-masing, sehingga apa yang dirumuskan berbasis apa yang ada di kampung.

## Materi Pengelolaan Media

Pada materi ini dijelaskan terkait berita sebagai produk utama jurnalistik. Berita sendiri adalah laporan, cerita, atau keterangan tentang suatu peristiwa aktual dan penting, keadaan tertentu, ataupun gagasan, pikiran, atau perasaan manusia, salah satu contohnya tanggapan masyarakat terhadap suatu masalah. Terdapat beberapa jenis berita diantaranya *Straight News* (Berita Langsung), *Opinion News* (Berita Opini), *Interpretative News* (Berita Interpretasi), *Depth news* (Berita Mendalam), dan *Investigation news* (Berita Investigasi). Dalam hal ini karena proses penulisannya yang cukup mudah, peserta diarahkan untuk menulis berita langsung di laman *website*-nya. Berita langsung sendiri adalah berita yang ditulis secara singkat, padat, dan lugas. Umumnya berupa berita tentang peristiwa tertentu.



Pada materi ini juga disampaikan terkait nilai berita atau biasa disebut dengan *news values/newsworthy*. Nilai berita ini berguna dalam menentukan peristiwa apa yang akan diberitakan, karena yang perlu diketahui tidak semua peristiwa layak dijadikan sebuah berita. Berikut ini merupakan poin-poin terkait nilai berita :

- **Magnitude.** Seberapa luas pengaruh suatu peristiwa bagi masyarakat luas. Misal, kenaikan harga minyak goreng.
- **Significance.** Seberapa penting arti suatu peristiwa bagi publik. Misal, wabah penyakit.
- **Actuality/Timeliness.** Tingkat aktualitas peristiwa. Misal, peristiwa semenit, sejam, atau maksimal sehari lalu.
- **Proximity.** Kedekatan secara geografis atau psikologis. Misal, banjir di Kelay menarik bagi warga Berau.
- **Prominence.** Ketokohan orang yang terlibat dalam peristiwa. Misal, capres mencangkul di sawah.
- **Dampak (impact).** Seberapa dampaknya terhadap orang banyak.
- **Konflik.** Peristiwa ketegangan, perang
- **Human Interest.** Menyentuh perasaan kemanusiaan.

- **Keanehan (Unusualness).** Hal yang unik, tidak lazim.

Selain nilai berita juga disampaikan materi terkait rumus unsur berita atau yang lebih dikenal dengan 5w+1h. Rumus ini biasanya digunakan secara ketat dalam penulisan berita langsung atau *straight news*. Dalam penulisan berita langsung ini terdapat teknik penulisan dengan meletakkan hal yang paling penting di paragraf awal. Hal ini merupakan strategi untuk menarik pembaca.

Dalam kesempatan ini peserta juga diberikan tugas untuk menulis berita sekaligus mengumpulkan foto. Kedua hal tersebut kemudian direview oleh fasilitator sehingga terdapat perbaikan ketika kampung menulis maupun mengambil gambar untuk berita.



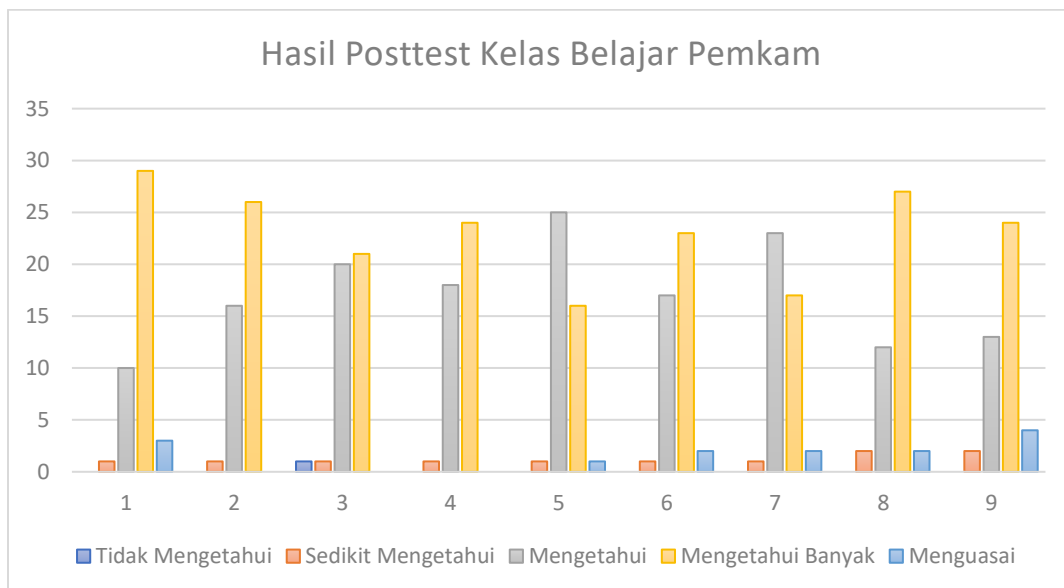
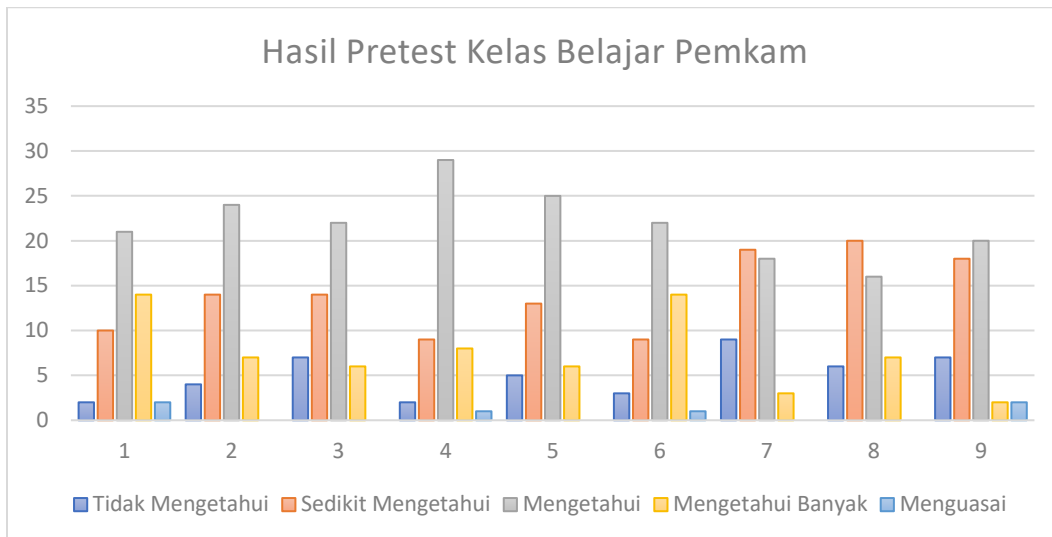
Gambar 12 Kelas Belajar 2 Tata Kelola Pemerintah Kampung

### 3.3.5 Pre-test dan Post-Test

Pretest dan Posttest dilakukan dengan menyebarkan kuisisioner daring kepada para peserta. Pretest dan posttest ini berisi tentang pengetahuan peserta terkait berbagai macam tema, dengan 5 level tingkat pengetahuan yaitu tidak mengetahui, sedikit mengetahui, mengetahui, mengetahui banyak, dan menguasai. Adapun terkait poin-poin yang ditanyakan adalah sebagai berikut,

1. Pemahaman terkait fakta, data, dan informasi
2. Pemahaman terkait kebijakan publik berbasis data
3. Pemahaman terkait kebijakan publik yang baik dan cara mengukur kebijakan tersebut
4. Pemahaman terkait metode pengumpulan data
5. Pemahaman terkait karakteristik data
6. Pemahaman terkait jenis data
7. Pemahaman terkait jurnalistik dan prinsip-prinsipnya
8. Pemahaman terkait menulis berita yang baik
9. Pemahaman terkait foto jurnalistik yang baik

Seperti halnya kelas belajar 1, pada kelas belajar 2 ini jumlah peserta yang hadir di hari pertama dan kedua terdapat perbedaan. Sehingga jumlah pengisi kuisioner untuk *pretes* dan *posttest* memiliki jumlah yang berbeda juga. Berikut ini merupakan grafik hasil *pretest* dan *posttest* kelas belajar pemerintah kampung,



Dari hasil *pretest* dan *posttest* yang dilakukan didapatkan data bahwasanya sebelum pelatihan terdapat 45 jawaban tidak mengaetahui, 126 jawaban sedikit mengetahui, 197 jawaban mengetahui, 67 jawaban mengetahui banyak dan 6 jawaban menguasai dari seluruh poin yang ditanyakan. Sementara setelah pelatihan hanya terdapat 1 jawaban tidak mengetahui, 11 jawaban sedikit mengetahui, 154 jawaban mengetahui, 207 jawaban mengetahui banyak, dan 14 jawaban menguasai. Data ini menunjukkan peserta memahami materi yang disampaikan selama kelas belajar 2.

### 3.4 PROSES PENDAMPINGAN DAN CAPAIAN

Untuk menjamin proses pembelajaran setelah pelatihan, Tim YSID Berau memfasilitasi pendampingan dengan metode *remote* (daring) maupun kunjungan lapangan untuk memastikan proses belajar dalam kelas mulai diimplementasikan. Pada tahap ini, juga dimungkinkan proses saling belajar dan bekerja sama antar peserta.

Merujuk pada rumusan strategis yang telah dirancang, penerapan Sistem Informasi Kampung (SIK) merupakan salah satu langkah strategis untuk melakukan reformasi birokrasi. Langkah ini merupakan pintu masuk untuk melakukan perubahan sistemik mulai dari perencanaan, penatausahaan, hingga monitoring dan evaluasi pembangunan kampung. Langkah ini juga dimaksudkan untuk optimalisasi pelayanan publik, sentralisasi database kampung, serta memberi input dalam pengambilan kebijakan.

Agar perbuahan sistemik yang menjadi tujuan dari penerapan sistem informasi kampung dapat tercapai, penerapan sistem ini tidak boleh hanya dimaknai hanya sebagai penerapan teknologi belaka atau sekadar penginstalan software. Terdapat prasyarat yang perlu dipenuhi agar sistem ini dapat secara nyata dijadikan pintu masuk perubahan. Prasyarat tersebut berkaitan dengan legalitas, kesiapan infrastruktur hingga kesiapan SDM dari kampung.

Berdasarkan hal tersebut, pendampingan untuk pemerintah kampung ini berfokus pada bagaimana Sistem Informasi Kampung dapat diterapkan dan berjalan. Pada kelas belajar 1 telah dipotret potensi, peluang, tantangan dan hambatan penerapan Sistem Informasi Kampung berdasarkan konteks lokal di masing-masing kampung. Hal ini menjadi dasar untuk membangun perspektif awal tentang bagaimana skema penerapan Sistem Informasi Kampung yang efektif.

Pada kelas belajar 1, peserta sudah diajak untuk mengidentifikasi kebutuhan dalam penerapan dan pengelolaan Sistem Informasi Kampung, baik kebutuhan perangkat keras (komputer, jaringan, dll), perangkat lunak dan organoware (SDM atau kelembagaan pengelola sistem). Kemudian hasil identifikasi kebutuhan tersebut dijadikan acuan dalam melakukan pendampingan. Selain itu peserta yang hadir di kelas belajar 1 diberi tugas untuk mendiskusikan hasil pelatihan kepada aparatur kampung lain. Hal ini dimaksudkan agar langkah strategis penerapan Sistem Informasi Kampung menjadi langkah bersama, bukan hanya peserta yang hadir di kelas belajar. Harapannya dengan adanya konsen bersama terkait penerapan Sistem Informasi Kampung, terdapat percepatan perubahan seperti yang diharapkan.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa pendampingan dilakukan secara daring maupun kunjungan ke kampung secara langsung. Proses awal yang dilakukan adalah menanyai hasil dari diskusi terkait penerapan Sistem Informasi Kampung. Dalam proses ini apabila kampung membutuhkan penjelasan ulang terkait Sistem Informasi Kampung, baik dari segi konsep maupun hal teknis, tim YSID akan menjelaskan kembali sesuai kebutuhan kampung. Dalam hal ini YSID menyediakan *video preview*, *concept note*, dan pamflet terkait SIK untuk menunjang penjelasan terkait SIK. Kami juga mengirimkan Surat Penawaran ke Pemerintah Kampung sebagai bahan pembahasan untuk penerapan SIK. Selain itu tim YSID juga melakukan diskusi langsung secara luring apabila terdapat kampung yang membutuhkan.

Tahapan selanjutnya adalah mengupayakan adanya komitmen dari kampung-kampung terhadap penerapan SIK. Komitmen ini diwujudkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama antara YSID dengan

Pemerintah Kampung. Adanya surat perjanjian ini menjadi pengikat untuk kampung, sehingga ada peran aktif kampung dalam skema penerapan SIK. Surat perjanjian tersebut juga dipakai untuk kampung-kampung yang belum menganggarkan pengadaan sistem informasi kampung dan menunggu anggaran perubahan. Hal ini sebagai langkah percepatan sehingga sistem informasi kampung dapat segera terinstal tanpa harus menunggu lama.

Langkah selanjutnya adalah instalasi sistem dan pelatihan teknis kepada calon pengelola sistem informasi kampung. Setelah semua langkah tersebut sudah dapat dilaksanakan, langkah yang terakhir adalah memastikan SIK dapat dioperasionalkan secara mandiri oleh pemerintah kampung. Pada tahapan ini dilakukan monitoring terhadap perkembangan proses operasionalisasi kampung. Berikut ini merupakan informasi terkait penggunaan Sistem Informasi Desa dari kampung-kampung peserta Akademi Kampung SIGAP angkatan 2.

No	Nama Kampung	Status SID/SIK	Mitra	Status web	Alamat web
1	Sumber Agung	Aktif	YSID	Aktif	<a href="https://sumberagung-berau.desa.id/">https://sumberagung-berau.desa.id/</a>
2	Suaran	Aktif	YSID	Aktif	<a href="https://suaran-berau.desa.id/">https://suaran-berau.desa.id/</a>
3	Merabu	Terinstal	YSID	Aktif	<a href="https://merabu.desa.id/">https://merabu.desa.id/</a>
4	Payung-payung	Terinstal	YSID	Aktif	<a href="https://payungpayung.desa.id/">https://payungpayung.desa.id/</a>
5	Labanan Makmur	Aktif	-	Aktif	<a href="https://labananmakmur-berau.desa.id/">https://labananmakmur-berau.desa.id/</a>
6	Tembudan	Terinstal	YSID	Aktif	<a href="https://tembudan-berau.desa.id/">https://tembudan-berau.desa.id/</a>
7	Sukamurya	Terinstal	YSID	Terinstal	<a href="https://sukamurya-berau.desa.id/">https://sukamurya-berau.desa.id/</a>
8	Maluang	Terinstal	YSID	Terinstal	<a href="https://maluang-berau.desa.id/">https://maluang-berau.desa.id/</a>
9	Teluk Sumbang	Terinstal	YSID	Terinstal	<a href="https://teluksumbang.desa.id/">https://teluksumbang.desa.id/</a>
10	Teluk Sulaiman	Terinstal	YSID	Terinstal	<a href="https://teluksulaiman.desa.id/">https://teluksulaiman.desa.id/</a>
No	Nama Kampung	Status SID/SIK	Mitra	Status web	Alamat web
11	Sido Bangen	Terinstal	YSID	Terinstal	<a href="https://sidobangen-berau.desa.id/">https://sidobangen-berau.desa.id/</a>
12	Batu Putih	Terinstal	YSID	Terinstal	<a href="http://batuputih.desa.id/">http://batuputih.desa.id/</a>
13	Sukan Tengah	Terinstal	Berau Tech	Terinstal	<a href="https://sukantengah.sambaliung.id">https://sukantengah.sambaliung.id</a>
14	Gurimbang	Terinstal	Berau Tech	Terinstal	<a href="https://gurimbang.sambaliung.id/">https://gurimbang.sambaliung.id/</a>
15	Talisayan	Belum ada	-	Terinstal	<a href="https://talisayan-berau.desa.id/">https://talisayan-berau.desa.id/</a>
16	Labanan Jaya	Belum ada	-	Terinstal	<a href="https://labananjaya-berau.desa.id/">https://labananjaya-berau.desa.id/</a>
17	Sei Bebanir Bangun	Belum ada	-	Terinstal	<a href="https://seibebanirbangun-berau.desa.id/">https://seibebanirbangun-berau.desa.id/</a>
18	Pegat Bukur	Belum ada	-	Terinstal	<a href="https://pegatbukur-berau.desa.id/">https://pegatbukur-berau.desa.id/</a>
19	Long Duhung	Belum ada	-	Terinstal	<a href="https://longduhung-berau.desa.id/">https://longduhung-berau.desa.id/</a>
20	Biatan Ulu	Belum ada	-	Terinstal	<a href="https://biatanulu-berau.desa.id/">https://biatanulu-berau.desa.id/</a>
21	Campursari	Belum ada	-	Terinstal	<a href="https://campursari-berau.desa.id/">https://campursari-berau.desa.id/</a>
22	Pulau Besing	Belum ada	-	Terinstal	<a href="https://pulaubesing.desa.id/beranda/">https://pulaubesing.desa.id/beranda/</a>
23	Tunggal Bumi	Belum ada	-	Terinstal	<a href="https://tunggalbumi-berau.desa.id/">https://tunggalbumi-berau.desa.id/</a>
24	Labanan Makarti	Belum ada	-	Terinstal	<a href="https://labananmakarti-berau.desa.id/">https://labananmakarti-berau.desa.id/</a>
25	Pulau Derawan	Belum ada	-	Terinstal	<a href="https://pulauderawan-berau.desa.id/">https://pulauderawan-berau.desa.id/</a>
26	Kasai	Belum ada	-	Terinstal	<a href="https://kasai-berau.desa.id/">https://kasai-berau.desa.id/</a>
27	Merasa	Belum ada	-	Terinstal	<a href="https://merasa-berau.desa.id/">https://merasa-berau.desa.id/</a>

28	Manunggal Jaya	Belum ada	-	Terinstal	<a href="https://manunggaljaya-berau.desa.id/">https://manunggaljaya-berau.desa.id/</a>
29	Pegat Batumbuk	Belum ada	-	Terinstal	<a href="https://pegatbatumbuk-berau.desa.id/">https://pegatbatumbuk-berau.desa.id/</a>

Dari seluruh peserta Akademi Kampung SIGAP angkatan 2, sebenarnya semuanya mempunyai *website*. Namun *website-website* tersebut belum dikelola dengan baik. Kebanyakan kampung belum melakukan *update* terkait konten yang ada di *website*.



Gambar 13 Website Kampung Payung-payung

Pelatihan pengelolaan media yang sudah diberikan YSID, menemui kendala dalam pengoperasionalannya. Tidak adanya staf atau SDM khusus yang mengelola *website* diasumsikan menjadi penyebabnya. Pada kelas belajar 1 hampir semua kampung menganggap bahwa terkait pengelolaan *website* dapat dilekatkan kepada aparatur kampung yang ada. Skema ini gagal dijalankan ditengarai karena ada beberapa faktor yang mendasari sebagai berikut,

1. Belum adanya aturan yang secara tegas memberikan tugas pengelolaan *website* kepada aparatur kampung yang dipilih.
2. Penambahan beban tugas tanpa adanya tambahan insentif membuat tugas tersebut tidak dikerjakan. Hal ini ditambah dengan tidak adanya sanksi apapun ketika tugas tersebut tidak dijalankan.
3. SDM tidak mempunyai kemampuan pengelolaan *website* atau kemampuan menulis berita, sehingga tugas tersebut tidak dijalankan.
4. Tidak ada arahan dan kontrol dari Kepala Kampung terkait pengelolaan *website*.

Untuk Sistem Informasi Kampung, dari 14 kampung yang sudah mempunyai sistem, hanya 3 kampung yang sudah mengoperasionalkan sistem tersebut. Penyebab masalah ini kurang lebih sama dengan apa yang menyebabkan *website* kampung tidak dikelola. Namun untuk SIK ini problem utamanya adalah

belum ada ketegasan terkait penggunaan sistem dari kepala kampung, sehingga terdapat kebingungan setelah adanya instalasi maupun pelatihan terkait sistem. 14 kampung yang sudah menginstal SIK, hampir semuanya bermitra dengan pihak ketiga. Hanya Labanan Makmur yang mengembangkan sistemnya sendiri.

### 3.5 REKOMENDASI

1. Pelibatan aktif dari kepala kampung dalam implementasi Sistem Informasi Desa/Kampung mutlak dibutuhkan, sehingga sistem tidak hanya berhenti di instalasi ataupun pelatihan.
2. Kampung-kampung yang memiliki *website* atau SIK berjalan baik umumnya bergantung pada 1-2 SDM yang ada. Ketergantungan kepada individu ini menyebabkan sistem rawan terhenti operasionalitasnya ketika individu tersebut sudah tidak terlibat lagi. Sehingga dibutuhkan skema pelebagaan pengelola SIK sehingga operasionalitas sistem terjaga.
3. Pengkayaan modul Sistem Informasi Kampung. Selama proses Akademi Kampung SIGAP angkatan 2 ini, pelatihan dan pendampingan SIK difokuskan pada pengelolaan media dan pelayanan. Selanjutnya modul WebGIS bisa ditambahkan dalam menu pelatihan dan pendampingan SIK.
4. Membangun ruang diskursus antar Pemeritnah Kampung agar dapat terjadi kerjasama yang meluas. Ujung dari kerjasama ini diharapkan muncul ekosistem pemampu untuk kampung terus berkembang.

## 4 PENGUATAN TATA KELOLA BUMK

---

Salah satu peningkatan ekonomi nasional adalah dengan menumbuhkan ekonomi kemasyarakatan yang bisa dimulai dari desa dengan pembuatan Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes ). BUMDes adalah lembaga desa yang memiliki dua aspek yaitu aspek ekonomi dan aspek sosial. Aspek ekonomi yang terdapat pada Permendesa No. 5 Tahun 2015 bahwa tujuan utama BUMDesa adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat desa sedangkan secara sosial BUMDesa akan langsung bersinggungan dengan kehidupan masyarakat atau komunitas tertentu sehingga untuk mencapai tujuan sebagaimana diamanatkan oleh Permendesa No. 5 tahun 2015 praktik sosial kelembagaan BUMDesa harus menjadi pola yang menyatu dengan struktur sosial masyarakat. Pendirian BUMDes penting dilakukan di setiap desa untuk memperkuat konsep tradisi berdesa yang menempatkan desa sebagai wadah kolektif dalam kehidupan beregara dan bermasyarakat.

Desa memiliki kesempatan dan kekuatan membangun ekonomi yang berkeadilan, dengan memberikan kesempatan terbuka bagi warganya untuk menjalankan aktivitas produktif, juga mengakses lahan dan ketersediaan pangan. Peran Bumdes, dalam kajian ini menunjukkan signifikansi besar terhadap optimisme Bersama, bahwa desa, dengan kebersamaan dan segala potensinya, akan mampu menemukan ruang dan kesempatan mengelola aset dan relasi ekonomi demi kepentingan bersama.

Keberadaan BUMDes di samping pendiriannya untuk memenuhi amanat Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 4 Tahun 2015 tentang pendirian, Pengurusan, dan pengelolaan dan pembubaran Badan usaha Milik Desa, dimana peraturan tersebut menunjukkan bahwa pendirian BUMDes bertujuan untuk; 1). Meningkatkan perekonomian desa; 2). Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa; 3). Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa; 4). Mengembangkan kerjasama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga; 5). Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga; 6). Membuka lapangan kerja; 7). Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa; dan 8). Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.

Bumdes yang produktif terbukti mampu menjadi salah satu tiang penyangga kemandirian ekonomi desa. Genetika bumdes terbilang unik: memberikan benefit pada masyarakat di satu sisi, serta menghasilkan profit di sisi lain. Perspektif untuk melihat kebermanfaatan Bumdes dapat dilihat dari 3 kacamata, yaitu:



Gambar 14 Perspektif Pengelolaan BUMDes

Pertama, Perspektif ekonomi, sebagai badan usaha Bumdes yang dikelola secara efektif dan efisien dapat menghasilkan profit sehingga dapat memberikan penghasilan bagi warga desa serta memberikan sumbangsih bagi pendapatan asli desa. Dilihat dari perspektif ekonomi, BUMDes meruakan badan usaha, sebuah instuti bisnis, yang karenanya entreneurship bisa digunakan sebagai basis anaiisis dalam memahami perilaku BUMDes dalam menjalankan usahanya.

Kedua, Perspektif sosial, Bumdes dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat luas melalui unit-unit usaha yang mengatasi permasalahan sosial seperti pengolahan sampah, dll. Pelembagaan bumdes pada akhirnya juga membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat desa serta menciptakan perputaran ekonomi baru melalui aktivitas ekonomi yang dipelopori Bumdes.

Perspektif ekonomi menjadikan profit sebagai ukuran keberhasilan BUMDesa, sedangkan perspektif sosial menjadikan benefit sebagai ukuran keberhasilannya. Tampak dua hal yang kontradiktif tetapi penekatan yang mempertemukan keduanya adlaah socio entrepreneurship atau kewirausahaan sosial. Keuntungan tetap diperlukan untk memastikn keberlanjutan usaha sehingga dapat senantiasa memberikan manfaat bagi warga desa maupun pemerintah desa.

Ketiga, Perspektif politik, Bumdes merupakan wujud perpanjangan tangan dari pemerintah desa guna membangun kemandirian desa. Bumdes merupakan langkah menghadirkan layanan negara sampai ke level desa dalam rangka mengurangi pengangguran dan kemiskinan di desa. Kesimpulannya adalah Bumdes merupakan perwujudan nyata demokratisasi ekonomi local tingkat desa. Masyarakat desa menjadi pemilik langunsunga tas usaha yang dimiliki BUMdesa.

Meskipun punya peran strategis, namun keberadaan BUMDes/BUMK di kampung-kampung kabupaten Berau dirasa belum optimal. Dalam temuan Akademi Kampung SIGAP angkatan pertama masalah yang umum ditemui BUMK di Berau adalah terkait perencanaan usaha dan akuntabilitas. Dua hal tersebut kemudian menjadi menu utama dalam Akademi Kampung SIGAP angkatan 2 ini.

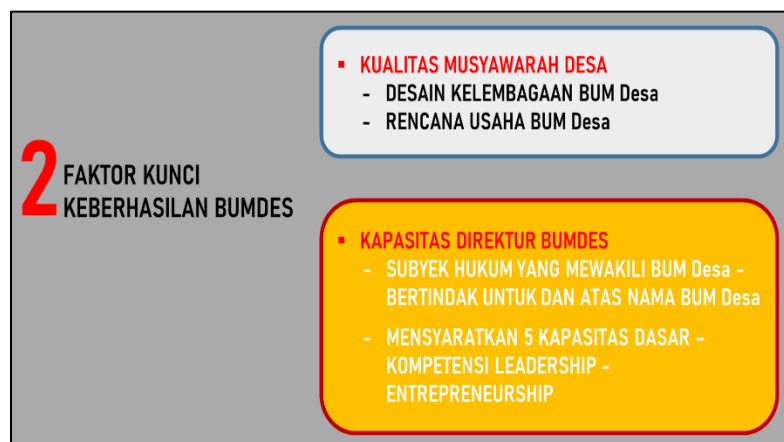
Perencanaan bisnis BUMK penting disusun sebagai dasar panduan guna menentukan aktivitas usaha kedepan yang menguntungkan. Perencanaan bisnis yang logis dan berdasarkan informasi pasar

memungkinkan tujuan BUMK dapat dicapai secara efektif, dan efisien. Pada dasarnya rencana bisnis menggambarkan aktivitas usaha yang akan dijalankan pada periode mendatang.

Selain hal di atas, perencanaan bisnis juga menjadi panduan operasional usaha yang penting bagi BUMK. Dengan begitu, BUMK tahu langkah dan cara apa saja yang harus dilakukan untuk menjalankan operasionalnya. Apabila perencanaan bisnis ini tidak ada atau “asal-asalan”, gerak BUMK menjadi tidak terarah sehingga resiko kegagalan lebih besar.

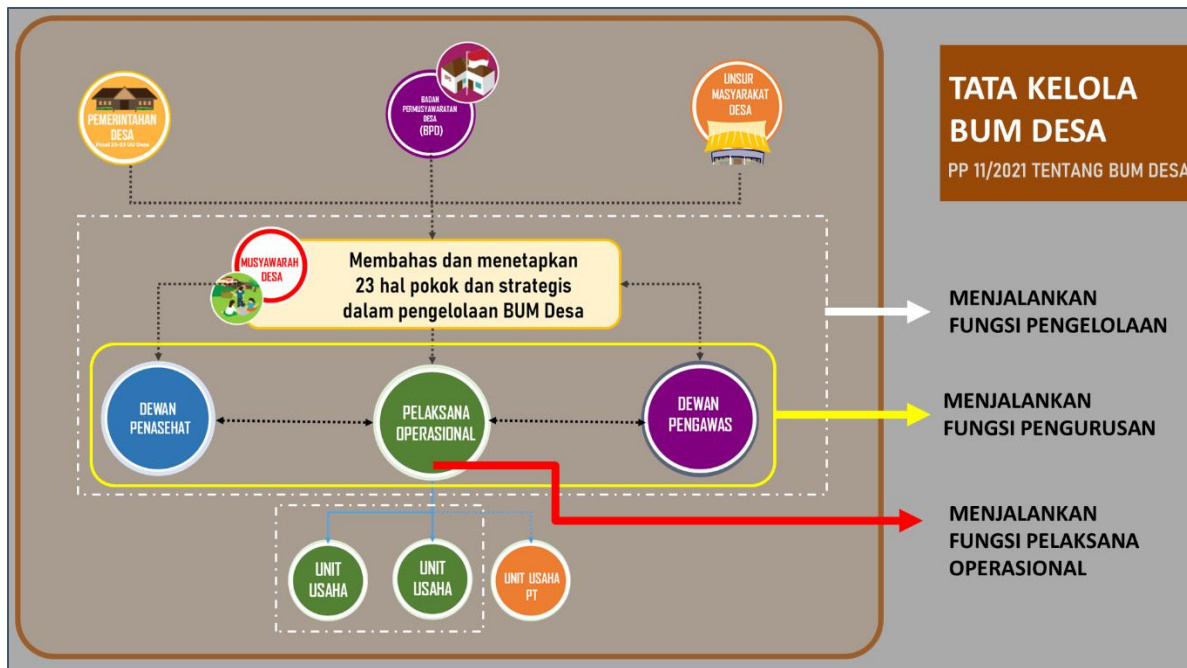
Akuntabilitas disebutkan di atas, berkaitan dengan pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan yang baik akan memberikan informasi keuangan yang valid dan relevan terkait pengambilan keputusan organisasi. Informasi ini menjadi aspek penting bagi manajemen untuk dapat membuat keputusan yang tepat dari suatu perencanaan yang memadai. Kesalahan dalam mengidentifikasi keberadaan sumber daya dan rencana atau target yang hendak dicapai akan mengakibatkan kegagalan dari suatu kegiatan, bahkan dapat menyebabkan kebangkrutan. Maka tata kelola keuangan BUMK menjadi krusial bagi keberlanjutan usaha.

Selain isu terkait perencanaan usaha dan akuntabilitas, hal lain yang menjadi isu strategis dalam Akademi Kampung SIGAP angkatan 2 adalah terkait transformasi BUMDes/BUMK pasca disahkannya PP. 11 tahun 2021. Pasca diterbitkannya PP 11/2021, BUMK sebagai badan hukum bisa langsung menjalankan usahanya. Selain itu sebagai entitas badan hukum, BUMK kini



sah menjalin kerja sama dengan badan hukum lain seperti PT, CV, Koperasi hingga melakukan pinjaman ke perbankan. Terbitnya PP 11/ 2021 juga sekaligus menguatkan perpektif sosial dan bisnis bagi BUMK. Dari persepektif politik, makna kewenangan politis pemerintah kampung pun semakin mengecil. Karenanya, keberhasilan usaha BUMK akan ditentukan oleh kualitas musyawarah kampung dan kapasitas direktur BUMK, baik dari aspek *leadership* maupun aspek *entrepreneurship*.

keberadaan Muskam (Musyawarah Kampung) kini memiliki peran vital dalam tumbuh kembang BUMK karena pembahasan 23 hal pokok dan strategis pengelolaan BUMK diputuskan melalui Muskam. 23 hal pokok tersebut mulai dari pembentukan, pemilihan usaha, penyertaan modal, evaluasi, dan seterusnya.



Terbitnya PP.11/2021 telah banyak merubah peta pengelolaan BUMKam. Sehingga perlu adanya persiapan dari pengurus BUMK. Persiapan tersebut juga berkaitan dengan peningkatan kapasitas pengurus BUMK yang meliputi landasan filosofis pengelolaan BUMK serta landasan yuridis pengelolaan BUMK mengacu dinamika peraturan yang menyertainya.

Berdasarkan ulasan di atas, maka penguatan kapasitas teknis tata kelola BUMK Akademi Kampung SIGAP angkatan 2 akan difokuskan pada tiga hal pokok beserta turunannya, yakni :

- a. Penyesuaian Tata Kelembagaan
  - Penyesuaian Perkam
  - Penyesuaian AD-ART
  - Struktur organisasi dan tata kelola
- b. Kapasitas Perencanaan Usaha
  - Customer profiling
  - Value creation
  - Product management
  - Calculate risk taking
- c. Penerapan Sistem Pengelolaan Keuangan
  - Pendampingan pengelolaan keuangan BUMK dengan aplikasi keuangan

#### 4.1 RAPID ASSESSMENT

*Rapid Assessment* merupakan sebuah metode untuk menilai atau mengkaji secara cepat. Asesmen untuk Pengurus BUMK ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dasar terkait pengurusan sertifikat badan hukum BUMK, tata kelola keuangan BUMK, dan tata kelola organisasi BUMK. Hal ini berkaitan dengan

perumusan materi dan strategi dalam pelatihan serta pendampingan yang akan dilakukan dalam Akademi Kampung SIGAP. Sasaran *rapid assessment* ini adalah 21 Pengurus BUMK peserta Akademi Kampung SIGAP angkatan 2. Asesmen dilakukan dengan menyebar kuisisioner daring kepada sasaran. Pertanyaan-pertanyaan dalam kuisisioner berkaitan tentang proses pengurusan sertifikat badan hukum.

Namun ada indikasi terdapat kesalahan pengisi kuisisioner dalam memahami pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Seperti halnya pertanyaan “Apakah BUMK Sudah Berbadan Hukum?” enam BUMK menjawab sudah berbadan hukum. Namun setelah ditelusuri ternyata hanya terdapat dua BUMK yang sudah bersertifikat badan hukum. Selain itu pertanyaan terkait dokumen persyaratan pengajuan sertifikat badan hukum yaitu AD dan ART yang disesuaikan dengan PP. 11 tahun 2021. 16 Kampung menjawab sudah menyusun AD dan ART tersebut, namun ketika ditelusuri hanya 3 kampung yang sudah memiliki AD dan ART perubahan sesuai dengan PP. 11 dan Pemendesa no 3 tahun 2021.

Terkait hal ini kami melakukan pencarian data-data terkait pengurusan sertifikat BUMK yang dilakukan oleh BUMK peserta Akademi Kampung SIGAP angkatan 2, hasilnya dapat dilihat pada tabel 3. Dari data yang didapatkan, BUMK Labanan Makarti dan BUMK Pegat Bukur sudah memiliki sertifikat badan hukum. Selain itu terdapat 17 BUMK yang pengajuan namanya terverifiaksi. Namun 17 kampung tersebut belum melakukan pengajuan berkas. Sementara itu ada 2 BUMK yang belum mengajukan nama yaitu Merabu dan Batu Putih.

Tabel 3 Data Pengajuan Sertifikat Badan Hukum BUMK

No	Kecamatan	PEMKAM	BUMKAM	Status Pendaftaran Badan Hukum BUMDes	Proses Berkas Pendaftaran
1	SAMBALIUNG	SUKAN TENGAH	BUM DESA CINTA AMANAH SUKAN TENGAH	Sertifikat Badan Hukum AHU-00974.AH.01.33.TAHUN 2022	
			LONG LANUK / BUM DESA LANUK PERMAI LONG LANUK	Nama Terverifikasi	Belum Pengajuan Berkas
		GURIMBANG	GURIMBANG	Nama Terverifikasi	Belum Pengajuan Berkas
		PEGAT BUKUR	PEGAT BUKUR	Sertifikat Badan Hukum AHU-01297.AH.01.33.TAHUN 2022	
		SUARAN	SUARAN	Nama Terverifikasi	Belum Pengajuan Berkas
		BEBANIR BANGUN		Belum Mengajukan Nama	
2	TELUK BAYUR	LABANAN MAKMUR	LABANAN MAKMUR	Nama Terverifikasi	
		LABANAN JAYA		Nama Terverifikasi	Belum Pengajuan Berkas
		LABANAN MAKARTI	LABANAN MAKARTI	Sertifikat Badan Hukum AHU-01219.AH.01.33.TAHUN 2022	
3	PULAU DERAWAN	PULAU DERAWAN		Nama Terverifikasi	Belum Pengajuan Berkas
			TANJUNG BATU	Nama Terverifikasi	Belum Pengajuan Berkas
		KASAI		Belum Mengajukan Nama	
4	TALISAYAN	TALISAYAN	BUM DESA MANDIRI TALISAYAN	Nama Terverifikasi	Belum Pengajuan Berkas
		TUNGGAL BUMI	TUNGGAL BUMI	Nama Terverifikasi	Belum Pengajuan Berkas
		SUKAMURYA		Nama Terverifikasi	Belum Pengajuan Berkas
5	BATU PUTIH	BATU PUTIH	BATU PUTIH	Belum Mengajukan Nama	
		TEMBUDAN	TEMBUDAN	Nama Terverifikasi	Belum Pengajuan Berkas
		SUMBER AGUNG	SUMBER AGUNG	Nama Terverifikasi	Belum Pengajuan Berkas
6	BIDUK-BIDUK	TELUK SUMBANG		Nama Terverifikasi	Belum Pengajuan Berkas
			BIDUK-BIDUK	Nama Terverifikasi	Belum Pengajuan Berkas
		TELUK SULAIMAN	TELUK SULAIMAN	Nama Terverifikasi	Belum Pengajuan Berkas
7	KELAY	MERABU	MERABU	Belum Mengajukan Nama	
		MERASA	MERASA	Nama Terverifikasi	Belum Pengajuan Berkas
		LONG DUHUNG	LONG DUHUNG	Nama Terverifikasi	Belum Pengajuan Berkas
8	BIATAN	MANUNGGAL JAYA		Nama Terverifikasi	Belum Pengajuan Berkas
		BIATAN ULU	BIATAN ULU	Nama Terverifikasi	Belum Pengajuan Berkas
9	GUNUNG TABUR	PULAU BESING		Proses Verifikasi Berkas	Lengkap
			MALUANG	Nama Terverifikasi	Belum Pengajuan Berkas
			MELATI JAYA	Nama Terverifikasi	Belum Pengajuan Berkas
10	MARATUA	PAYUNG-PAYUNG	PAYUNG-PAYUNG	Nama Terverifikasi	Belum Pengajuan Berkas

## 4.2 KELAS BELAJAR 1

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa salah satu temuan kunci terkait BUMK di Kabupaten Berau adalah terkait perencanaan usaha BUMK yang belum didasarkan pada analisa usaha yang jelas. Berkaitan dengan standarisasi BUMK sesuai dengan PP. 11, perencanaan usaha yang baik menjadi salah satu kunci. Hal ini berkaitan dengan dimasukkannya jenis usaha yang dijalankan BUMK dalam dokumen Perkam maupun AD/ART. Dokumen-dokumen tersebut menjadi syarat pengurusan sertifikat badan hukum. Maka apabila perencanaan usaha BUMK tidak didasarkan analisa usaha yang jelas, kedepannya terdapat potensi masalah adminitrasi yang akan dialami BUMK. Selain itu, status badan hukum dari BUMK akan menjadi sia-sia apabila perencanaan bisnis tidak dilakukan dengan baik dan menyebabkan BUMK kesusahan meyakinkan pihak lain untuk bekerjasama.

### 4.2.1 Lingkup Pembahasan

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dirumuskanlah materi Kelas Belajar Pemkam sebagai berikut,

Materi	Deskripsi
<b>Filosofi BUM Kampung/BUM Desa dan Transformasi Pasca PP. 11</b>	<p>BUMKam adalah sebuah entitas yang unik, di satu sisi harus berjiwa bisnis, di sisi lain harus berwatak sosial. Namun diluar kedua hal tersebut, BUMKam merupakan perpanjangan tangan Pemerintah Kampung untuk menyelesaikan sebagian masalah di kampung, sekaligus saluran komunikasi dalam berhubungan dengan warganya.</p> <p>BUMKam harus dipahami dari tiga perspektif, yakni: 1.) Perspektif Politik, 2.) Perspektif Ekonomi, dan 3.) Perspektif Sosial.</p> <p>Sesi ini merupakan sesi krusial untuk meletakkan pondasi pemahaman filosofis tentang BUMKam, sehingga aktualisasi kerja – kerja BUMKam akan mencerminkan ketiga perspektif tersebut.</p>
<b>Menemukan Peluang Usaha Kampung</b>	<p>Pemetaan bentang merupakan salah satu hal yang krusial didalam membangun jenis usaha BUMDes. Melalui pemetaan bentang, warga dapat membagi, mengukur, mengelompokan sekaligus mengamati bagaimana kondisi fisik dan non fisik yang ada di desanya. Dengan demikian yang disebut dengan pemetaan bentang adalah konsep partisipatif untuk mengamati, menilai dan mengukur apa yang tersedia di suatu wilayah dan mengelompokannya dalam bidang yang sesuai (alam, sosial, ekonomi dst)</p>

	Melalui penggalan tersebut, kami mendorong peserta latih untuk menemukan 50 ide bisnis yang dapat dilakukan di desanya. Seliar mungkin, terlepas dari apakah bisnis itu akan layak dijalankan atau tidak.
<b>Perencanaan Usaha</b>	BUMkampung dalam menjalankan unit usaha harus bisa menganalisa dengan benar dan harus melihat pasar seluas-luasnya agar unit usaha bisa berjalan dan berkembang dengan baik sehingga modal yang dikeluarkan cukup banyak tidak sia-sia. Meningkatkan Value produk yang akan dijadikan produk unit usaha (Branding) agar usaha yang di jalankan BUMkampung mempunyai nilai produk yang lebih dan menarik, produk unit usaha bisa juga disisipkan asal-usul mengenai cerita yang ada di kampung tersebut dan mengunci sekmen pasar.
<b>Kalkulasi Resiko</b>	Dalam bisnis BUMkampung melihat jenis usaha harus menghitung rinci pengeluaran kebutuhan, karena berkaitan dengan penyertaan modal. Bagi BUMK yang masih re-struktur harus membenahi kepengurusan, tata kelola kepengurusan ,dan tata kelola keuangan. Dan peserta yang mencoba mengerjakan analisa kelayakan usahanya akan terlihat laba bersih yang didapat dan bisa menganalisa layak atau tidaknya usaha yang akan di jalankan. Analisa Kelayakan Usaha adalah salah satu alat untuk melihat suatu usaha yang akan dijalankan maupun usaha yang sudah berjalan, didalam analisa kelayakan usaha terebut akan tertera laba rugi dan harga pokok pendapatan yang akan terlihat balik modal di tahun berapa dan harapannya bisa mempertimbangkan sebelum menjalankan unit usahanya.

#### 4.2.2 Fasilitator

<b>Nama</b>	<b>Profesi</b>	<b>Instansi</b>
<b>Ahmad Musyadad</b>	Praktisi Desa dan Peneliti Penasihat	UNU Yogyakarta BUMDes Panggung Lestari
<b>Aditya Mahendra Putra</b>	Direktur Eksekutif Penasihat	YSID BUMDes Panggung Lestari

#### 4.2.3 Peserta

Dalam pelatihan ini kami mengundang perwakilan dari 24 kampung dari Kabupaten Berau. Secara lebih spesifik perwakilan yang kami maksud adalah Ketua BUMK, Bendahara BUMK, dan Faskam SIGAP. Adapun list dari kampung yang diundang dalam kelas belajar ini adalah sebagai berikut:

No	BUMdes/BUMkampung
1	Pengurus BUMkampung/ BUMkampung Sumber Agung
2	Pengurus BUMkampung/ BUMkampung Tembudan
3	Pengurus BUMkampung/ BUMkampung Batu Putih
4	Pengurus BUMkampung/ BUMkampung Biatan Ulu
5	Pengurus BUMkampung/ BUMkampung Teluk Sulaiman
6	Pengurus BUMkampung/ BUMkampung Biduk-Biduk
7	Pengurus BUMkampung/ BUMkampung Maluang
8	Pengurus BUMkampung/ BUMkampung Melati Jaya
9	Pengurus BUMkampung/ BUMkampung Merasa
10	Pengurus BUMkampung/ BUMkampung Merabu
11	Pengurus BUMkampung/ BUMkampung Long Duhung
12	Pengurus BUMkampung/ BUMkampung Payung-Payung
13	Pengurus BUMkampung/ BUMkampung Tanjung Batu
14	Pengurus BUMkampung/ BUMkampung Gurimbang
15	Pengurus BUMkampung/ BUMkampung Pegat Bukur
16	Pengurus BUMkampung/ BUMkampung Long Lanuk
17	Pengurus BUMkampung/ BUMkampung Suaran
18	Pengurus BUMkampung/ BUMkampung Talisayan
19	Pengurus BUMkampung/ BUMkampung Tunggal Bumi
20	Pengurus BUMkampung/ BUMkampung Labanan Makmur
21	Pengurus BUMkampung/ BUMkampung Labanan Makarti
22	Pengurus BUMkampung/ BUMkampung Pegat Batumbuk
23	Pengurus BUMkampung/ BUMkampung Campursari
24	Pengurus BUMkampung/ BUMkampung Sido Bangen

Dalam pelaksanaan kelas belajar BUMK ini terdapat beberapa peserta yang tidak hadir mengikuti pelatihan. Berikut ini merupakan list dari peserta yang tidak hadir di kelas belajar secara penuh:

No	BUMK	Keterangan
1	BUMdes/BUMkampung Merabu	Tidak hadir di kelas belajar
2	BUMdes/BUMkampung Batu Putih	Tidak mengikuti kelas belajar di hari ke-2
3	BUMdes/BUMkampung Biatan Ulu	Tidak mengikuti kelas belajar di hari ke-2
4	BUMdes/BUMkampung Biduk-Biduk	Tidak mengikuti kelas belajar di hari ke-2
5	BUMdes/BUMkampung Payung-Payung	Tidak mengikuti kelas belajar di hari ke-2
6	BUMdes/BUMkampung Suaran	Tidak mengikuti kelas belajar di hari ke-2
7	BUMdes/BUMkampung Tunggal Bumi	Tidak mengikuti kelas belajar di hari ke-2
8	BUMdes/BUMkampung Labanan Makmur	Tidak hadir di kelas belajar

BUMK Merabu tidak menghadiri kelas belajar dikarenakan terdapat kegiatan lain yaitu kunjungan dari Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Berau. BUMK Batu Putih yang kondisinya masih vakum, di hari pertama diwakili oleh Faskam Batu Putih, namun di hari kedua faskam Batu Putih mengikuti kelas Pemkam sehingga tidak ada yang mewakili Kampung Batu Putih di kelas belajar BUMK. BUMK Payung-payung yang di hari pertama juga diwakili oleh faskam SIGAP tidak hadir di hari kedua, dikarenakan terdapat kegiatan

lain yang harus diikuti faskam SIGAP Payung-payung. Sementara untuk BUMK Biatan Ulu, Biduk-biduk, dan Suaran yang sebelumnya terdapat perwakilan yang hadir di hari pertama, di hari kedua tidak ada keterangan terkait ketidakhadiran perwakilan-perwakilan tersebut. BUMK Labanan Makmur yang sedang dalam proses pembentukan pengurus baru, tidak ada perwakilan yang menghadiri kelas BUMK tanpa ada keterangan.

#### 4.2.4 Proses Pelatihan

##### **Materi 1 Filosofi BUM Kampung/ Transformasi BUM Kampung Pasca PP. 11**

Keberadaan BUMDes di samping pendiriannya untuk memenuhi amanat Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 4 Tahun 2015 tentang pendirian, Pengurusan, dan pengelolaan dan pembubaran Badan usaha Milik Desa, dimana peraturan tersebut menunjukkan bahwa pendirian BUMDes bertujuan untuk; 1). Meningkatkan perekonomian desa; 2). Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa; 3). Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa; 4). Mengembangkan kerjasama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga; 5). Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga; 6). Membuka lapangan kerja; 7). Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa; dan 8). Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.

Bumdes yang produktif terbukti mampu menjadi salah satu tiang penyangga kemandirian ekonomi desa. Genetika bumdes terbilang unik: memberikan benefit pada masyarakat di satu sisi, serta menghasilkan profit di sisi lain. Perspektif untuk melihat kebermanfaatannya Bumdes dapat dilihat dari 3 kacamata, yaitu Perspektif Ekonomi, Perspektif Sosial, dan Perspektif Politik.

Pertama, Perspektif ekonomi, sebagai badan usaha Bumdes yang dikelola secara efektif dan efisien dapat menghasilkan profit sehingga dapat memberikan penghasilan bagi warga desa serta memberikan sumbangsih bagi pendapatan asli desa. Dilihat dari perspektif ekonomi, BUMDes meruakan badan usaha, sebuah instuti bisnis, yang karenanya entrepreneurship bisa digunakan sebagai basis anaiisis dalam memahami perilaku BUMDes dalam menjalankan usahanya.

Kedua, Perspektif sosial, Bumdes dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat luas melalui unit-unit usaha yang mengatasi permasalahan sosial seperti pengolahan sampah, dll. Pelembagaan bumdes pada akhirnya juga membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat desa serta menciptakan perputaran ekonomi baru melalui aktivitas ekonomi yang dipelopori Bumdes.

Perspektif ekonomi menjadikan profit sebagai ukuran keberhasilan BUMDesa, sedangkan perspektif sosial menjadikan benefit sebagai ukuran keberhasilannya. Tampak dua hal yang kontradiktif tetapi penekatan yang mempertemukan keduanya adalah socio entrepreneurship atau kewirausahaan sosial. Keuntungan tetap diperlukan untuk memastikan keberlanjutan usaha sehingga dapat senantiasa memberikan manfaat bagi warga desa maupun pemerintah desa.

Ketiga, Perspektif politik, Bumdes merupakan wujud perpanjangan tangan dari pemerintah desa guna membangun kemandirian desa. Bumdes merupakan langkah menghadirkan layanan negara sampai ke level desa dalam rangka mengurangi pengangguran dan kemiskinan di desa. Kesimpulannya adalah Bumdes merupakan perwujudan nyata demokratisasi ekonomi local tingkat desa. Masyarakat desa menjadi pemilik langsung tas usaha yang dimiliki BUMdesa.

## **Materi 2 Menemukan Peluang Usaha**

Pada materi kedua ini membahas terkait menemukan peluang usaha yang akan dijalankan BUM Kampung. Materi tentang menemukan peluang usaha sangatlah perlu untuk BUM Kampung yang baru saja berdiri atau BUM Kampung yang akan menambah unit usahanya. Dalam materi ini memaparkan dalam menemukan peluang usaha, coba bapak/ibu semua menuliskan sebanyak-banyaknya apa saja yang sekiranya bisa di buat usaha, setelah semuanya dituangkan dalam tulisan, list-list rencana usaha tersebut dilihat menggunakan empat aspek yaitu Legal, Pasar, Passion, dan Bisnis.

Dari sekian banyak list yang sudah dituliskan tadi kita lihat satu per satu dengan menggunakan 4 aspek diatas. Setelah itu dari sekian banyaknya yang sudah di list, diambil 3 peluang usaha yang mencakup 4 aspek tersebut. Setelah menyisakan 3 peluang usaha tersebut, ketiga peluang usaha tersebut di lihat kembali terkait pasar, passion, dan bisnis serta dibandingkan dengan ke 3 peluang usaha, lalu diambil 2 peluang usaha. Setelah tersisa 2 peluang usaha, kita lihat dengan menggunakan metode analisis SWOT. Dalam metode analisis SWOT ini kita akan melihat terkait Kekuatan peluang usaha ini seberapa, kelemahan peluang usaha ini apa, melihat peluang usaha itu sendiri kira-kira ada atau tidak peluang dalam menjalankan usaha tersebut, dan melihat ancaman peluang usaha tersebut apa saja. Setelah menganalisis dengan SWOT, peluang usaha dari dua yang tersisa, kita bandingkan lagi terkait usaha yang akan dijalankan mulai kesiapan bahanbaku yang mencukupi atau tidak, potensi pasar, kompetitor ketika menjalankan usaha tersebut banyak atau tidak, dan melihat potensi teknologi pengolahannya support atau tidak.

Jika dari metode analisis SWOT perkiraan kelemahan, ancaman, sangat kecil dan potensi bahan baku, teknologi pengolahannya sudah sesuai dan mencukupi, maka peluang usaha tersebut layak untuk dijalankan BUM Kampung.

## **Materi 3 Perencanaan Usaha**

Dalam materi perencanaan usaha ini BUM Kampung harus benar-benar matang dalam merencanakan usahanya, karena akan berhubungan dengan kerugian bahkan BUM Kampung ditutup karena rugi terus menerus. BUM Kampung dalam menjalankan usaha harus benar-benar matang dalam perencanaanya, hal yang harus di lihat yaitu terkait pasar. Dalam membuka usaha jika tidak mendapat pasar akan sama saja dan usaha akan sia-sia tidak mendapatkan pemasukan. BUM Kampung dalam menjalankan usahanya harus merencanakan untuk kedepannya agar lebih berkembang dan maju, salah satu kunci dari perencanaan usaha dalam BUM Kampung yaitu terkait tentang value (Branding), bagaimana caranya hasil produksi bisa membuat daya tarik pasar. Branding adalah salah satu dari mencari pasar, bisa juga dalam pembrandingan mengaitkan filosofi Kampung kearifan kampung. Akan lebih kuat dalam proses pemasaran.

#### Materi 4 Kalkulasi Resiko

Materi setelah menuliskan impian-impian BUM kampung kedepan, fasilitator memaparkan terkait menemukan unit usaha, fasilitator memaparkan dengan jelas dan peserta khuyuk dalam mendngarkan, lalu tahap selanjutnya peserta harus mengerjakan analisa kelayakan usaha BUM kampung yang sudah berjalan maupun perencanaan usaha yang akan dijalankan BUM kampung, karena analisa kelayakan usaha cukup penting dalam melihat visibel atau tidaknya unit usaha tersebut. Lalu peserta mengerjakan dengan sungguh-sungguh dan fasilitator ikut mendampingi. Setelah peserta selesai mengerjakan, fasilitator bertanya kepada peserta bagaimana analisa kelayakan usaha bapak/ibu semua.

Hal yang paling utama terkait analisa kelayakan usaha yaitu memahami isi, maksud, dan tujuannya. Peserta dari kampung tembudan bertanya “untuk investasi di KK02 itu nanti kebutuhan yang akan dibeli untuk menunjang peningkatan BUM Kampung?”

Jawab “jadi di KK02 terebut adalah rencana untu investasi di tahun ini, dan untuk memajukan usaha BUM Kampung dari yang mendapatkan hasil pas-pasan setelah menambah investasi jadi pendapatan meningkat”

Peserta dari Kampung Merasa dengan kepercayaan dirinya mempresentasikan terkait hasil analisa kelayakan usahanya walaupun hasilnya minus (-). Namun yang diharapkan kami adalah peserta mampu memahami terkait analisa kelayakan usahanya, agar dapat memperhitungan di tahun depan, dan mencari strategi agar usaha yang di jalanka BUM kampungnya bisa ebih maju dan berkembang hingga menghasilkan PAD dan banyak mitra dari luar kampung yang mengajak bekerja sama.



Gambar 15 Kelas Belajar 1 Tata kelola BUMK

Pada ujung kelas belajar 1 terkait tata kelola BUM kampung yaitu menghasilkan RTL (Rencana Tindak Lanjut) yang harus segera di kejar dan di lakukan, yaitu :

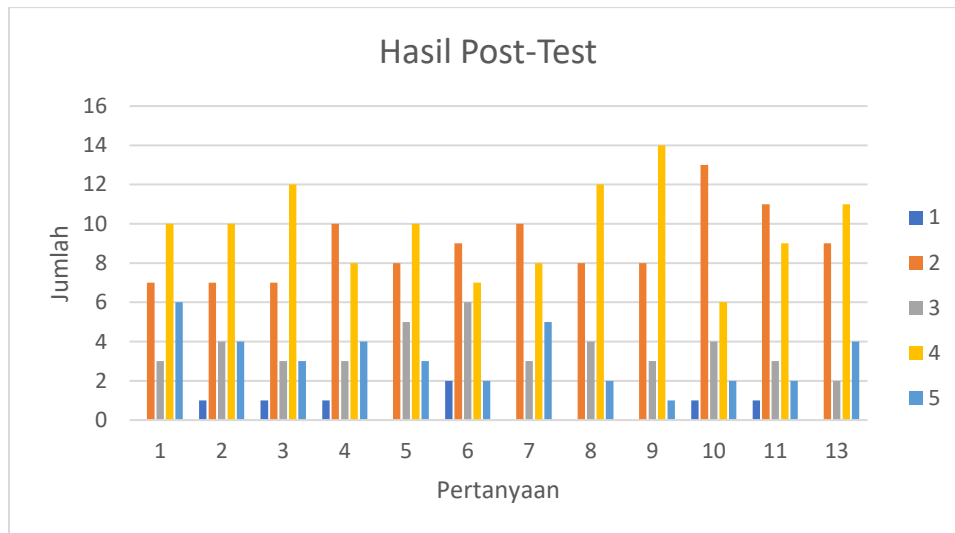
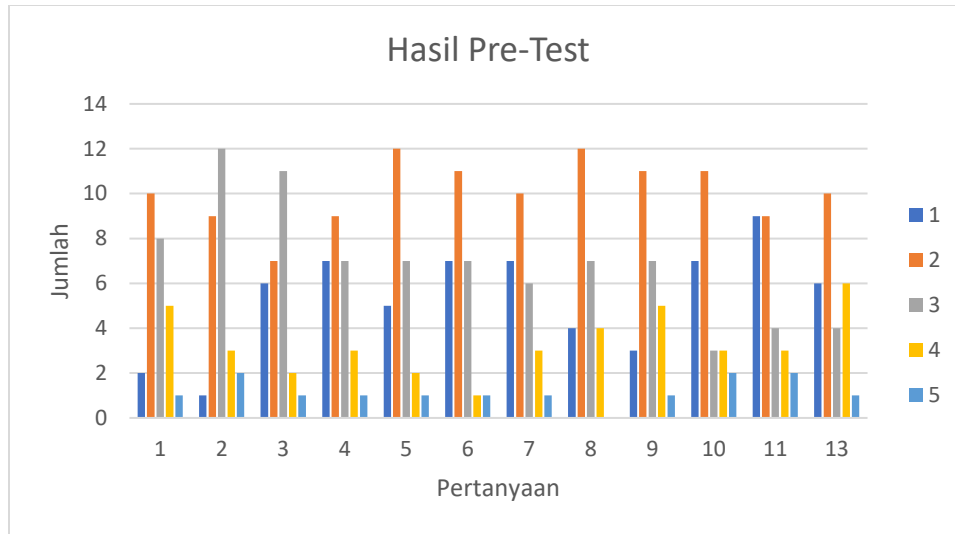
1. Pengurus BUM kampung harus menguasai Tools Rencana Bisnis
2. Memastikan pengurus BUM kampung sudah proses Drafting terkait dokumen persyaratan legalitas (AD/ART,Proker,BA) sesuai format yang sudah di upload di drive.

#### 4.2.5 Pre-test dan Post-Test

Pre-test dan Post-test yang dilakukan dalam kelas belajar BUMK dilakukan dengan menyebarkan kuisioner daring kepada para peserta. Pre-tes dan post-test ini mencoba merekam pemahaman peserta tentang berbagai macam poin sebagai berikut,

1. Bagaimana pemahaman anda tentang filosofi pengelolaan BUMK?
2. Bagaimana pemahaman anda tentang cara membaca potensi di kampung, kemudian menghubungkannya dalam peluang pasar?
3. Bagaimana pemahaman anda dalam menghitung kebutuhan investasi usaha yang akan dijalankan/ untuk mengembangkan usaha BUMK?
4. Bagaimana kemampuan anda untuk menghitung perkiraan laba/rugi atas usaha yang dilakukan BUMK?
5. Bagaimana pemahaman anda tentang mekanisme penyusunan rencana kerja BUMK?
6. Bagaimana pemahaman anda tentang pengaturan tata kelembagaan BUMK paska diterbitkannya PP.11 Tahun 2021 ?
7. Bagaimana pemahaman anda tentang mekanisme penyusunan Perdes, AD dan ART BUMK?
8. Bagaimana pemahaman anda tentang pembagian tanggung jawab beserta hak Pembina, Penasehat, dan Pelaksana Operasional BUMK ?
9. Bagaimana pemahaman anda tentang mekanisme perekrutan Direktur, Sekretaris, dan Bendahara BUMK?
10. Bagaimana pemahaman anda tentang tata cara pendaftaran sertifikasi BUMK?
11. Bagaimana pemahaman anda tentang penyusunan dokumen - dokumen syarat administratif dalam pendaftaran sertifikasi BUMK?
12. Bilamana ada kesulitan dalam penyusunan syarat administratif pendaftaran badan hukum (sertifikasi) BUMK, dokumen apakah itu?
13. Bagaimana pemahaman anda tentang pengelolaan keuangan di BUMK saat ini? Mulai dari penganggaran, pencatatan, hingga pelaporan.

Dalam pengisian ini terdapat perbedaan jumlah antara yang mengisi pretest dan posttest, hal ini berkaitan dengan kehadiran peserta yang berbeda antara hari pertama dan kedua. Terdapat 27 peserta yang mengisi pretest dan 25 peserta yang mengisi posttest. Berikut ini merupakan grafik hasil pretest dan posttest kelas belajar pemerintah kampung,



Dari hasil pre-test dan post-test yang dilakukan, terlihat perubahan pemahaman yang cukup signifikan dari setiap poin yang ditanyakan. Untuk pertanyaan nomor 12 terkait hambatan yang dialami BUMK untuk pengurusan sertifikasi badan hukum, terdapat 6 BUMK yang tidak mengalami kesulitan. Sementara mayoritas BUMK kesulitan dalam penyusunan AD/ART dan Program Kerja.

### 4.3 KELAS BELAJAR 2

Di kelas Belajar 1 Tata Kelola BUMK lebih difokuskan untuk membahas terkait perencanaan usaha dan transformasi BUMK sesuai dengan PP. 11 tahun 2021. Untuk kelas belajar 2 tata kelola BUMK ini lebih fokus mengulas terkait tata kelola keuangan. Transparansi dan akuntabilitas pengelola keuangan adalah isu kunci dalam profesionalisme pengelolaan keuangan BUMK. Standarisasi tata kelola keuangan coba dilakukan dengan pendekatan aplikasi keuangan BUMK yang berbasis excel. Aplikasi keuangan ini sudah disesuaikan dengan format Permendes no. 3 tahun 2021. Harapannya dengan adanya aplikasi ini, memudahkan BUMK dalam menjalankan tata kelola keuangan.

Pelaksanaan kelas belajar 2 tata kelola BUMK ini dilakukan seperti kelas tata kelola Pemerintah Kampung yaitu dibagi menjadi 2 kluster kelas, kelas tanjung redeb dan kelas pesisir selatan. Berikut ini merupakan waktu dan tempat pelaksanaan kedua kluster kelas tersebut,

**Kelas Tanjung Redeb**

Hari, Tanggal : Kamis-Jum'at, 2-3 Juni 2022  
 Tempat : Hotel Grand Parama, Tanjung Redeb

**Kelas Pesisir Selatan**

Hari, Tanggal : Senin-Selasa, 6-7 Juni 2022  
 Tempat : Ruang Kelas SDN 001 Talisayan

**4.3.1 Lingkup Pembahasan**

No	Materi	Sub-Materi	Output
1	Pengantar Pengelolaan Keuangan BUMK	Pengertian Akuntansi	1. Peserta dapat memahami pentingnya laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemilik modal (Kampung) 2. Peserta Memahami dasar-dasar Akuntansi sebagai alat untuk melakukan pencatatan dan pelaporan sesuai dengan standar Akuntansi Umum yang Berlaku
		Pentingnya Keuangan bagi BUMK	
		Logika dan Persamaan Akuntansi	
		Alur Keuangan BUMK	
		Tugas dan Fungsi Manajer/staff Keuangan	
2	Pengenalan Aplikasi Pencatatan dan Pelaporan BUMK Berbasis Excel	Pengantar Aplikasi Keuangan	Peserta dapat Memahami Cara Kerja Aplikasi Keuangan BUMK Berbasis Excel untuk digunakan sebagai alat pencatatan dan pelaporan keuangan
		Format Laporan Keuangan BUMK Sesuai dengan Permendes No 3 Tahun 2021	
		Pengenalan Akun-akun serta Kode Akun yang ada dalam Aplikasi Keuangan BUMK	
		Identifikasi Bisnis BUMK sesuai dengan Jenis Laporan Keuangan	
		Set Up Database di Masing-masing BUMK	
3	Pencatatan Transaksi dan Pelaporan Keuangan	Mengidentifikasi Transaksi Keuangan yang Terjadi dalam Satu Minggu Terakhir	Peserta dapat melakukan pencatatan transaksi keuangan ke dalam Aplikasi Keuangan BUMK dengan benar
		Melakukan Pencatatan ke dalam Aplikasi Keuangan BUMK	
		Memastikan Transaksi Keuangan Masuk Ke dalam Masing-masing Laporan Keuangan yang Sesuai	

4	Evaluasi Kinerja Keuangan	Cara Membaca Laporan Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peserta mampu melihat kinerja BUMK berdasarkan Laporan Keuangan yang sudah ada</li> <li>2. Peserta mampu menyimpulkan Kondisi-kondisi BUMK berdasarkan analisa yang dilakukan terhadap laporan keuangan</li> <li>3. Peserta mampu membuat analisa keuangan</li> <li>4. Peserta dapat merekomendasikan kebijakan-kebijakan yang berdasar pada kondisi Keuangan BUMK</li> </ol>
		Membuat Rasio Keuangan yang Dibutuhkan	
		Mengambil Kesimpulan Kinerja BUMK dari Laporan Keuangan	
		Pengambilan Kebijakan	

#### 4.3.2 Fasilitator

Fasilitator Kelas Tata Kelola BUMK	
Ahmad Arief Rohman	Direktur BUMDes Panggung Lestari Panggunharjo
Donie Umbara	Pengembang Sistem Aplikasi Keuangan BUMDes

#### 4.3.3 Peserta

Kelas Tanjung Redeb							
1	Pegat Bukur	5	Tanjung Batu	9	Sido bangen	13	Long duhung
2	Maluang	6	Pegat batumbuk	10	Merabu	14	Gurimbang
3	Melati Jaya	7	Long Lanuk	11	Labanan makmur	15	Suaran
4	Payung-Payung	8	Merasa	12	Labanan makarti		
Kelas Pesisir Selatan							
1	Biatan Ulu	4	Campur Sari	7	Biduk-Biduk		
2	Talisayan	5	Sumber Agung	8	Teluk Sulaiman		
3	Tunggal Bumi	6	Tembudan	9	Batu Putih		

Terkait peserta yang mengikuti Kelas Belajar 2 ini, untuk kelas tanjung redeb, di hari pertama kelas diikuti oleh 34 peserta. Sementara di hari kedua kelas diikuti oleh 43 peserta. Dari seluruh peserta yang diundang di kelas tanjung redeb, sebanyak dua kampung tidak menghadiri undangan. Dua kampung tersebut adalah Long Lanuk dan Long Duhung.

Sementara untuk kelas pesisir selatan, hari pertama diikuti oleh 20 peserta. Sementara di hari kedua kelas diikuti oleh 23 peserta. Untuk keikutsertaan dari kampung, hanya Kampung Tunggal Bumi yang tidak menghadiri undangan.

#### 4.3.4 Proses Pelatihan

Dalam kelas belajar untuk tata kelola BUMK ini, sistematisa pelatihan diawali dengan materi teori pengantar pengelolaan keuangan BUMK. Kemudian materi dilanjutkan dengan pengenalan aplikasi keuangan yang digunakan. Dan praktik langsung penggunaan aplikasi tersebut.



Gambar 16 Peran Laporan Keuangan BUMK

## Pengantar Pengelolaan Keuangan BUMK

Materi diawali dengan memberikan pemaparan terkait pengertian akuntansi BUMK. Akuntansi BUMK sendiri adalah alat yang digunakan untuk memberikan informasi kondisi keuangan BUMK kepada pemerintah desa, masyarakat desa, dan pihak-pihak yang berkaitan dengan BUMK sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pengurus BUMK. Akuntansi BUMK ini juga digunakan untuk menunjukkan akuntabilitas dan transparansi keuangan BUMK. Selain itu akuntansi BUMK juga digunakan untuk dasar pengambilan keputusan dan perencanaan bisnis kedepan agar perencanaan tersebut dapat didasarkan pada data kondisi keuangan BUMK. Akuntansi BUMK yang merupakan alat yang memberikan informasi kondisi keuangan BUMK tersebut terwujud dalam sebuah laporan keuangan.

Peran laporan keuangan BUMK sendiri di ranah akuntabilitas adalah untuk Mempertanggungjelaskan kepada pemilik modal sebagai dasar tanggungjawab atas modal yang sudah diserahkan kepada BUMK. Di ranah manajemen laporan keuangan memudahkan fungsi perencanaan, prngelolaan, dan pengendalian atas aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemilik modal. Di ranah transparansi, memberikan informasi yang terbuka, jujur, dan menyeluruh kepada para pemilik modal dan pihak yang berkepentingan. Dan dalam hal evaluasi kinerja, laporan keuangan berguna untuk mengevaluasi kinerja BUMK, terutama dalam menggunakan sumber daya ekonomi.



Gambar 17 Logika Dasar Akuntansi

Materi pengantar ini juga menjelaskan terkait logika dan persamaan dasar akuntansi. Dalam akuntansi dikenal istilah *balance* atau seimbang ketika aset sama dengan hutang ditambah modal.

Aset adalah kekayaan yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh BUMK baik berwujud maupun tidak berwujud guna mendapatkan manfaat di masa mendatang (untuk menghasilkan pendapatan). Aset BUMK dapat berasal dari penyertaan modal, bantuan tidak mengikat (hibah), hasil usaha, pinjaman, dan sumber lain yang sah. Aset sendiri terdiri dari aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar adalah aset yang masa penggunaannya hanya dalam jangka waktu yang singkat. Masa pakai aset lancar yang umum adalah

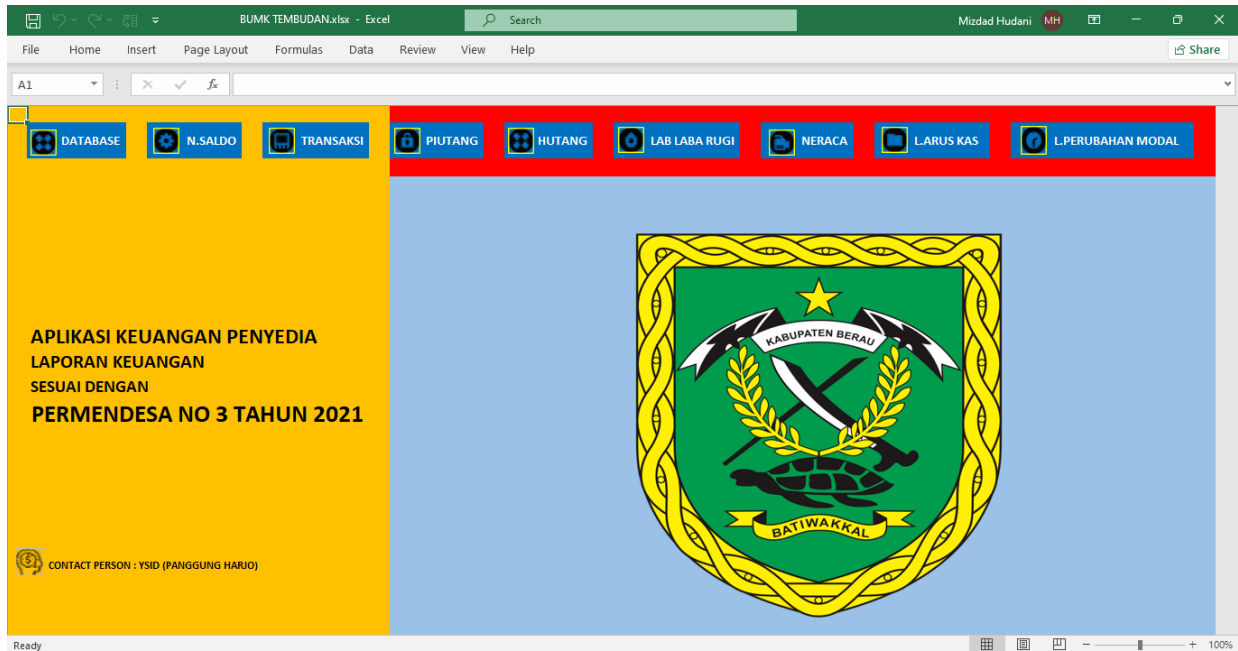
kurang dari satu tahun. Aset lancar umumnya terdiri dari kas, sekuritas, piutang, persediaan, pembayaran di muka, dan pendapatan. Sementara aset tidak lancar adalah aset yang memberikan manfaat secara ekonomi kepada perusahaan dalam jangka panjang. Periode waktu perolehan manfaat ini umumnya lebih dari satu tahun. Segala jenis aset yang tidak termasuk ke dalam aset lancar oleh entitas merupakan aset tidak lancar.

Hutang adalah kewajiban yang dimiliki oleh BUMK atas perjanjian yang dilakukan di masa lalu dan kewajiban tersebut harus dipenuhi dalam bentuk penyerahan jasa dan/atau aset sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak yang terkait. Hutang sendiri terdiri dari hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang. Modal adalah kekayaan yang dimiliki oleh pemerintah kampung yang diserahkan kepada BUMK untuk dikelola dan dimanfaatkan demi kepentingan BUMK dalam menjalankan usahanya. Modal BUMK terdiri dari penyertaan modal oleh pemerintah kampung, utang direksi maupun kontribusi masyarakat kampung, dan saldo sisa hasil usaha kumulatif. Komponen dari modal adalah pendapatan dan biaya.



Gambar 18 Alur Tata Kelola Keuangan BUMK

Gambar di atas merupakan alur tata kelola keuangan yang dijalankan pengurus BUMK. Dengan menggunakan aplikasi keuangan, pekerjaan terkait tata kelola keuangan hanya akan sampai pada pencatatan transaksi. Selanjutnya terkait neraca saldo hingga laporan keuangan akan otomatis diperoleh. Dalam identifikasi transaksi, pengurus BUMK mengidentifikasi transaksi apa saja yang dilakukan oleh BUMK. Selanjutnya jika transaksi sudah teridentifikasi, dilakukan analisis terhadap transaksi tersebut. Analisis ini berkaitan aset up akun transaksi.



Gambar 19 Aplikasi Keuangan BUMK

## Teori dan Praktik Aplikasi Keuangan BUMK

Data Hutang	Data Piutang	Tipe	REF
Rusti		usaha	Apabila pada akhir periode pelaporan dilakukan Kode yang digunakan adalah
Bahar		usaha	"JP-kemudian beberapa angka secara berurutan"
Omben		usaha	maka dibutuhkan PENYUSUNAN atas berkurangnya atau bertambahnya aset tersebut.
Armanyah		usaha	benyusulan atas semua aset dilakukan stock opname
Darmawi		usaha	
Atong		usaha	
Cipto		usaha	
Anca		usaha	
			<b>Kd.Trx</b>
			Apabila anda menggunakan daftar piutang atau nasabah maka WAJIB untuk menuliskan Kd.Trx adapun petunjuk penulisiannya adalah sebagai berikut: "P-kemudian beberapa angka secara berurutan"

Gambar 20 Database Aplikasi Keuangan BUMK

Pada materi ini peserta terlebih dahulu diberikan pengantar terkait cara pengisian aplikasi keuangan BUMK. Dalam menggunakan aplikasi ini secara berurutan pengguna mengisi database yang berisikan data hutang dan piutang. Dalam pengisian data piutang perlu dimasukkan juga tipe atau jenis piutang.

Kemudian pengisian dilanjutkan ke neraca saldo. Neraca saldo merupakan salah satu bagian penting dalam tahap siklus akuntansi. Istilah ini digunakan untuk menyebut *trial balance*, yaitu suatu daftar yang menyediakan informasi keseluruhan data dari buku besar perusahaan, misalnya neraca saldo nomor akun, nama akun, debit, dan kredit pada periode tertentu. Saldo pada neraca harus seimbang, jika tidak hal tersebut menandakan adanya kesalahan antara jurnal dan neraca saldo. Dalam tahap ini neraca saldo yang diisikan berkaitan dengan modal awal. Neraca saldo ini disiapkan untuk menentukan apakah terdapat kesalahan dalam debit atau kredit yang diposting ke dalam buku

KODE AKUN	AKUN	DEBIT	KREDIT
1.0.00	ASSET		
1.1.00	ASSET LANCAR		
1.1.01	KAS		
1.1.01.01	Kas Besar		10,346,000
1.1.01.02	Petty Cash		
1.1.01.03	Depositi Tiket		
1.1.02	BANK		
1.1.02.01	Bank BRI		26,728,000
1.1.02.02	Kas Besar Bank		
1.1.03	PIUTANG		
1.1.03.01	Piutang Usaha		100,771,000
1.1.03.02	Piutang Jasa		
1.1.03.03	Piutang Karyawan		
1.1.04	PERSEDIAAN		
1.1.04.01	Perediaan Barang Dagang		
1.1.05	PERLENGKAPAN		
1.1.05.01	Perengkapan Kantor		
1.1.06	PAJAK DIBAYAR DI MUKA		
1.1.06.01	Pajak PPh Masukan		
1.1.06.02	Pajak Dibayar Dimuka Pph 023		
1.1.07	BIAYA DIBAYAR DI MUKA		
1.1.07.01	Uang Muka/Pinjaman Kepada Karyawan		
1.1.07.02	Uang Muka Pembelian		
1.1.07.03	Cash Advance		
1.1.07.04	Cashbon/Pinjaman		

Gambar 21 Neraca Saldo di Aplikasi Keuangan BUMK

besar. Neraca saldo ini akan memudahkan untuk menemukan kesalahan pencatatan dan membantu dalam mengaudit laporan keuangan.

Setelah Neraca Saldo terisi, pengisian dilanjutkan ke transaksi. Dalam akuntansi, transaksi dimaknai sebagai aktivitas bisnis apa pun yang berdampak langsung pada status finansial dan laporan keuangan bisnis Anda. Pencatatan setiap transaksi yang dilakukan oleh pengurus BUMK harus dicatat sehingga laporan posisi keuangan yang tersusun bersifat valid. Dalam pencatatan transaksi ini perlu diperhatikan terkait penggunaan akun dalam debit dan kredit. Kesalahan dalam mengisi hal tersebut berdampak pada data keuangan yang tidak *balance*.

**BUMK TELUK SULAIMAN**

Bank	0	Pembelian	2,728,000	Potongan Penjualan	0
Kas	100,507,000	MAATCH Ongkos Pembelian Barang Dagangan	0	Retur Penjualan	0
Piutang	27,675,000	Discount Pembelian	0	TAHUN	2022
Utang Usaha	0	Retur Pembelian	0		
Persediaan Barang Dagang	0	Penjualan	5,910,000		

Tanggal	Bulan	Tahun	KD TRX	Ref	Siklus	Keterangan	Jurnal		Piutang Baru	Pembayaran Piutang Usaha	Hutang	JUMLAH
							DEBIT	KREDIT				
10	Januari	2022				uang masuk Setoran Dari Pem Kampung	Kas Besar	Modal Disetor				5,550,000
15	Januari	2022				uang keluar pembelian barang dagang	Pembelian	Kas Besar				2,080,000
23	Januari	2022				uang keluar pembelian jaket pelampung	Pembelian	Kas Besar				178,000
31	Januari	2022				uang keluar pemasangan Listrik	Biaya Telepon Dan Internet	Kas Besar				100,000
31	Januari	2022				uang masuk memasukan uang distribusi kerjasama dengan asuransi	Kas Besar	Pendapatan Di Luar Usaha Lainnya				150,000
31	Januari	2022				uang masuk pendapatan dari kios sembako	Kas Besar	Penjualan				5,725,000
31	Januari	2022				uang masuk pembayaran iuran sewa rombongan	Kas Besar	Pendapatan Di Luar Usaha Lainnya				2,320,000
31	Januari	2022				uang masuk pendapatan dari titipan barang jualan waiga	Kas Besar	Pendapatan Di Luar Usaha Lainnya				120,000
31	Januari	2022				uang masuk iuran distribusi dari motoris	Kas Besar	Pendapatan Di Luar Usaha Lainnya				150,000
31	Januari	2022				uang masuk pembayaran iuran sewa pelampung	Kas Besar	Pendapatan Di Luar Usaha Lainnya				810,000
31	Januari	2022				uang keluar pembayaran gaji karyawan 2 orang	Biaya Gaji	Kas Besar				500,000
5	Februari	2022				uang keluar pembelian terpal tarub 2 pcs	Pembelian	Kas Besar				470,000
28	Februari	2022				uang masuk iuran distribusi dari motoris	Kas Besar	Pendapatan Di Luar Usaha Lainnya				400,000
28	Februari	2022				uang masuk memasukan uang distribusi kerjasama dengan asuransi	Kas Besar	Pendapatan Di Luar Usaha Lainnya				390,000
28	Februari	2022				uang masuk pembayaran iuran sewa rombongan	Kas Besar	Pendapatan Di Luar Usaha Lainnya				200,000
28	Februari	2022				uang masuk pendapatan dari kios sembako	Kas Besar	Penjualan				185,000
28	Februari	2022				uang masuk pendapatan dari titipan barang jualan warga	Kas Besar	Pendapatan Di Luar Usaha Lainnya				155,000
28	Februari	2022				uang keluar pembayaran gaji karyawan	Biaya Gaji	Kas Besar				295,000
28	Februari	2022	P-001			uang keluar utang jaket pelampung pak rusli	Piutang Usaha	Kas Besar	Rusli			100,000
28	Februari	2022	P-002			uang keluar utang jaket pelampung pak bahar	Piutang Usaha	Kas Besar	Bahar			1,120,000

Gambar 22 Catatan Transaksi dalam Aplikasi Keuangan BUMK

Pada Gambar 19 Aplikasi Keuangan BUMK dapat dilihat setelah menu transaksi terdapat menu-menu lainnya seperti Piutang, Hutang, Laba Rugi, Neraca, Arus Kas, dan Laporan Perubahan Modal. Menu-menu tersebut akan otomatis ter-*generate* ketika pengguna aplikasi sudah sampai ditahap pengisian transaksi. Berikut ini merupakan gambar dari setiap menu tersebut.

**BUMK TELUK SULAIMAN**

Utang Usaha: 0

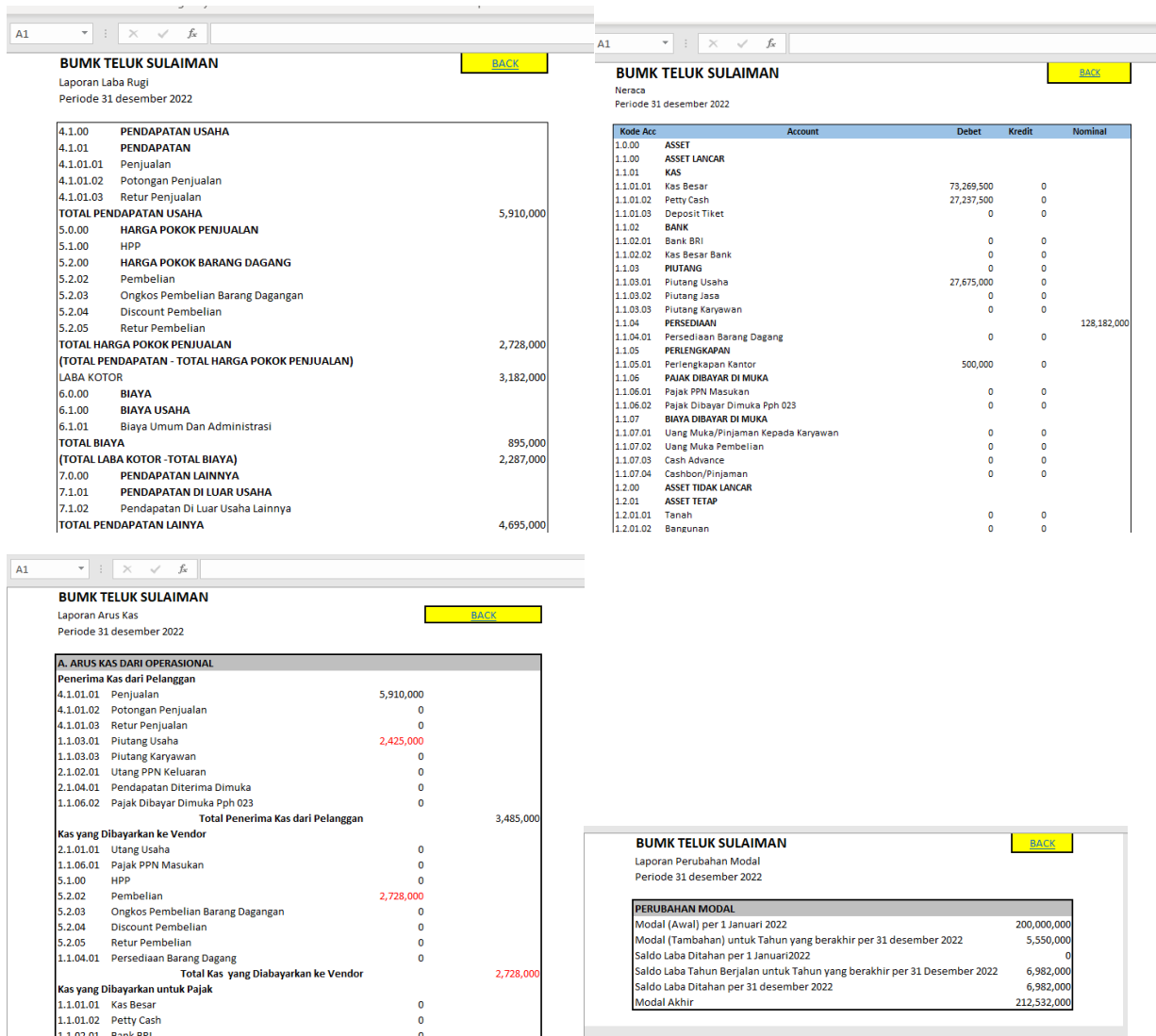
TOTAL UTANG: 0

SISA HUTANG: 0

Piutang Usaha: 1 Rusli, 155,000, Sisa Piutang: 2,425,000

Total Piutang Usaha: 2,680,000

No	Tanggal	Kd Trx	Nama PU	Piutang PU Bayar	Jumlah PU	Pbyran PU	Sisa PU	Info
1	28-2-2022	P-001	Rusli	1 Rusli	100,000	255,000	155,000	BELUM
2	28-2-2022	P-002	Bahar	2 Bahar	1,120,000	0	1,120,000	BELUM
3	28-2-2022	P-003	Omben	3 Omben	910,000	0	910,000	BELUM
4	28-2-2022	P-004	Armansyah	4 Armansyah	105,000	0	105,000	BELUM
5	28-2-2022	P-005	Darmawi	5 Darmawi	165,000	0	165,000	BELUM
6	28-2-2022	P-006	Atong	6 Atong	100,000	0	100,000	BELUM
7	28-2-2022	P-008	Anca	7 Anca	115,000	0	115,000	BELUM
8	28-2-2022	P-007	Cipto	8 Cipto	65,000	0	65,000	BELUM



Gambar 23 Menu-menu dalam Aplikasi Keuangan BUMK

Dalam pelatihan ini setelah pemaparan terkait teknis pengisian aplikasi disampaikan, peserta terlebih dahulu diminta untuk berkelompok sesuai dengan kampungnya masing-masing. Kemudian setiap kelompok diminta mengidentifikasi transaksinya masing-masing selama satu minggu. Setelah itu dilakukan analisis terhadap setiap transaksi yang sudah teridentifikasi. Analisis yang dilakukan dalam hal ini adalah menyesuaikan jenis transaksi ke akun yang sudah disiapkan di aplikasi. Setelah semua transaksi sudah diketahui jenis akunnnya, proses dilanjutkan dengan mulai menginput data di aplikasi, sesuai dengan yang dijelaskan dari database hingga pencatatan transaksi. Setelah semua peserta menginputkan transaksinya, fasilitator mereview pekerjaan peserta. Dalam hal ini kesalahan yang umum terjadi adalah ketika menganalisis jenis transaksi dan memasukkan debit-kredit dalam transaksi.

#### 4.3.5 Pre-test dan Post-Test



Gambar 24 Kelas Tata Kelola BUMK

Pretest dan Posttest dilakukan dengan menyebarkan kuisioner daring kepada para peserta. Poin-poin yang ditanyakan dalam pretest maupun posttest terkait soal laporan apa saja yang selama ini sudah pernah dibuat, pemahaman terkait tujuan pengelolaan keuangan, pemahaman terkait alur pencatatan dan pelaporan keuangan BUMK, pemahaman terkait prinsip persamaan akuntansi, dan pemahaman terkait aplikasi keuangan BUMK.

Pada pertanyaan pretest terkait pemahaman terhadap tujuan pengelolaan keuangan hanya tiga orang yang menjawab tidak paham. Ketika

pertanyaan yang sama ditanyakan pada posttest hanya ada satu peserta yang mengisi tidak paham dan satu peserta mengisi sangat paham. Pada pertanyaan pretest terkait pemahaman terhadap alur pencatatan dan pelaporan keuangan BUMK, delapan peserta menjawab tidak paham. Sementara untuk pertanyaan yang sama dalam posttest, hanya lima peserta yang menjawab tidak paham, dan terdapat satu peserta menjawab sangat paham. Namun ketika ditanyakan terkait alur pencatatan dan pelaporan yang pertama dilakukan, 18 peserta menjawabnya dengan tidak tepat.

Pertanyaan berikut terkait pemahaman terhadap prinsip persamaan akuntansi, pada pretest tujuh peserta menjawab tidak paham. Sementara pada posttest hanya satu peserta yang mengisi tidak paham. Namun ketika terdapat pertanyaan terkait persamaan akuntansi tersebut, empat peserta menjawab dengan tidak tepat. Pertanyaan terakhir terkait pemahaman terhadap aplikasi keuangan, terdapat lima peserta yang menjawab tidak paham.

#### 4.4 PROSES PENDAMPINGAN DAN CAPAIAN

Dalam pendampingan terhadap BUMK ini, proses pendampingan dibagi menjadi 2 tahapan. Tahap pertama dilakukan pasca kelas belajar 1. Pada tahap ini pendampingan lebih difokuskan pada mendorong BUMK menyelesaikan pengajuan sertifikat badan hukum. Berikut ini merupakan data pengajuan badan hukum BUMK.

Tabel 4 Proses Pengajuan Sertifikat Badan Hukum BUMK

No	Nama Kampung	Status Pengajuan Badan Hukum	Proses Berkas Pengajuan
1	Pegat Bukur	Sudah bersertifikat badan hukum	-
2	Labanan makarti	Sudah bersertifikat badan hukum	-
3	Pegat batumbuk	Sudah bersertifikat badan hukum	-
4	Tembudan	Sudah bersertifikat badan hukum	-
5	Tanjung Batu	Nama Terverifikasi	Revisi AD dan ART
6	Melati Jaya	Nama Terverifikasi	Revisi seluruh dokumen
7	Long Lanuk	Nama Terverifikasi	Belum mengajukan berkas

8	Merasa	Nama Terverifikasi	Revisi seluruh dokumen
9	Sido bengen	Nama Terverifikasi	Belum mengajukan berkas
10	Merabu	Belum mengajukan nama	-
11	Teluk Sulaiman	Nama terverifikasi	Belum mengajukan berkas
12	Maluang	Nama terverifikasi	Belum mengajukan berkas
13	Long duhung	Nama terverifikasi	Belum mengajukan berkas
14	Gurimbang	Nama terverifikasi	Belum mengajukan berkas
15	Suaran	Nama terverifikasi	Belum mengajukan berkas
16	Biatan Ulu	Nama terverifikasi	Belum mengajukan berkas
17	Talisayan	Nama terverifikasi	Belum mengajukan berkas
18	Tunggal Bumi	Nama terverifikasi	Belum mengajukan berkas
19	Campur Sari	Nama terverifikasi	Belum mengajukan berkas
20	Sumber Agung	Nama terverifikasi	Belum mengajukan berkas
21	Biduk-biduk	Nama terverifikasi	Belum mengajukan berkas
22	Payung-Payung	<i>Pengurus BUMK baru dibentuk lagi pada bulan juli</i>	
23	Labanan Makmur	<i>BUMK vakum</i>	
24	Batu Putih	<i>BUMK vakum</i>	

Kendala umum pada tahap pendampingan ini adalah kurang responsifnya pengurus BUMK ketika dilakukan pendampingan. Dalam hal ini kami menempatkan diri sebagai fasilitator, artinya kami menghindari pengerjaan berkas-berkas dokumen yang diperlukan untuk pengajuan sertifikat badan hukum. Maka dalam hal ini respon aktif dari pengurus BUMK dibutuhkan. Proses ini dilakukan untuk menjaga keterlibatan aktif pengurus BUMK dalam menyusun dokumen-dokumen yang nantinya akan menjadi pedoman gerak langkah BUMK. Dalam tahap pendampingan ini selain dilakukan *follow up* melalui telepon, juga dilakukan *follow up* dengan mendatangi BUMK secara langsung.



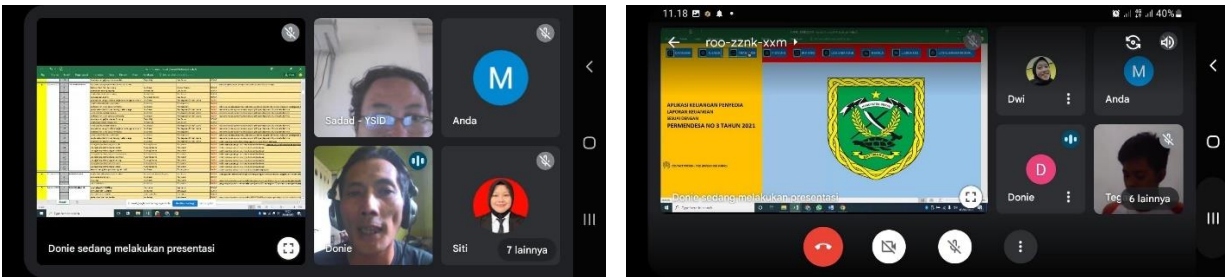
Gambar 25 Pendampingan BUMK Merabu dan BUMK Melati Jaya

Tahapan pendampingan selanjutnya dilakukan setelah kelas belajar 2. Pada tahap pendampingan ini fokus utamanya adalah terkait tata kelola keuangan BUMK. Materi terkait tata kelola keuangan yang sudah disampaikan di kelas coba di-*follow up* lagi. Para pengurus BUMK di dorong untuk menggunakan aplikasi keuangan tersebut, cukup dengan melanjutkan pengisian transaksi yang sudah diisi pada kelas belajar. Untuk pengurus BUMK yang melakukan hal tersebut, dilakukan kelas lanjutan untuk pematangan penggunaan aplikasi keuangan tersebut. Berikut ini merupakan daftar BUMK yang menggunakan aplikasi keuangan setelah kelas belajar 2.

Tabel 5 Daftar BUMK Pengguna Aplikasi Keuangan BUMK YSID

NO	BUMK	NO	BUMK
1	BUMK Tembudan	6	BUMK Labanan Jaya
2	BUMK Tunggal Bumi	7	BUMK Melati Jaya
3	BUMK Teluk Sulaiman	8	BUMK Talisayan
4	BUMK Suaran	9	BUMK Campursari
5	BUMK Biatan Ulu	10	BUMK Pegat Bukur

Pada kelas lanjutan yang diselenggarakan, kampung-kampung yang sudah mengisikan transaksi lanjutannya, mengirimkan hasil pekerjaannya kepada fasilitator. Kemudian fasilitator mereview hasil pekerjaan tersebut. Dari hasil review yang dilakukan BUMK Campursari sudah mengisikannya dengan benar, BUMK Tembudan hanya salah pengisian di satu akun transaksi. BUMK lain masih banyak kesalahan terutama dalam mengisikan akun transaksi.



Gambar 26 Kelas Lanjutan Penggunaan Aplikasi Keuangan

#### 4.5 REKOMENDASI

1. Pelatihan terkait tata kelola keuangan di Kelas Belajar 2 hanya sebatas pengenalan sistem pencatatan dan pelaporan keuangan yang sesuai dengan Permendes no. 3 tahun 2021 kepada Pengurus BUMK. Selanjutnya perlu dilakukan pelatihan intensif terkait akuntansi BUMK, yang menasar pada kemampuan analitikal keuangan yang baik, identifikasi masalah yang muncul, menganalisis kondisi berdasarkan laporan keuangan serta kemampuan perumusan kebijakan berbasis analisis keuangan.
2. Penguatan kapasitas *branding* dan *exposure* BUMK. Hal ini berguna memperkuat kerjasama antar pihak serta memberikan peluang insentif lain bagi BUMK.
3. Membangun skema kerja sama antar BUMK untuk membangun ekosistem pemampu bagi kampung untuk terus tumbuh.

## 5 PENGUATAN EKOSISTEM SALING BELAJAR ANTAR-KAMPUNG DI BERAU

Kebutuhan akselerasi kapasitas kampung dalam mengelola kewenangan untuk membangun kemandirian kampung sejauh ini lebih dominan melalui pendekatan pendampingan baik melalui pelatihan atau asistensi. Program ini ingin melengkapi dengan pendekatan ekosistem, yang mengupayakan struktur peluang dan insentif bagi terbangunnya kolaborasi antarkampung.

Ekosistem kolaborasi diharapkan mampu menyediakan pemampu bagi setiap kampung untuk melihat, menemukan, memformulasi berbagai peluang kerjasama taktis dan strategis untuk membangun kemandirian. Sektor kemandirian bisa menasar area tata kelola pemerintahan maupun ekonomi kampung. Ekosistem kolaborasi digunakan sebagai upaya mendesak agar kampung tidak mengalienasi diri, namun menempatkan dirinya sebagai kekuatan kolektif-kolaboratif untuk mengakselerasi pembangunan kampung.

### 5.1 SURYA BANUA SEKOLAH BUMK LABANAN MAKARTI

Pada Akademi Kampung SIGAP angkatan 1, hal pertama yang dapat dipotret di Labanan Makarti adalah sinergi antara pemerintah kampung dan pengurus BUMK yang sangat tinggi. Perencanaan bisnis yang dilakukan BUMK didukung penuh oleh pemerintah kampung, melalui seperangkat kebijakan serta pendaya gunaan aset untuk menunjang tumbuh kembang BUMK.

Selain itu pengurus BUMK Labanan Makarti memiliki pemahaman yang mendalam tentang proses bisnis yang dilakukan. Mereka memiliki data yang cukup akurat, serta analisa bisnis yang kuat. Ekstensifikasi dipilih untuk membesarkan BUMK, alih – alih membuka unit usaha baru. Ceruk pasar yang masih lebar serta peluang memperbesar kapasitas produksi menjadi pertimbangan utama. Fokus terhadap unit usaha yang dilakukan, itulah *value* yang dimiliki pengurus BUMK, yang tidak banyak ditemui di tempat lain.

Kapasitas anggaran kampung Labanan Makarti yang mepet dan tidak sustain disadari betul oleh pemerintah kampung. Hal ini menjadi fokus pemerintah kampung, bagaimana dengan anggaran yang dimiliki, dapat menyelesaikan masalah sosial yang ada, sekaligus memperbesar *multiplier effect* yang besar atas anggaran yang dialokasikan.

Labanan Makarti merupakan salah satu *local champion* yang punya prestasi terutama dalam hal pengelolaan BUMK. Prestasi-prestasi ini diharapkan

**SURYA BANUA SEKOLAH BUMK**

Mulai dari **BELAJAR ANALISA BISNIS UNIT USAHA**

Peternakan Ayam Petelur

Sistem pengelolaan administrasi berbasis aplikasi

CONTACT PERSON : 085247718228 (DEA)

Biaya Kontribusi Start to Rp 750.000,00 / peserta

**Fasilitas**

- SERTIFIKAT PELATIHAN
- SOFT COPY MATERI
- PRAKTIK LAPANGAN
- APLIKASI KEUANGAN

Gambar 27 Flyer Surya Banua Sekolah BUMK

dapat ditularkan dan direplikasi ke kampung-kampung lain. Skema membentuk sekolah BUMK disepakati dalam usaha membentuk ekosistem saling belajar dalam rangka akselerasi kemandirian kampung-kampung di Berau. Atas dasar itulah Surya Banua Sekolah BUMK di bentuk. Sekolah BUMK ini diharapkan menjadi media pembelajaran yang adaptif dan replikatif bagi kampung-kampung di Berau.

Untuk menyiapkan sekolah BUMK ini serangkaian kegiatan persiapan telah kami lakukan. Dari penyelenggaraan *focus group discussion* (FGD) baik secara daring maupun luring. FGD ini dilakukan untuk merumuskan *deck* pembelajaran yang akan menjadi konten materi Sekolah BUMK. Selain itu juga dilakukan *Training of Trainer* (ToT) bagi calon fasilitator sekolah BUMK. Setelah rangkaian kegiatan itu

**SB**  
SURYA BANUA

BADAN USAHA MILIK KAMPUNG  
**BUMK**  
"SURYA JAYA ABADI"  
KAMPUNG LABANAN MAKARTI  
KEC. TELUK BAKUR  
KAB. BERAU  
NPT INANTAN

**DAFTAR MATERI**

BANYAK BELAJAR  
BANYAK PENGETAHUAN

Sanggar Inovasi Desa  
SYGAP  
SEKOLAH YOUTH GROUP

MENEMUKAN IDE BISNIS	KELEMBAGAAN BUMK	MEMBANGUN BISNIS AUTOPILOT	MEMPERLUAS KERBERMANFAATAN	PANDUAN BISNIS AYAM PETELUR
1.PEMETAAN POTENSI & PELUANG 2.SORTIR IDE BISNIS 3.ANALISA KELAYAKAN USAHA 4.PERENCANAAN USAHA	1.PENGANTAR - TATA KELEMBAGAAN BUMK PP.II 2.PENYUSUNAN DRAFT PERDES 3.PENYUSUNAN DRAFT AD 4.PENYUSUNAN DRAFT ART 5.MUSDES - BA	1.PENGLOLAAN KEUANGAN 2.REKRUITMENT 3.PROCUREMENT/ PENGADAAN 4.SISTEM REMUNERASI	1.ANALISIS RANTAI NILAI 2.IDENTIFIKASI TITIK KRITIS DALAM RANTAI NILAI 3.SKEMA KOLABORASI/ KEMITRAAN	1.PENGANTAR TEKNIS PRODUKSI 2.MAGANG SIKLUS PRODUKSI MANAJEMEN PAKAN, MANAJEMEN KANDANG, MANAJEMEN PRODUKSI

Hubungi Kami :  
**085247718228**

**SURYA BANUA**  
BUMK SURYA JAYA ABADI  
KAMPUNG LABANAN MAKARTI

Gambar 28 Daftar Materi Surya Banua Sekolah BUMK

terselesaikan, Surya Banua Sekolah BUMK sudah siap menerima peserta baik dari kampung-kampung di Berau maupun wilayah lain di Indonesia.

## 5.2 SEKOLAH DESA LABANAN MAKMUR

Sekolah Desa merupakan wadah ekosistem kolaborasi yang coba dibentuk dengan model yang berbeda dari Surya Banua Sekolah BUMK. Forum diskusi yang dari awal memang direncanakan sebagai salah satu upaya menumbuhkan ekosistem saling belajar antar kampung. Diskusi penajaman terkait rencana ini memutuskan Labanan Makmur diupayakan sebagai *host* atau tuan rumah dari forum diskusi tersebut.

Impian Kepala Kampung Labanan Makmur, Mupit Datusahlan, untuk membentuk Sekolah Kepemimpinan Desa dirasa sejalan dengan apa yang coba diwujudkan dalam forum diskusi ini. Selain itu dengan adanya kampung yang menjadi tuan rumah, harapannya forum diskusi tersebut dapat berjalan secara berkelanjutan.

Dalam diskusi dengan Pemerintah Kampung Labanan Makmur forum diskusi ini disepakati dengan nama “Sekolah Desa”. Sekolah Desa sebagai



Gambar 29 Diskusi Daring Sekolah Desa

proses pengembangan Ekosistem Kolaborasi, dibentuk untuk Produksi Pengetahuan, Kebijakan, dan Praktik Berdesa. Secara spesifik tujuan dari Sekolah Desa adalah sebagai berikut,

1. Mendokumentasikan pengetahuan (termasuk praktik baik) berdesa dalam pengalaman kampung-kampung di Kabupaten Berau;
2. Memformulasikan berbagai panduan teknis/operasional dari berbagai pengalaman baik/kisah sukses dalam membangun kemandirian kampung di Kabupaten Berau; dan
3. Mensistematisasi ruang-ruang kolaborasi taktis dan strategis antarkampung untuk pengembangan ekonomi dan pemerintahan kampung.
4. Mensistematisasi *state of the art* keilmuan berdesa dari pengalaman kampung di Kabupaten Berau.

Dalam pelaksanaannya Sekolah Desa sudah berjalan sebanyak dua kali. Satu kali diskusi daring dan yang lain diskusi secara luring. Diskusi-diskusi Sekolah Desa tersebut dapat disimak melalui kanal Youtube Kampung Labanan Makmur.

Diskusi perdana dilakukan secara daring dengan mengundang Kepala Kampung Sumber Agung sebagai narasumber. Kampung Sumber Agung merupakan salah satu kampung yang memiliki berbagai prestasi dan pengalaman menarik. Tahun 2021 lalu, Kampung Sumber Agung menjuarai lomba desa tingkat provinsi. Atas prestasi tersebut di tahun 2022 Kampung Sumber Agung mewakili Provinsi Kalimantan Timur untuk mengikuti lomba desa tingkat nasional. Selain prestasi di lomba desa, Sumber Agung juga dikenal karena memiliki PAK yang besar. Prestasi-prestasi yang dimiliki Sumber Agung tentunya tidak datang dari langit, ada sekian panjang proses yang dilewati Sumber Agung. Proses inilah yang menarik untuk dijadikan pelajaran dan penambahan wawasan bagi kampung-kampung lain melalui Sekolah Desa.

Diskusi Sekolah Desa yang kedua diselenggarakan secara luring, menjadi bagian dari rangkaian Festival Kampung SIGAP. Pada seri diskusi kedua ini fokus membahas terkait Program SIGAP Sejahtera sebagai



Gambar 30 Moderator dan Narasumber Sekolah Desa

wujud dari kolaborasi lintas pihak yang mewujudkan pendampingan yang holistik. Perjalanan panjang dari program ini memberikan cerita yang menarik untuk diulas, sekaligus pembelajaran untuk dicermati bersama demi terwujudnya program yang lebih baik. Narasumber diskusi Sekolah Desa pada seri ini menghadirkan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Tenteram Rahayu, Chris Djoka yang mewakili Yayasan Konservasi Alam Nusantara, dan Any Sundari mewakili Yayasan Sanggar Inovasi Desa.

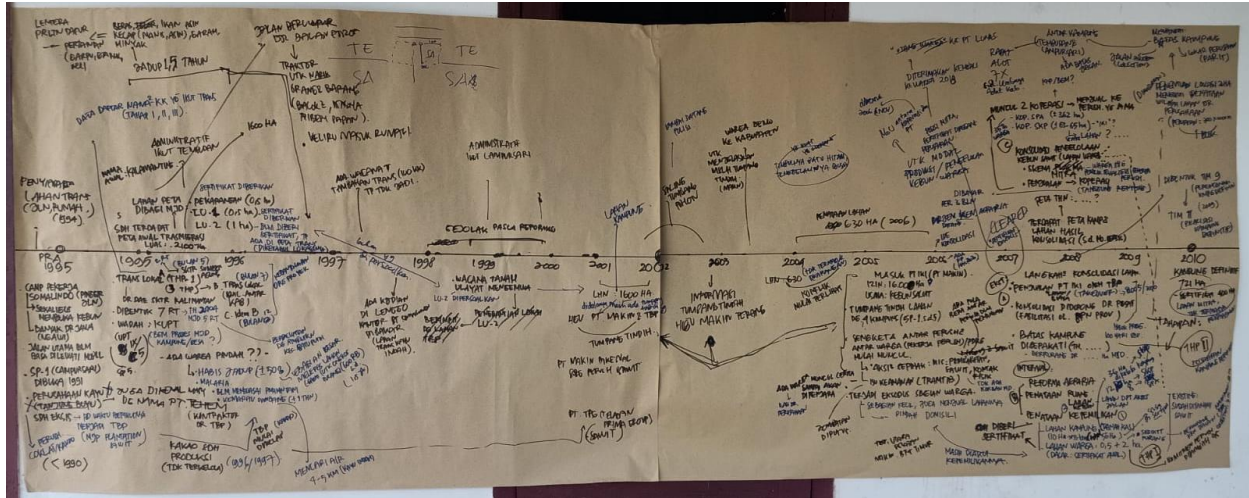


Gambar 31 Diskusi Sekolah Desa Luring

### 5.3 UPAYA PENGUATAN EKOSISTEM SALING BELAJAR

Selain Surya Banua Sekolah BUMK dan Sekolah Desa, kami mengupayakan terbentuk simpul kolaborasi lainnya di kampung. Berkaitan dengan hal tersebut, salah satu kampung yang mempunyai kemampuan serta “bibit juara” adalah Kampung Sumber Agung. Tahun 2021 lalu, Kampung Sumber Agung menjuarai lomba desa tingkat provinsi. Atas prestasi tersebut di tahun 2022 Kampung Sumber Agung mewakili Provinsi Kalimantan Timur untuk mengikuti lomba desa tingkat nasional. Selain prestasi tersebut, Sumber Agung dikenal sebagai kampung yang memiliki pendapatan asli kampung (PAK) hingga milyaran rupiah.

Atas dasar informasi di atas, kami mengadakan diskusi dengan Kepala Kampung dan *stakeholder* Kampung Sumber Agung lainnya. Salah satu temuan menarik bahwasanya Sumber Agung mempunyai pengalaman reforma agraria skala kampung. Proses reforma agraria tersebut menjadi kisah panjang yang menarik untuk menjadi pelajaran bagi kampung yang lain. Kampung Sumber Agung merupakan kampung yang batas wilayahnya sudah definitif. Perjuangan panjang terkait pendefinitifan batas tersebut beriringan dengan kisah reforma agraria, lengkap dengan berbagaimacam konflik yang ada. Banyaknya kampung di Berau yang masih bermasalah tapal batasnya, bisa belajar dari Kampung Sumber Agung terkait penyelesaian tapal batas yang tentunya tidak mengorbankan warganya sendiri.



Gambar 32 Hasil Diskusi Penggalian Sejarah Kampung Sumber Agung

Selain terkait nilai kesejarahan yang menarik dari Kampung Sumber Agung, hal lain yang dapat diambil pelajaran adalah visi masa depan yang baik dari kampung ini. Sumber Agung sudah mempunyai *masterplan* pembangunan kampungnya. Edi Santoso, Kepala Kampung Sumber Agung, berharap dengan adanya *masterplan* maka siapa pun kepala kampung yang terpilih mempunyai panduan dalam melaksanakan pembangunan kampung.

Dari hasil diskusi dengan para *stakeholder* kampung, pengalaman baik Kampung Sumber Agung rencananya akan dituliskan dalam buku. Buku tersebut harapannya dapat menjadi materi pembelajaran kampung lain terkait apa yang sudah dialami, diselesaikan, dan direncanakan oleh Kampung Sumber Agung.



Gambar 33 Kelas Kewenangan Desa Kecamatan Maratua

Upaya penguatan ekosistem saling belajar lain yang coba diwujudkan selain di Sumber Agung, adalah di Kecamatan Maratua. Kecamatan Maratua yang memiliki empat kampung, masing-masing memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Empat kampung tersebut memiliki karakteristik yang kurang lebih sama. Masalah yang dihadapi pun kurang lebih sama. Selain itu ada kebutuhan negosiasi dengan pemilik resort, sehingga terjadi relasi kuasa yang seimbang dengan Pemerintah Kampung.

Asumsinya jika empat kampung tersebut bersatu dalam skema kolaborasi, masalah-masalah yang dihadapi akan mudah diselesaikan. Selain itu potensi-potensi yang ada akan lebih optimal dimanfaatkan.

Jika pola kolaborasi tersebut dapat tercipta. Maka proses ini menjadi suatu hal yang dapat direplikasi di daerah lain.

#### 5.4 REKOMENDASI

Dalam kebutuhan akselerasi kapasitas kampung dalam mengelola kewenangan untuk membangun kemandirian kampung masih dominan dilakukan dengan pendekatan pendampingan baik dalam bentuk pelatihan dan asistensi. Pendekatan ekosistemik seperti yang dilakukan pada program ini perlu digiatkan. Selain sebagai pelengkap, pendekatan ini mengupayakan struktur peluang dan insentif bagi terbangunnya kolaborasi antarkampung. Ekosistem kolaborasi diharapkan mampu menyediakan pemampu bagi setiap kampung untuk melihat, menemukan, memformulasi berbagai peluang kerjasama taktis dan strategis untuk membangun kemandirian. Sektor kemandirian bisa menysasar area tata kelola pemerintahan maupun ekonomi kampung. Ekosistem kolaborasi digunakan sebagai upaya mendesak agar kampung tidak mengalienasi diri, namun menempatkan dirinya sebagai kekuatan kolektif -kolaboratif untuk mengakselerasi pembangunan kampung.

## 6 FESTIVAL KAMPUNG SIGAP

Dalam tahapan 7D, Festival Kampung SIGAP merupakan kegiatan “Drive”. Kegiatan “mendengarkan keberhasilan” kali ini difokuskan untuk lebih mengenalkan Akademi Kampung SIGAP ke masyarakat umum. Dengan konsep acara santai dan tidak terlalu formal. Acara inipun disiarkan langsung di kanal Youtube Labanan Makmur sebagai bagian dari konten Sekolah Desa.



Gambar 34 Ibu Bupati Berfoto dengan Ibu-ibu PKK Labanan Jaya dalam Festival Kampung SIGAP

Adapaun rangkaian Akademi Kampung SIGAP adalah sebagai berikut:

### a. Pameran Inovasi Kampung

Kegiatan ini merupakan pameran yang berisikan stan-stan kampung. Hal-hal yang ditunjukkan oleh kampung berupa produk unggulan, inovasi, serta praktik baik yang dimiliki masing-masing kampung. Dalam kegiatan ini kami mengundang seluruh kampung dan kecamatan peserta Akademi Kampung SIGAP untuk ikut mengisi stan. Namun tidak semuanya dapat memenuhi undangan kami, berikut ini kampung dan kecamatan yang mengisi stan di Festival Kampung SIGAP beserta produknya:

1. Kecamatan Gunung Tabur : Promo wisata (Kampung wisata Pulau Besing, Batu-batu Eco Village, Pesona Alam Samburakat), Kerajinan tangan (batik, tas rotan), dan aneka makanan ringan.
2. Kecamatan Pulau Derawan : Batik tanjung batu, ekowisata mangrove Teluk Semanting, Paket Wisata BUMK Langkawit Pulau Derawan, dan aneka makanan ringan.
3. Kampung Merasa : Coklat Bar
4. Kampung Sido Bangen : Jamu herbal, Kripik singkong, kripik jamur
5. Kampung Suaran : Video inovasi kampung, aneka makanan ringan, batik
6. Kampung Tembudan : batik alam, kaos, kue kering, kerajinan tangan
7. Kampung Labanan Makarti : Sekolah BUMK, produk UMKM
8. Kampung Sukan Tengah : Produk olahan kacang
9. Kampung Pegat Bukur : Kaos batik, aneka cemilan
10. Kampung Talisayan : Wisata hiu tutul

11. Kampung Payung-payung : Tongkol abon, minyak kelapa, aneka camilan
12. Kampung Labanan Jaya : aneka camilan



Gambar 35 Stan Kampung dalam Festival Akademi Kampung SIGAP

b. Pasar Kuliner

Pasar kuliner berisikan stan makanan-minuman yang disediakan panitia dan secara gratis dapat dinikmati pengunjung. Makanan-minuman yang dihadirkan dalam pasar kuliner ini merupakan makanan-minuman dari kampung dan UMKM. Adanya pasar kuliner ini bertujuan untuk menarik lebih banyak pengunjung dan mengenalkan produk-produk dari kampung maupun UMKM.



*Gambar 36 Ibu Bupati Bersama Kepala Dinas PMK mengunjungi Pasar Kuliner dan Mencicipi Hot Coklat Merasa*

Seperti halnya pameran inovasi kampung, pada pasar kuliner ini kami mengirimkan surat penawaran ke seluruh kampung peserta Akademi Kampung SIGAP. Namun demikian tidak seluruhnya bersedia mengisi pasar kuliner ini. Untuk daftar makanan dan minuman dalam Pasar Kuliner adalah sebagai berikut:

1. Hot Coklat Kampung Merasa
  2. Jager Kampung Pegat Bukur
  3. Es Krim Beras Kencur Kampung Labanan Jaya
  4. Es Krim Kembang Telang Kampung Labanan Jaya
  5. Dawet Cincau Kampung Sido Bangen
  6. Soya Jahe Kampung Sido Bangen
  7. Semprong Buah Naga Kampung Sido Bangen
  8. Dodol Coklat Kampung Merasa
  9. Barongko Kampung Suaran
  10. Puding Lumut Kampung Suaran
  11. Salad Buah Kampung Suaran
  12. Kue Angka 8 Kampung Pegat Bukur
  13. Sarang Semut Kampung Payung-payung
  14. Amplang Kampung Payung-payung
  15. Gereget Kampung Tanjung Batu
  16. Kue Apam UMKM Tanjung Redeb
  17. Kue Putri Mandi UMKM Tanjung Redeb
- c. Laporan Capaian Akademi Kampung SIGAP
- Dalam sesi ini, diwakili oleh Ketua Yayasan Sanggar Inovasi Desa, Ryan Sugiarto, YSID sebagai pelaksana program Akademi Kampung SIGAP angkatan 2 menyampaikan capaian-capaian yang didapati selama periode program berjalan.



Gambar 37 Laporan Kegiatan dan Sambutan Bupati dalam Festival Kampung SIGAP

d. Sambutan Bupati Berau

Bupati Kabupaten Berau, Sri Juniarsih, memberikan sambutan langsung dalam kegiatan ini. Bupati menyampaikan apresiasi terhadap Akademi Kampung SIGAP. Selain itu Bupati juga menyampaikan bahwa Akademi Kampung SIGAP adalah wujud keseriusan dan konsistensi dari Pemerintah Kabupaten Berau dalam melakukan penguatan tata kelola pemerintah kampung dan tata kelola BUMK.

e. Podcast Sekolah Desa Live

Dalam Festival Kampung SIGAP ini juga dilaksanakan Podcast Sekolah Desa secara live dengan narasumber Tenteram Rahayu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Berau, Chris Djoka mewakili Yayasan Konservasi Alam, dan Any Sundari mewakili Yayasan Sanggar Inovasi Desa. Sementara *host* atau moderator podcast ini adalah Mupit Datusahlan Kepala Kampung Labanan Makmur. Dalam Podcast Sekolah Desa Live ini topik bahasannya adalah merangkai kolaborasi dalam Program SIGAP Sejahtera.

f. Performing Art & Doorprize

Festival Kampung SIGAP ini dimeriahkan dengan penampilan seni dari kampung serta artis lokal Berau, dan Doorprize bagi pengunjung yang beruntung. Untuk penampilan seni kampung-kampung yang tampil antara lain Pegat Bukur, Sido Bangen, dan Sei Bebanir Bangun. Sementara hadiah doorprize adalah produk-produk unggulan dari kampung seperti Batik Alam Tembudan, Kain Ecoprint Tembudan, Batik Tanjung Batu, Kaos Batik Pegat Bukur, dan Voucher belanja senilai 700.000 ke stan-stan kampung.

g. Live Performance Mural

Pada Festival ini diadakan pertunjukan *mural art*. Kegiatan ini untuk mendorong kreatifitas anak muda berau dan menyebarkan wacana tentang kampung kepada anak muda.

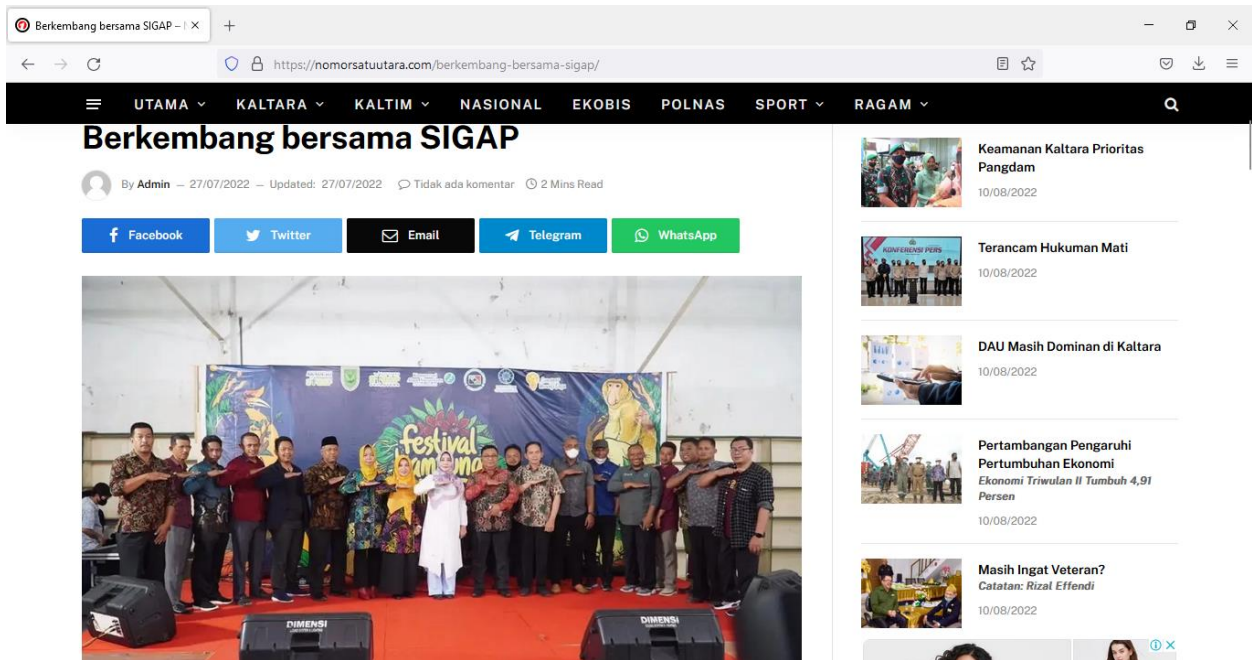


Gambar 38 Penampilan Seni dan Live Mural dalam Festival Kampung SIGAP

## Pemberitaan Media terkait Kegiatan Festival Kampung SIGAP



Gambar 39 Korankaltim.com (<https://korankaltim.com/read/berau/54948/penguatan-tata-kelola-kampung-melalui-pejuang-sigap>)



Gambar 40 Nomorsatuutara.com (<https://nomorsatuutara.com/berkembang-bersama-sigap/>)


Wujudkan Kampung Mandiri dan Sejahtera

Rabu, 27 Juli 2022 20:32

# Wujudkan Kampung Mandiri dan Sejahtera

## Bupati Tutup Akademi dan Festival Kampung SIGAP 2022

Share 6 Tweet



MULIHKAN KAMPUNG MANDIRI: Bupati Berau Sri Juniarsh turut melihat-lihat produk-produk

**TERPOPULER**

- Askab Optimis Sumbang Medati
- Berharap Diprioritaskan Pemprov
- Pertanian Juga Sektor yang Menjanjikan
- Perubahan TNKB Masih Tunggu Material
- Dukung Pemenuhan Fasilitas Inklusi di SD 001
- Segera Layangkan Surat ke Kemenhub
- Kesehatan Gigi, Stunting dan Kesejahteraan Masyarakat
- Pastikan Kesiapan Venue di Maratua
- Sempat Ambruk karena Rembesan Hujan
- PAMA Berikan Kuliah Umum

Cek Kemampuan TOEFL Disini

Gambar 41 berau.prokal.co  
<https://berau.prokal.co/read/news/71495-wujudkan-kampung-mandiri-dan-sejahtera.html>

**PEMERINTAH KABUPATEN BERAU**

www.beraukab.go.id @prokopim\_berau

Hj. Sri Juniarsh Muz.M.Pd Bupati  
 H. Gamali, SE Wakil Bupati

## Maksimalkan Pembangunan lewat Dana RT

**TANJUNG REDEB, DISWAY** – Di bawah kepemimpinan Bupati Berau, Sri Juniarsh dan Wakil Bupati Gamali, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau, berencana menggelontorkan Rp 35 miliar. Sebagai program percepatan pembangunan melalui Dana Rukun Tetangga (RT).

Dikatakan Bupati Berau, Sri Juniarsh, program percepatan tersebut merupakan salah satu program unggulan dari 18 program prioritas mereka. Dana RT akan diberikan kepada sekitar 700 RT yang tersebar di 100 kampung di Kabupaten Berau. Di mana masing-masing RT akan mendapat alokasi dana sebesar Rp 50 juta untuk percepatan pembangunan.

"Insya Allah akan direalisasikan tahun depan," ucapnya, Selasa (26/7).

**BACA MASKIMALKAN... HAL A6**

## Berkembang bersama SIGAP

**TANJUNG REDEB, DISWAY** – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau, memiliki program prioritas percepatan pembangunan kampung melalui Akademi Kampung SIGAP sejahtera. Keberadaan SIGAP pun, dinilai mampu menghasilkan perubahan yang lebih baik.

Bupati Berau, Sri Juniarsh menuliskan, sejak terlaksana pada 2020 lalu, SIGAP telah menjalankan serangkaian kegiatan untuk mendorong terbentuknya kemandirian kampung-kampung di Kabupaten Berau. Melalui partisipasi warga, dan penyediaan ruang partisipasi untuk menjamin

dan kebijakan pembangunan kampung, dengan menerangkan Sistem Informasi Kampung (SIK).

"Sistem itu untuk memudahkan proses pelayanan kepada masyarakat agar lebih cepat, mudah dan efisien," katanya, Selasa (26/7).

Selain itu, Pemkab Berau disebutkannya, memiliki komitmen kuat untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Salah satu caranya dengan mengoptimalkan sektor hilir sumber daya dan pertanian, dengan perluasan lapangan kerja dan pengembangan usaha perikanan serta kerajinan lokal.

**BUPATI** Berau, Sri Juniarsh saat menutup Festival Kampung SIGAP dan Akademi Kampung SIGAP angkatan I periode 2022, Senin (25/7).

Merekajugatelah membangun pemanafaatanda, dan informasi sebagai basis perencanaan

**BACA BERKEMBANG... HAL A6**

**YERAHAN** RT (PHE) DEB 1 AU

**BUPATI** Berau, Sri Juniarsh akan mengalokasikan Rp 35 miliar untuk dana RT pada 2023 mendatang.

Gambar 42 Koran DISWAY



## 7 GENDER BALANCE DALAM KEGIATAN AKADEMI KAMPUNG SIGAP

Berikut ini merupakan tabel *gender balance* dalam kegiatan-kegiatan Akademi Kampung SIGAP #2.

Tabel 6 Gender Balance Akademi Kampung SIGAP

No	Waktu	Events	Pembicara	Narasumber
1	16 Maret 2022	Pelatihan SIK Suaran	P = 7, L = 1	P = 0; L = 1
2	23 Maret 2022	(Lauching) Akademi kampung SIGAP	P = 23, L = 67	P = 0; L = 4
3	29-30 Maret 2022	Kelas Belajar 1 Akademi Kampung SIGAP #2	P = 31, L = 55	P = 1, L = 3
4	1 April 2022	Asistensi dan Monitoring BUMK Labanan Makarti	P = 2, L = 9	P = 1, L = 1
5	2 April 2022	Asistensi dan Monitoring Pemkam Labanan Makmur	P = 2, L = 9	P = 0, L = 2
6	6 April 2022	Asistensi dan Monitoring BUMK Merabu	P = 3, L = 3	P = 0, L = 2
7	7 April 2022	Pelatihan SIK Merabu	P = 4, L = 2	P = 0, L = 1
8	13 April 2022	Asistensi dan Monitoring BUMK Tembudan	P = 2, L = 2	P = 0, L = 1
9	14 April 2022	Sosialisasi dan Simulasi SIK Sumber Agung	P = 7, L = 12	P = 0, L = 2
10	14 April 2022	Pelatihan SIK Sumber Agung	P = 14, L = 22	P = 0, L = 2
11	15 April 2022	Asistensi dan Monitoring BUMK Talisayan	P = 2, L = 3	P = 0, L = 2
12	22 April 2022	Asistensi dan Monitoring BUMK Melati Jaya	P = 1, L = 1	P = 1, L = 1
13	27 April 2022	Asistensi dan Monitoring Pemkam dan BUMK Long Duhung	P = 0, L = 2	P = 0, L = 2
14	5 Mei 2022	Monitoring dan Asistensi BUMK Teluk Sulaiman	P = 2, L = 0	P = 1, L = 1
15	11 Mei 2022	Monitoring dan Asistensi Pemkam Maluang	P = 4, L = 2	P = 0, L = 1
16	23 Mei 2022	Pelatihan SIK Teluk Sulaiman dan Teluk Sumbang	P = 7, L = 4	P = 0, L = 2
17	24 Mei 2022	Pelatihan SIK Sukamurya	P = 6, L = 1	P = 0, L = 2
18	2-3 Juni 2022	Kelas Belajar 2 Akademi Kampung SIGAP #2 (Kelas Tanjung Redeb)	P = 25, L = 47	P = 0, L = 4
19	6-7 Juni 2022	Kelas Belajar 2 Akademi Kampung SIGAP #2 (Kelas Pesisir)	P = 22, L = 29	P = 0, L = 4
20	9 Juni 2022	Asistensi Pra-Muskam BUMK Tembudan	P = 2, L = 7	P = 0, L = 2
21	13-15 Juni 2022	ToT Sekolah BUMK Labanan Makarti	P = 1, L = 7	P = 0, L = 2

## 8 LAMPIRAN

---

### 8.1 MATERI LAUNCHING AKADEMI KAMPUNG SIGAP #2

#### 8.1.1 Materi *Sharing Session*



# PANGGUNGHARJO DESA BAGI SEMUA WARGA BANGSA

untuk hidup yang patut, layak dan bermartabat

**GAMBARAN UMUM**  
**PANGGUNGHARJO**

9.542 KK  
28.383 JIWA

14.164 49.83%  
14.219 50.17%

6.445 jiwa/km<sup>2</sup>

7.244 UNIT RUMAH

Pendapatan sektoral warga desa panggungharjo pada tahun 2018 adalah sebesar 102,43 M, dimana sekitar 73% ditopang dari sektor Jasa dan Perdagangan dan hanya 27% saja yang berasal dari sektor pertanian dalam arti luas

73%  
27%

**SEBELUM SEMUANYA MENJADI SEPERTI BUKOTA**

**JAGA TANAH KITA**

56.72  
31.23  
7.75  
1.88  
2.41

Industri    Perdagangan    Jalan dan perumahan    Perumahan    Persawahan

Laju pertumbuhan perluasan wilayah perkotaan Yogyakarta menjadikan desa panggungharjo setiap tahunnya kehilangan sekitar 2% lahan persawahan yang kemudian dikonversi menjadi permukiman dan kawasan komersil



Unit Jasa  
**Pengelolaan Lingkungan**

Berdiri sejak tahun 2013, memanfaatkan bentang social sekaligus digunakan untuk mendorong pengelolaan sampah yang bertanggungjawab;  
Menjalankan fungsi regulasi, fasilitasi dan insentive dalam mendorong peran serta warga desa dalam pengelolaan sampah sejak tahun 2017 ;  
Mulai tahun 2019 mengintegrasikan layanan Bank Sampah dengan tabungan emas.

**7** DESA BERENERGI BERSIH DAN TERBARUKAN

**13** DESA TANGGAP PERUBAHAN IKLIM

**15** DESA PEDULI LINGKUNGAN DARAT

- 5 KETERLIBATAN PEREMPUAN DESA
- 13 DESA TANGGAP PERUBAHAN IKLIM
- 17 KEMITRAAN UNTUK PEMBANGUNAN DESA



## Unit Produksi **Tamanu Oils**



Tamanu Oil/Minyak Nyamplung merupakan komoditas Internasional yang secara luas digunakan sebagai bahan baku kosmetika dan bahan obat

Berdiri sejak tahun 2018, memanfaatkan bentang teknologi warga desa guna meningkatkan nilai tambah atas komoditas alam yang sebelumnya tidak termanfaatkan secara maksimal

Desa Panggunharjo menjadi satu satunya desa yang menghasilkan Tamanu Oils di Indonesia



- 5 KETERLIBATAN PEREMPUAN DESA
- 8 PERTUMBUHAN EKONOMI DESA MERATA
- 18 KELEMBAGAN DESA DINAMIS DAN BUDAYA DESA ADAPTIF



## Unit **Kampoeng Mataraman**

Kekayaan ragam budaya yang lahir dan tumbuh dipanggunharjo sejak awal abad XIX dikemas ulang dan disajikan dalam satu unit jasa wisata berbasis budaya yang bertumpu 3 aspek yaitu sandang, pangan dan papan

Lahir sejak pertengahan tahun 2017, Kampoeng Mataraman menjadi sumber pendapatan utama di BUMDesa Panggun Lestari

**8** PERTUMBUHAN EKONOMI DESA MERATA

**10** DESA TANPA KESENIANGAN

**17** KEMITRAAN UNTUK PEMBANGUNAN DESA

**PASAR DESA.id**

**BRAND OWNER**

Bumdes sebagai pemasar produk desa

Bumdes sebagai agregator UMKM dan pelaku ekonomi di desa

**CO - RESELLER**

**CO - OWNERSHIP**

3 UNITS/TAHUN

**DESA UNICORN** center of excellence

**DESA JUARA**

**SALAH SATU BUMDESA TERBAIK**

**PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL MANDIRI**

**PROGRAM SATU RUMAH SATU SARJANA DESA PANGGUNG HARJO**

'karena satu satunya cara untuk memutus rantai kemiskinan hanyalah pendidikan'

**KARTU SEHAT**  
SADRAN 871.131.91.08001  
RT.04 Karangreja, Pongreharjo, Kecamatan Panggungharjo, Sukoharjo

**KARTU PINTAR**  
NY. FAHAYEM  
RT.02 PONDOK PANGGUNG HARJO, KEC. BAWAN, KAB. SUKOHARJO

**KARTU KIA**  
MEGA AYU SAHITTA  
RT.04 Desa Karangreja, Kecamatan Panggungharjo, Kabupaten Sukoharjo





PANGGUNHARJO  
DESA BAGI SEMUA BANGSA  
UNTUK HIDUP YANG PATUT, LAYAK DAN BERHARTABAT

### 03 KESEHATAN BAGI SEMUA

Perlindungan social sejak 2013 melalui lembaga Bapel JPS sebagai jaring pengaman social terakhir untuk meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan bagi lansia dan difabel dengan ketergantungan serta bagi Ibu dan Anak khususnya yang berasal dari keluarga tidak mampu



PANGGUNHARJO  
DESA BAGI SEMUA BANGSA  
UNTUK HIDUP YANG PATUT, LAYAK DAN BERHARTABAT

### 04 PENDIDIKAN BAGI SEMUA

Asuransi Pendidikan, Bantuan Pendidikan Tunai, Beasiswa Pendidikan, Lembaga pendidikan Non Formal milik desa (KB/TK dan SD inklusi) serta kerjasama dengan PTN/PTS sebagai upaya untuk mendorong terwujudnya Program Satu Rumah Satu Sarjana




**PANGGUNHARJO  
DESA BAGI SEMUA BANGSA**  
UNTUK HIDUP YANG PATUT, LAYAK DAN BERHARTABAT

## 05 RUANG SOSIAL BAGI SEMUA

Pengalokasian Tanah Desa dan Anggaran Desa sebagai ruang social bagi difabel;  
BLK Craft dan Furniture dengan YCM ;  
BLK Inklusi bersama dengan Ciqal;  
Pojoek Budaya bersama dengan Diffcom

**5** KETERLIBATAN PEREMPUAN DESA



**10** DESA TANPA KESENIANGAN



**16** DESA DAMAI BERKEADILAN



**17** KEMITRAAN UNTUK PEMBANGUNAN DESA



**18** KELEMBAGAAN DESA DINAMIS DAN BUDAYA DESA ADAPTIF





**DESA UNICORN**



center of excellence



**DESA JUARA**



SALAH SATU BUMDESA TERBAIK

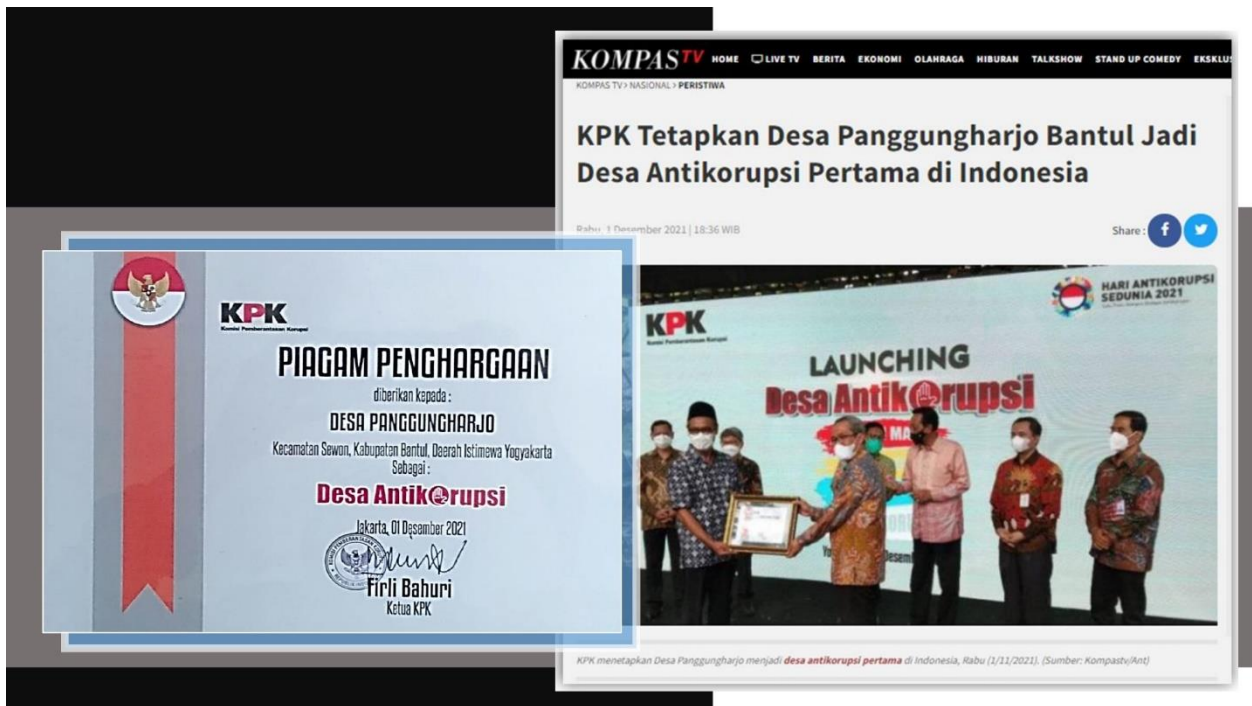
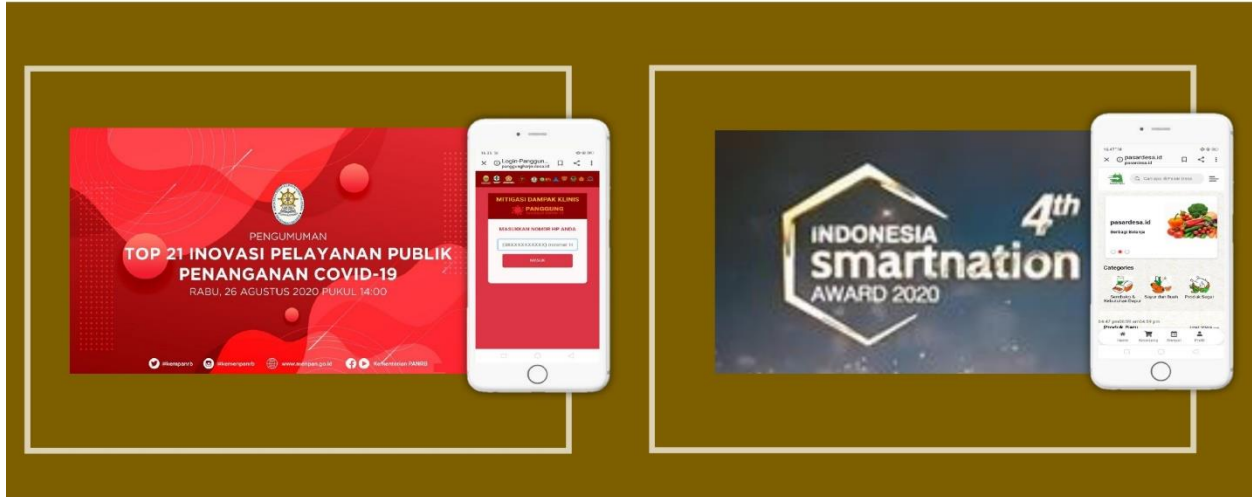


SISTEM INFORMASI DESA TERBAIK



PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL MANDIRI





## KEMANDIRIAN DESA

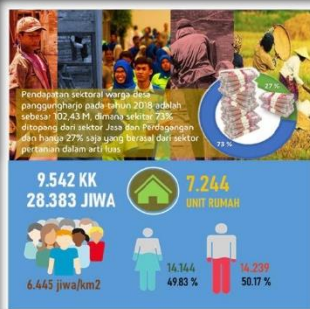
KEMAMPUAN DESA  
DALAM MENGELOLA  
KEWENANGAN  
DAN ASET



## PARTISIPASI

BESARNYA KAPASITAS SOSIAL  
TIDAK SERTA DAPAT DI DORONG  
MENJADI MODAL SOSIAL,  
SEBAGAIMANA YANG KITA  
PAHAMI SEBAGAI PARTISIPASI

KARENA PARTISIPASI  
MENSYARATKAN KEPERCAYAAN



KAPASITAS SOSIAL



MODAL SOSIAL

# LAWAN! MONEY POLITIC



KAPASITAS POLITIK YANG SEHAT HANYA  
TERLAHIR DARI PROSES POLITIK YANG SEHAT

## BASIS DAN INSTRUMEN

K  
A  
P  
A  
S  
I  
T  
A  
S

REGULASI

EKSTRAKTIF

DISTRIBUTIF

RESPONSIF

JARINGAN

RENCANA  
STRATEGIS DESA

RENCANA  
PEMBANGUNAN DESA

PERATURAN DESA

ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN  
BELANJA DESA

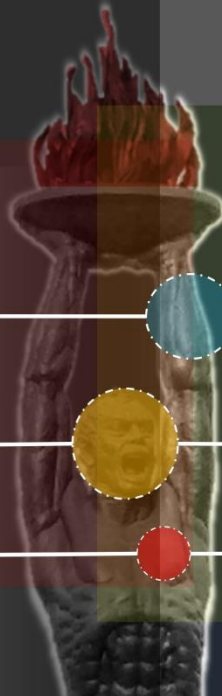


KEPEMIMPINAN  
**PROGESIF**  
**TRANSFORMATIF**

- personality
- vision
- strategy

KEPEMIMPINAN  
**PROGESIF**  
**TRANSFORMATIF**

#1 personality



SIKAP

POSITIF, PRODUKTIF,  
PROAKTIF, PERSISTEN

MINDSET

ENTREPRENEURSHIP

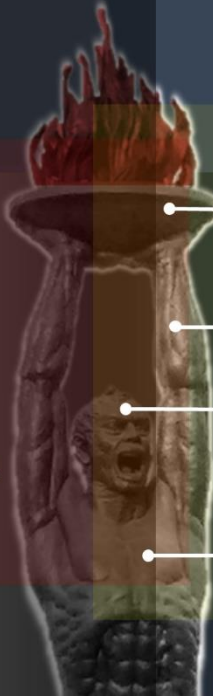
SPIRIT

INTEGRITAS

KEPEMIMPINAN  
**PROGESIF**  
**TRANSFORMATIF**

#2 vision

PEMERINTAHAN DESA  
YANG BERSIH,  
TRANSPARAN DAN  
BERTANGGUNG JAWAB,  
GUNA MEWUJUDKAN  
MASYARAKAT DESA  
YANG DEMOKRATIS,  
MANDIRI DAN SEJAHTERA  
SERTA BERKESADARAN  
LINGKUNGAN



SEJAHTERA

MANDIRI

DEMOKRATIS,  
BERKESADARAN LINGKUNGAN

PEMERINTAHAN DESA YANG BERSIH,  
TRANSPARAN DAN BERTANGGUNG JAWAB

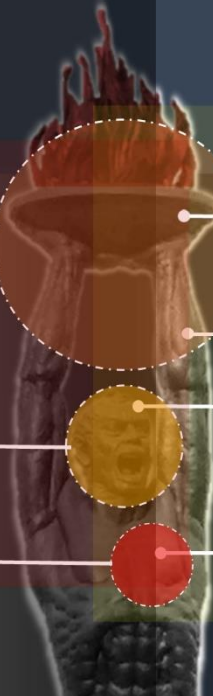
KEPEMIMPINAN  
**PROGESIF**  
**TRANSFORMATIF**

#2 vision

KONDISI YANG  
DICITAKAN

PERSPEKTIF

PRASYARAT



SEJAHTERA

MANDIRI

DEMOKRATIS,  
BERKESADARAN LINGKUNGAN

PEMERINTAHAN DESA YANG BERSIH,  
TRANSPARAN DAN BERTANGGUNG JAWAB

KEPEMIMPINAN  
PROGRESIF  
TRANSFORMATIF

#3 strategy

GERAKAN

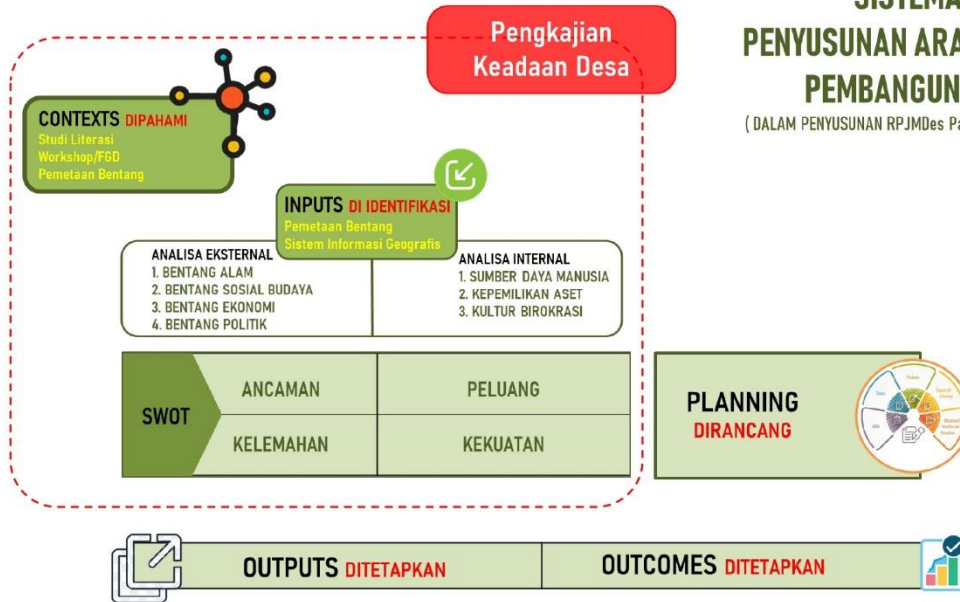
KEBIJAKAN

PENGETAHUAN

#1  
**ARAH  
KEBIJAKAN  
PEMBANGUNAN  
DESA**

# SISTEMATIKA PENYUSUNAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

(DALAM PENYUSUNAN RPJMDes Panggungharjo 2018-2024)



**CONTEXTS DIPAHAMI**  
Studi Literasi  
Workshop/FGD

**JAGONGAN seninkamisan**

Seri diskusi yang terdiri dari workshop dan FGD guna membahas 10 isu yang dianggap penting untuk dilaksanakan oleh pemerintah desa guna mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan warga desa Panggungharjo. Seri diskusi ini dilakukan dalam rangka untuk memahami konteks persoalan secara lebih baik, sehingga intervensi pemdes dapat tepat guna dan berdaya guna

Kelompok Kerja Penyusunan RPJMDesa Panggungharjo 2019-2024

Mengundang para pemerhati desa, penggiat ekonomi pedesaan, pelaku umkm serta warga desa dalam diskusi rutin

**JAGONGAN seninkamisan**  
tema putaran #2  
'Desa Melawan Kemiskinan'

Aula Balai Desa Panggungharjo  
31 Des 2018 dan 03 Januari 2019  
jam 13.00 - 16.00 Wib

**PESERTA TERBATAS**  
Bersifat tertutup  
M. EKO TRIANDU/0821 3429 2072

**JAGONGAN seninkamisan**  
tema putaran #5

**SEBELUM SEMUANYA SEPERTI IBU KOTA**  
**JAGA TANAH KITA**

Mengundang para petani, pemuda desa, penggiat pertanian berkelanjutan, pelestari lingkungan, pemulia bibit lokal, penggiat desa serta warga desa dalam lokakarya penyusunan RPJMDesa Panggungharjo tahun 2019-2024 putaran #5 dengan tema

**Kedaulatan Pangan dan Lingkungan Hidup**

Aula Balai Desa Panggungharjo  
21 Jan 2019 dan 24 Januari 2019  
jam 13.00 - 16.00 Wib

**PESERTA TERBATAS**  
Bersifat tertutup  
M. EKO TRIANDU/0821 3429 2072

**JAGONGAN seninkamisan**

Mengundang para anggota pemerintah desa, penggiat desa, para pelaku umkm serta warga desa dalam diskusi rutin

**JAGONGAN seninkamisan**  
tema putaran #1  
'Kesejahteraan Masyarakat'

Aula Balai Desa Panggungharjo  
11 Des 2018 dan 14 Januari 2019  
jam 13.00 - 16.00 Wib

**PESERTA TERBATAS**  
Bersifat tertutup  
M. EKO TRIANDU/0821 3429 2072

**JAGONGAN seninkamisan**

Mengundang para penggiat kesehatan, penggiat desa, para pemerhati kesehatan serta warga desa dalam diskusi rutin

**JAGONGAN seninkamisan**  
tema putaran #3  
'Kesehatan Masyarakat'

Aula Balai Desa Panggungharjo  
11 Des 2018 dan 14 Januari 2019  
jam 13.00 - 16.00 Wib

**PESERTA TERBATAS**  
Bersifat tertutup  
M. EKO TRIANDU/0821 3429 2072

**JAGONGAN seninkamisan**

Mengundang para penggiat pendidikan, penggiat desa, para pemerhati pendidikan serta warga desa dalam diskusi rutin

**JAGONGAN seninkamisan**  
tema putaran #4  
'Pendidikan yang Membebaskan'

Aula Balai Desa Panggungharjo  
11 Des 2018 dan 14 Januari 2019  
jam 13.00 - 16.00 Wib

**PESERTA TERBATAS**  
Bersifat tertutup  
M. EKO TRIANDU/0821 3429 2072

**JAGONGAN seninkamisan**

Mengundang para penggiat budaya, penggiat desa, para pemerhati budaya serta warga desa dalam diskusi rutin

**JAGONGAN seninkamisan**  
tema putaran #6  
'Budaya yang Berdaya Guna'

Aula Balai Desa Panggungharjo  
11 Des 2018 dan 14 Januari 2019  
jam 13.00 - 16.00 Wib

**PESERTA TERBATAS**  
Bersifat tertutup  
M. EKO TRIANDU/0821 3429 2072

**JAGONGAN seninkamisan**

Mengundang para penggiat pariwisata, penggiat desa, para pemerhati pariwisata serta warga desa dalam diskusi rutin

**JAGONGAN seninkamisan**  
tema putaran #7  
'Pariwisata yang Berdaya Guna'

Aula Balai Desa Panggungharjo  
11 Des 2018 dan 14 Januari 2019  
jam 13.00 - 16.00 Wib

**PESERTA TERBATAS**  
Bersifat tertutup  
M. EKO TRIANDU/0821 3429 2072

**JAGONGAN seninkamisan**

Mengundang para penggiat lingkungan, penggiat desa, para pemerhati lingkungan serta warga desa dalam diskusi rutin

**JAGONGAN seninkamisan**  
tema putaran #8  
'Lingkungan yang Berdaya Guna'

Aula Balai Desa Panggungharjo  
11 Des 2018 dan 14 Januari 2019  
jam 13.00 - 16.00 Wib

**PESERTA TERBATAS**  
Bersifat tertutup  
M. EKO TRIANDU/0821 3429 2072

**JAGONGAN seninkamisan**

Mengundang para penggiat ekonomi, penggiat desa, para pemerhati ekonomi serta warga desa dalam diskusi rutin

**JAGONGAN seninkamisan**  
tema putaran #9  
'Ekonomi yang Berdaya Guna'

Aula Balai Desa Panggungharjo  
11 Des 2018 dan 14 Januari 2019  
jam 13.00 - 16.00 Wib

**PESERTA TERBATAS**  
Bersifat tertutup  
M. EKO TRIANDU/0821 3429 2072

**JAGONGAN seninkamisan**

Mengundang para penggiat sosial, penggiat desa, para pemerhati sosial serta warga desa dalam diskusi rutin

**JAGONGAN seninkamisan**  
tema putaran #10  
'Sosial yang Berdaya Guna'

Aula Balai Desa Panggungharjo  
11 Des 2018 dan 14 Januari 2019  
jam 13.00 - 16.00 Wib

**PESERTA TERBATAS**  
Bersifat tertutup  
M. EKO TRIANDU/0821 3429 2072

94

www.ysid.or.id

# MEMBANGUN BASIS DATA

## INPUTS DI IDENTIFIKASI

Sistem Informasi Geografis

### BASIS DATA SPASIAL

Upaya untuk memahami desa secara lebih baik

Lima metadata pokok yang dijadikan sebagai basis perencanaan yaitu data kependudukan; data biofisik meliputi data infrastruktur lingkungan permukiman; data sosial meliputi sebaran penduduk berdasarkan tingkat kesejahteraan, termasuk didalamnya adalah data PMKS; data ekonomi meliputi pendapatan sectoral, pola konsumsi, sebaran dan jenis jenis UMKM; data keuangan yang dikelola oleh pemdes



## OUTPUTS

- PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
- PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
- PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA
- PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
- PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA

#3 LINGKUP KEWENANGAN DESA



## OUTCOMES

**MANDIRI PANGGUNG HARJO SEJAHTERA 2024**

Setiap keluarga memiliki **Tabungan**  
 Setiap keluarga memiliki **Jaminan Hari Tua**  
 Setiap keluarga memiliki **Jaminan Kesehatan**  
**Indeks Kebahagiaan** meningkat



## #2 GERAKAN KOLABORASI



### FUNGSI DARI PEMERINTAH DESA MENGURUS DAN MENGATUR KEPENTINGAN MASYARAKAT DESA

**MENGURUS**  
aspek umum  
yang berkait  
dan menentukan  
peri kehidupan  
warga Desa



Penataan Desa



Perencanaan Desa



Kerjasama Desa



Aset Desa



Perencanaan Investasi  
yang masuk ke desa



Kejadian Luar Biasa



Pembentukan BUM Desa



# REFORMASI BIROKRASI

MEMBANGUN POLA HUBUNGAN  
YANG BARU ANTARA PEMERINTAH DESA  
DAN WARGA DESA

MELAKUKAN PENYESUAIAN  
TATA KELEMBAGAAN DESA

MEMBANGUN KULTUR  
ORGANISASI YANG BARU



REFORMASI BIROKRASI

**Unit Jasa Pengelolaan Lingkungan**  
Berdiri sejak tahun 2013, memanfaatkan bentang social sekaligus digunakan untuk mendorong pengelolaan sampah yang bertanggungjawab; Menjalankan fungsi regulasi insentive dalam mendorong warga desa dalam pengelolaan sampah sejak tahun 2017. Mulai tahun 2019 layanan Bank Sampah.

**Unit Produk**  
Taman Oil/Minyak komoditas Internasional digunakan sebagai bahan obat.  
Berdiri sejak tahun 2018, memanfaatkan bentang teknologi warga desa guna meningkatkan nilai tambah atas komoditas alam yang sebelumnya tidak dimanfaatkan secara maksimal.  
Desa Panggungharjo menjadi satu satunya desa yang menghasilkan Taman Oils di Indonesia

**Unit Kampong Mataraman**  
Kekayaan ragam budaya yang lahir dan tumbuh dipanggungharjo sejak awal abad XIX dikemas ulang dan disajikan dalam satu unit jasa wisata berbasis budaya yang bertumpu 3 aspek yaitu sandang, pangan dan papan.  
Lahir sejak pertengahan tahun 2017, Kampong Mataraman menjadi sumber pendapatan utama di BUMDesa Panggung Lestari

**PANGGUNG LESTARI**  
BADAN USAHA MILIK DESA PANGGUNGHARJO

**KLINIK LARAS HATI**

**POLITEKNIK NEGERI ATK YODIYANAKTA**

**BAZNAS**  
Badan Amil Zakat Nasional  
Kabupaten Bantul

**lazismu**  
memberi untuk negeri

**lazisnu**  
kembali ke konsep zakat

**DMPET DHUAFa**

**Rumah Zakat**

**03 KESEHATAN BAGI SEMUA**  
Perlindungan sosial sejak 2013 melalui lembaga Bapel JPS sebagai jaminan sosial terakhir untuk menjamin terdapat layanan kesehatan difabel dengan keterbatasan dan Anak khususnya yang keluarga tidak mampu

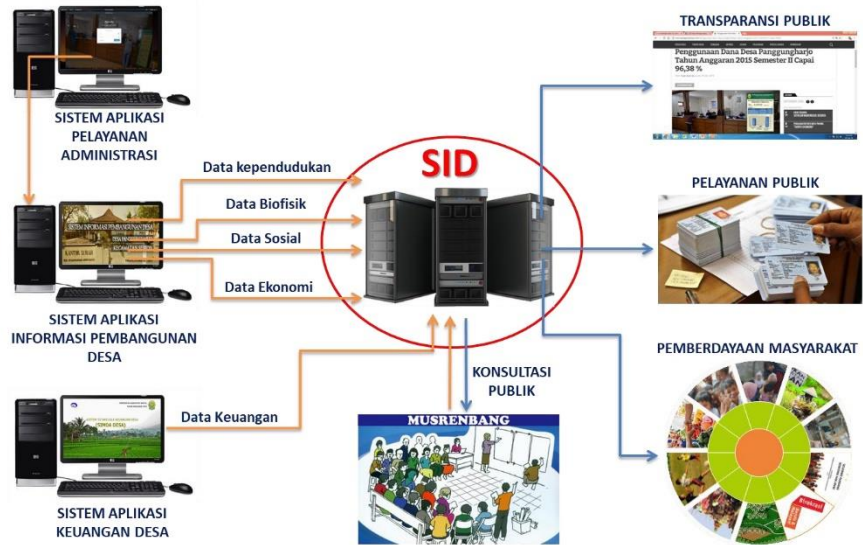
**04 PENDIDIKAN BAGI SEMUA**  
Asuransi Pendidikan, Bantuan Pendidikan Tunas, Beasiswa Pendidikan, Lembaga pendidikan Non Formal milik desa (KB/TK dan SD inklusi) serta kerjasama dengan PTN/PTS sebagai upaya untuk mendorong terwujudnya Program Satu Rumah Satu Sarjana

**SATU RUMAH SATU SARJANA**  
DESA PANGGUNGHARJO  
"Karena satu satunya cara untuk memutus rantai kemiskinan hanyalah pendidikan"

**KARTU KIA**  
7X PEMERIKSAAN KEHAMILAN  
PERSALINAN NORMAL  
2X PEMERIKSAAN NIFAS  
LIMA IMUNISASI LENGKAP

**BAPEL JPS**  
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kabupaten Bantul

## PENGELOLAAN SISTEM DATA DAN INFORMASI





**KOLABORASI**  
BERBASIS ASET

**MENJADIKAN DESA SEBAGAI SUBYEK PEMBANGUNAN,  
MENSYARATKAN PERBAIKAN 4 DIMENSI DESA**



**PERBAIKAN  
INFRASTRUKTUR EKONOMI**



**PERBAIKAN  
INFRASTRUKTUR POLITIK**



**PERBAIKAN  
INFRASTRUKTUR SOSIAL**



**PERBAIKAN  
INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI**



**PERBAIKAN  
INFRASTRUKTUR EKONOMI**

ENTREPRENEURSHIP DI DESA

MODEL PENDEKATAN

## COACHING - MENTORING - CONSULTING

LEVEL PERUBAHAN

Mindset  
Sikap - attitude  
Ketrampilan - skills  
Pengetahuan - knowledge

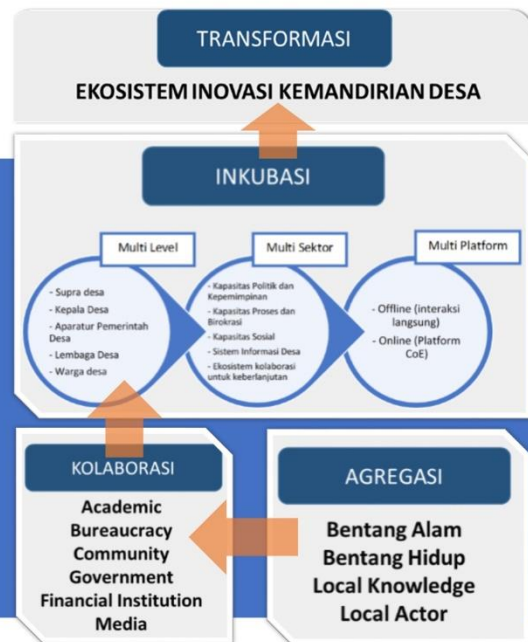


TARGET PERUBAHAN

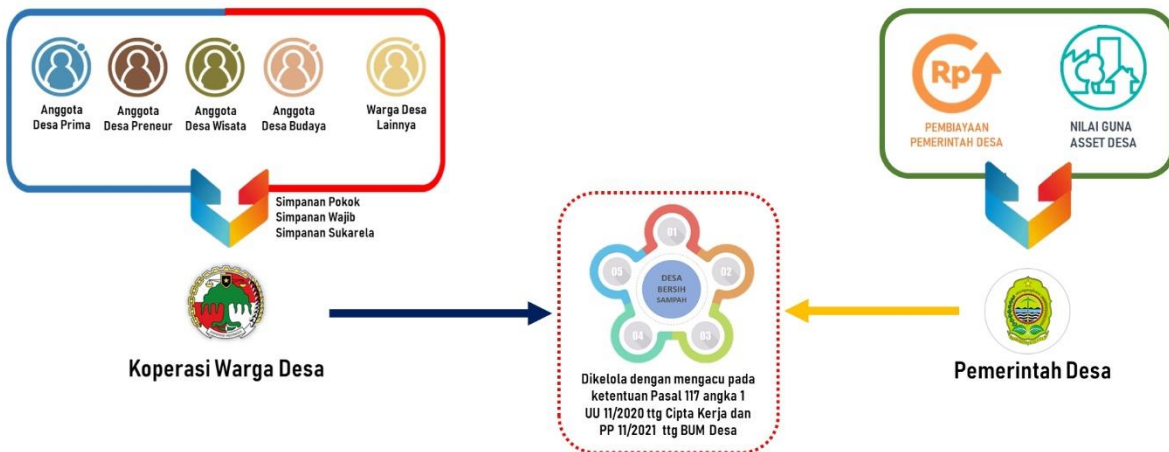
Konsep Diri  
Finansial Literasi  
Value Creation  
Inovasi  
Kalkulasi Resiko



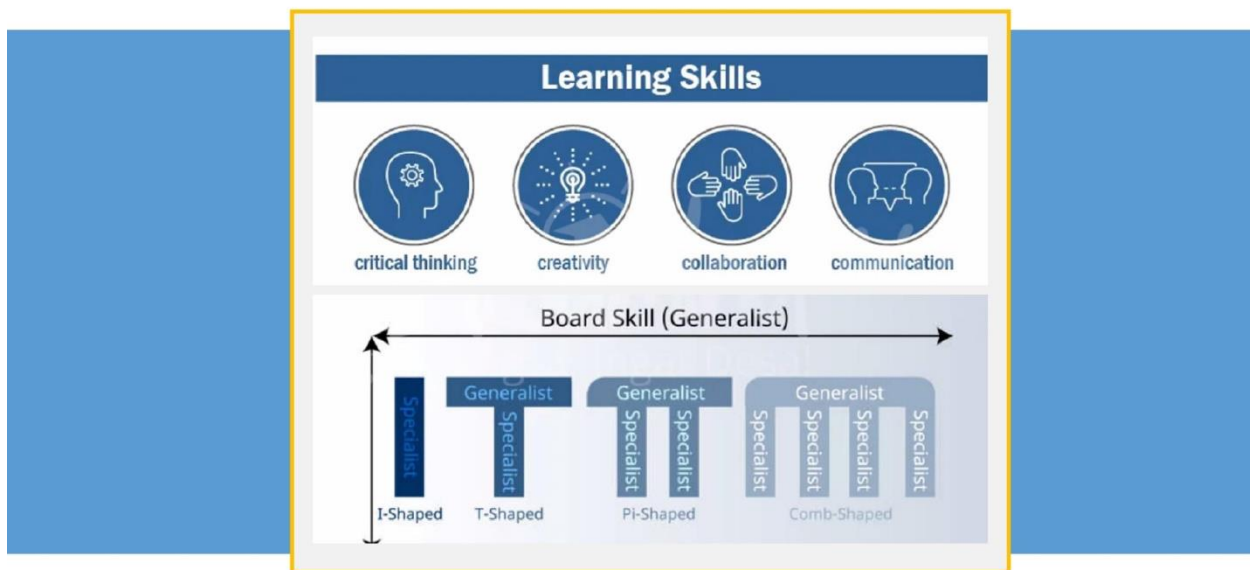
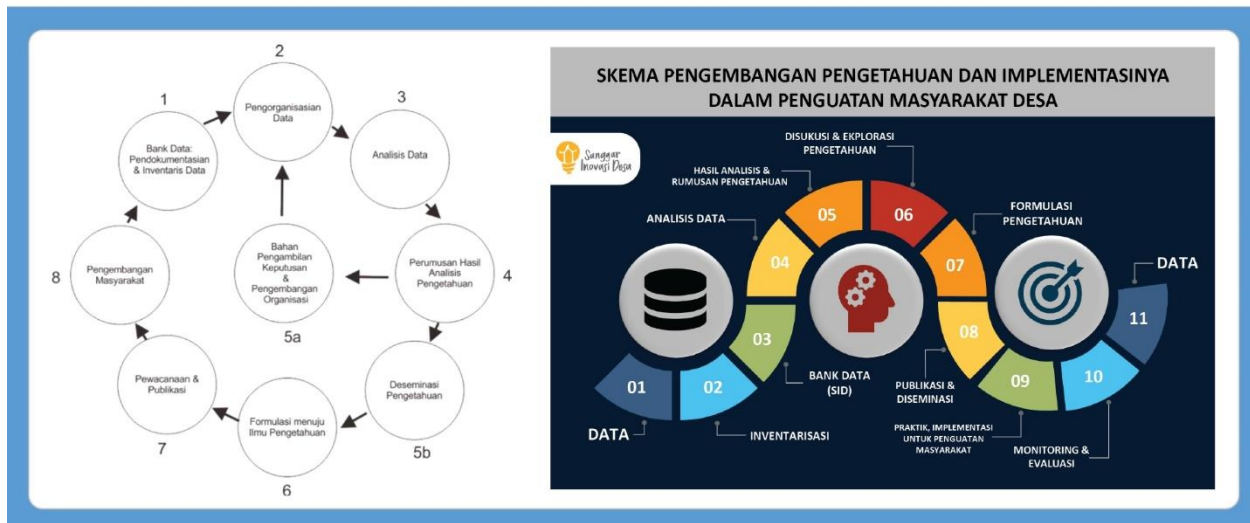
**PERBAIKAN  
INFRASTRUKTUR EKONOMI  
KELEMBAGAAN EKONOMI DESA**



**DESAIN kelembagaan**



# #3 PENGETAHUAN





kita mewarisi **TANAH**



tetapi kita tidak  
mewarisi **PENGETAHUAN**

---

Desa sebagai basis kemandirian bangsa,

Dengan menjadikan desa sebagai arena demokratisasi politik dan ekonomi lokal yang memungkinkan warga desa mempunyai akses yang memadai untuk turut serta dalam menentukan arah kebijakan serta mempunyai akses memanfaatkan sumber daya ekonomi melalui pemberkuasaan warga dan aktualisasi pengetahuan

---



**TATANAN INDONESIA BARU  
DARI DESA**

**DAULAT POLITIK ;  
MEWUJUDKAN DESA SEBAGAI ARENA  
DEMOKRATISASI POLITIK LOKAL**

**DAULAT EKONOMI ;  
MEWUJUDKAN DESA SEBAGAI ARENA  
DEMOKRATISASI EKONOMI LOKAL**

**DAULAT DATA ;  
PEMBERKUASAAN MELALUI  
AKTUALISASI PENGETAHUAN WARGA**



Buku putih : ARAH TATANAN INDONESIA BARU dan 20 buku hasil Kongres Kebudayaan Desa dapat di unduh secara gratis melalui <https://sanggarinovasidesa.id/>

## 8.1.2 Materi Pembekalan Programatik



# Paparan Program Akademi Kampung Sigap

Sanggar Inovasi Desa @sanggardesa

[www.sanggarinovasidesa.id](http://www.sanggarinovasidesa.id)



Wahana pembentukan ekosistem inovasi kemandirian desa melalui desain *knowledge management* yang bertumpu pada nilai otentik, lestari dan tumbuh bersama dengan mengarusutamakan kerja-kerja kolaboratif lintas *stakeholder*.

Mendorong desa menjadi pusat sistem inovasi perubahan tata kelola pemerintahan dan kewirausahaan desa

[www.sanggarinovasidesa.id](http://www.sanggarinovasidesa.id)



Sanggar Inovasi Desa @sanggardesa

[www.sanggarinovasidesa.id](http://www.sanggarinovasidesa.id)



  Sanggar Inovasi Desa   @sanggardesa

[www.sanggarinovasidesa.id](http://www.sanggarinovasidesa.id)



  Sanggar Inovasi Desa   @sanggardesa

[www.sanggarinovasidesa.id](http://www.sanggarinovasidesa.id)



Konservasi  
Alam Nusantara  
Untuk Indonesia Lestari



# AKADEMI KAMPUNG SIGAP #2



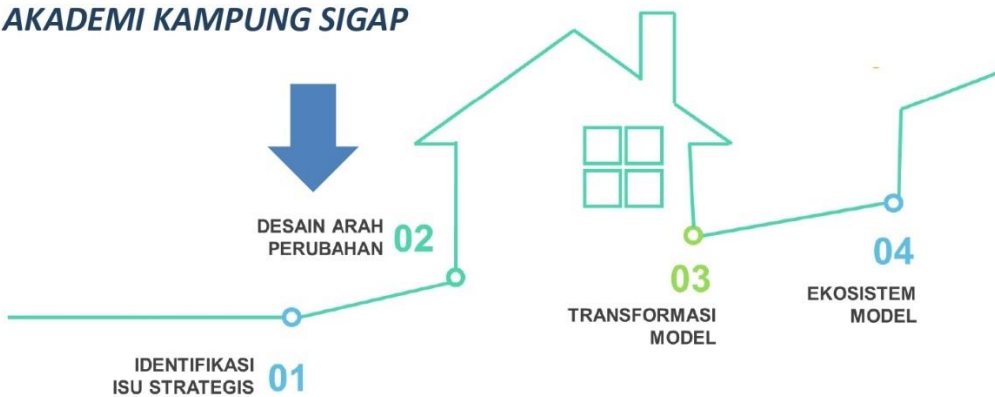
Sanggar Inovasi Desa



@sanggardesa

www.sanggarinovasidesa.id

## AKADEMI KAMPUNG SIGAP



### Tantangan

#### Keluasan SDA, Kesempitan SDM

Potensi alam yang dimiliki, belum terkelola baik karena ketersediaan (kuantitas) SDM yang kurang.



#### Kepatuhan

Kepatuhan terhadap aturan/ nomenklatur sangat tinggi

#### Envisioning Kampung

Imajinasi Kampung masa depan belum nyata terbentuk. Pun inovasi – inovasi menuju kemandirian kampung belum banyak muncul



#### Program Sigap Sejahtera

Penguatan peran Pejuang Sigap Sejahtera sebagai agen perubahan di Kampung

### Peluang



Sanggar Inovasi Desa



@sanggardesa

www.sanggarinovasidesa.id



## Sumber Daya Kunci



**01** Program Sigap Sejahtera  
Program Sigap Sejahtera berdampak pada IDM Berau.

**02** Anggaran  
Ketersediaan dukungan, anggaran yang diterima kampung relatif besar

**03** Kolaborator  
Pemerintah - Perusahaan - LSM

**04** Keluasan  
Keluasan ruang dan potensi

## RUMUSAN STRATEGIS

### REFORMULASI PELAYANAN PUBLIK DAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KAMPUNG

- Memperkuat kualitas partisipasi melalui penyediaan ruang partisipasi dan skenario ideal untuk menjamin kualitas partisipasi.
- Penerapan **SISTEM INFORMASI KAMPUNG** sebagai wujud kedaulatan data kampung.
- Membangun kultur pemanfaatan data dan informasi sebagai basis perencanaan dan kebijakan pembangunan kampung

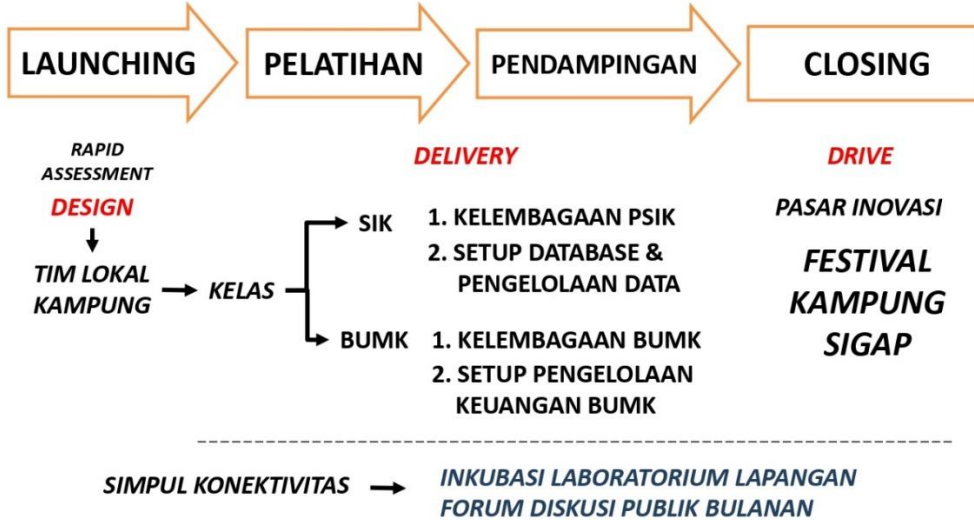
### PREPOSISI BUMK SEBAGAI PENGGERAK EKONOMI KAMPUNG

- Reformulasi **TATA** kelembagaan **BUMK** sesuai PP.11/ 2021 dan Permendesa.3/ 2021.
- Penguatan perencanaan usaha BUMK.
- Penguatan pengelolaan keuangan BUMK.

### EKOSISTEM KOLABORASI PERCEPATAN KEMANDIRIAN KAMPUNG

- Terbentuknya **SIMPUL KONEKTIVITAS** lintaspihak sebagai ekosistem saling belajar, perluasan kerjasama, serta memperkuat akses dan meningkatkan skala kebermanfaatannya.

# DESAIN PROGRAM



[Sanggar Inovasi Desa](#)
[@sanggardesa](#)
[@sanggardesa](#)
[www.sanggarinovasidesa.id](http://www.sanggarinovasidesa.id)

## PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN

Tahap	Muatan	Feb '22	Mar '22	Apr '22	Mei '22	Jun '22	Jul '22	Aug '22
1	<b>Kelas SID #1 : set up kelembagaan</b> <b>Kelas Bumdes #1 : transformasi kelembagaan</b>  <b>Pendampingan pengelola SID</b> - legal draft - penyiapan sarana pendukung <b>Penyiapan syarat administratif BH</b> - legal draft - musdes - pendaftaran		29 - 30					
	<b>Kelas SID #2 : set up sistem</b> <b>Kelas Bumdes #2 : pengelolaan keuangan</b>  <b>Sistem database SID</b> - profil desa - data kependudukan - sistem pelayanan - webgis - updating & pengelolaan <b>Pengelolaan keuangan BUMK</b> - setup database akun - pencatatan transaksi harian - evaluasi kinerja keuangan (neraca & L/R)				M - 4			

[Sanggar Inovasi Desa](#)
[@sanggardesa](#)
[@sanggardesa](#)
[www.sanggarinovasidesa.id](http://www.sanggarinovasidesa.id)



## 8.2 MATERI KELAS BELAJAR 1

### 8.2.1 Materi PEMKAM

# UNDANG UNDANG DESA DAN KEMANDIRIAN DESA



## Matriks Kewenangan Lokal Berskala Desa

CAKUPAN	BIDANG	PP 43/2014	PERMENDES NO.1/2015
Kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa	Pemerintahan Desa	a. Pengelolaan tambatan perahu b. Pengelolaan pasar desa c. Pengelolaan tempat pemandian umum	1) Penetapan organisasi Pemerintah Desa 2) Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa 3) Penetapan perangkat Desa 4) dll
	Pembangunan Desa	d. Pengelolaan jaringan irigasi e. Pengelolaan lingkungan pemukiman masyarakat desa f. Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu	1) Pelayanan dasar desa 2) Sarana dan prasarana 3) Membina kerukunan warga desa 4) Pengembangan ekonomi lokal desa 5) dll
	Keayarakatan Desa	g. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar h. Pengelolaan perpustakaan desa dan taman bacaan i. Pengelolaan air minum berskala desa j. Pembuatan jalan desa antar pemukiman ke wilayah pertanian	1) Membina keamanan, ketertibandan 2) ketentraman wilayah dan masyarakat 3) membina kerukunan warga desa 4)memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi 5) dll
	Pemberdayaan Masyarakat Desa		

## KEWENANGAN DESA

### BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

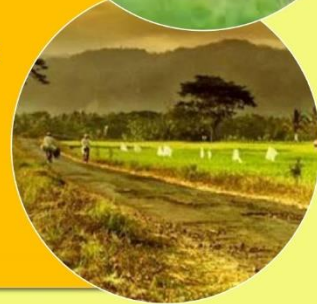
- 1 Menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa;
- 2 Menetapkan organisasi Pemerintah Desa;
- 3 Pengangkatan perangkat desa
- 4 Memfasilitasi pembentukan BPD;
- 5 Membuat Peraturan di Desa
- 6 Merencanakan, melaksanakan, pemantuan dan pengendalian pembangunan desa
- 7 Mengelola Keuangan Desa
- 8 Melakukan Pungutan Desa
- 9 Mengelola Aset Desa
- 10 Penyelenggaraan Administrasi dan Arsip Desa
- 11 Melakukan Kerjasama antar desa
- 12 Melakukan Kerjasama dengan pihak ketiga
- 13 Menetapkan batas desa
- 14 Penanggulangan kemiskinan
- 15 Penanggulangan bencana tingkat desa
- 16 Mengelola sistem informasi desa
- 17 Memberikan Rekomendasi



## KEWENANGAN DESA

### BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

- 1 Pertanian dan Ketahanan Pangan
  - a Pengembangan Kelembagaan Petani lokal
  - b Pengaturan pemanfaatan air pada tingkat usaha tani;
  - c Pengembangan lumbung pangan;
  - d fasilitas modal usaha tani;
  - e membantu penyediaan benih unggul;
  - f pengembangan kebun bibit hijauan pakan ternak;
  - g pemeliharaan irigasi desa;
- 2 Kehutanan dan Perkebunan
  - a Pengelolaan dan pelestarian hutan desa;
  - b penghijauan dan konservasi tanah yang terdiri dari kebun bibit desa
- 3 Perindustrian dan Perdagangan
  - a pengelolaan lalu lintas ternak yang ada dalam desa;
  - b pengelolaan pemasaran hasil industri Desa;
- 4 Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
  - a pengelolaan pasar desa dan tempat pelelangan ikan;
  - b pengelolaan kelompok usaha ekonomi produktif.
  - c Mendirikan dan Menguatkan BUMDes



## KEWENANGAN DESA

### BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

- 5 Tenaga Kerja dan Transmigrasi
  - a pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian;
  - b pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja;
  - c pendataan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan jenis pekerjaan dan status pekerjaan;
  - d pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri;
  - e pemberian surat rekomendasi bagi penduduk yang akan bekerja ke luar negeri.
  - h pelaksanaan penyuluhan tentang keluarga berencana;
  - i pengelolaan kelompok-kelompok bina keluarga.
- 6 Kesehatan
  - a penyuluhan sederhana tentang pemberantasan penyakit menular;
  - b fasilitasi pengelolaan posyandu;
  - c pengelolaan dana sehat;
  - d pengelolaan kegiatan tanaman obat keluarga (toga);
  - e penyelenggaraan upaya sarana kesehatan tingkat desa;
  - f penyelenggaraan upaya promosi kesehatan;
  - g pemantauan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di Desa
  - h pelaksanaan penyuluhan tentang keluarga berencana;
  - i pengelolaan kelompok-kelompok bina keluarga.



## KEWENANGAN DESA

### BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

- 7 Pendidikan dan Kebudayaan
  - a Penyelenggaranya kursus-kursus ketrampilan;
  - b penyelenggaraan pendidikan anak usia dini ( PAUD );
  - c pendataan warga buta huruf/aksara , Putus Sekolah dan Siswa Miskin.
  - d Bantuan Siswa Miskin
- 8 Sosial
  - a mengeluarkan surat keterangan miskin;
  - b Memfasilitasi pengurusan orang terlantar dan difabel;
  - c menggali, membina dan mengembangkan bermacam seni, upacara adat, dan adat istiadat yang berlaku di desa;
  - d pendataan penyandang masalah sosial dan potensi kesejahteraan sosial;
- 9 Penataan Ruang
  - a Penataan tata ruang desa
- 10 Permukiman/Perumahan
  - a pengaturan tata permukiman desa;
  - b pemberian bantuan pemugaran rumah RTM;
  - c memfasilitasi pembangunan rumah karena bencana



## KEWENANGAN DESA

### BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

- 11 Pekerjaan Umum
  - a pengelolaan dan pemanfaatan proyek Air Bersih yang ada dalam desa;
  - b pengelolaan dan pemeliharaan pompanisasi, jaringan irigasi Desa
  - c pengelolaan embung milik desa
  - d Perencanaan, Pembangunan, Pemanfaatan dan Perawatan jalan dan jembatan di desa;
  - e pengelolaan sumber daya air di desa;
  - f memfasilitasi pembangunan dan mengelola tempat Mandi, Cuci dan Kakus Komunal
  - g fasilitasi pembangunan MCK RTM
  - h Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa
  - i Pembangunan dan Pemeilharaan SPAL dan Drainase Desa
- 12 Lingkungan Hidup
  - a Pembangunan, pengelolaan dan perawatan penampungan air hujan;
  - b pemantauan terhadap perusakan lingkungan hidup di desa;
  - c pelarangan penangkapan ikan dengan bahan dan alat terlarang di perairan umum di wilayah desa.
  - d Pengaturan, pengendalian, pelestarian lingkungan dan tata guna lahan desa
- 13 Pariwisata
  - a pengelolaan obyek wisata milik desa;



## KEWENANGAN DESA

### BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

- 14 Pertanahan
  - a penetapan sasaran areal dan lokasi kegiatan pengembangan lahan;
  - b memberikan surat keterangan hak atas tanah;
  - c memfasilitasi penyelesaian sengketa tanah tingkat desa;
  - d penataan dan pemetaan Tata Guna Lahan.
- 15 Kependudukan dan Catatan Sipil
  - a Registrasi Penduduk dan surat keterangan kependudukan
- 16 Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
  - a Pengadaan sarana dan prasarana keamanan desa (Poskamling dll)
  - b pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
  - c pemantauan kewaspadaan dini terhadap terjadinya kejadian luar biasa
- 17 Informasi dan Komunikasi
  - a pengelolaan data dan informasi kebencanaan skala desa;
  - b sosialisasi berbagai kebijaksanaan desa
  - c pembinaan kelompok-kelompok komunikasi sosial;
  - d pengembangan jaringan informasi dan komunikasi desa dan antar desa;



## KEWENANGAN DESA

### BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

- 18 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
  - a Fasilitasi keikutsertaan RTM dalam program KB
  - b Penyuluhan KB
  - c Fasilitasi ketrampilan produktif bagi pra keluarga sejahtera
  - d penguatan kapasitas bagi penyandang masalah sosial
  - e fasilitasi bantuan pelayanan kesehatan bagi RTM
- 19 Pemuda dan Olahraga
  - a pengembangan sarana dan prasarana olahraga desa;
  - b peningkatan sumber daya manusia bidang olahraga;
  - c penyaluran pemuda berprestasi di bidang olahraga;
  - d memfasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda
  - e pemasyarakatan olah raga;
  - f penyelenggaraan olahraga tingkat desa;
  - g pengembangan sarana dan prasarana seni budaya bagi pemuda
- 20 Statistik
  - a penyusunan profil desa
  - b pendataan penduduk miskin
- 21 Arsip dan Perpustakaan
  - a Pengadaan dan pengelolaan Perpustakaan Desa;



## KEWENANGAN DESA

### BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA

- 1 Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- 2 Penguatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa
- 3 Fasilitasi Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Desa

## KEWENANGAN DESA

### BIDANG PEMEBERDAYAAN MASYARAKAT

- 1 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
  - a peningkatan keswadayaan dan kegotongroyongan masyarakat desa dalam pembangunan
  - b pembentukan dan penguatan kader pemberdayaan masyarakat
  - c pembentukan dan penguatan organisasi kemasyarakatan di desa
  - d peningkatan peran serta masyarakat dalam kebijakan pemerintahan
- 2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
  - a Pembentukan dan Fasilitasi komite perlindungan anak desa;
  - b Pembentukan dan peningkatan kapasitas kelompok perempuan
  - c Pemberdayaan masyarakat berbasis gender
  - d Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Anak

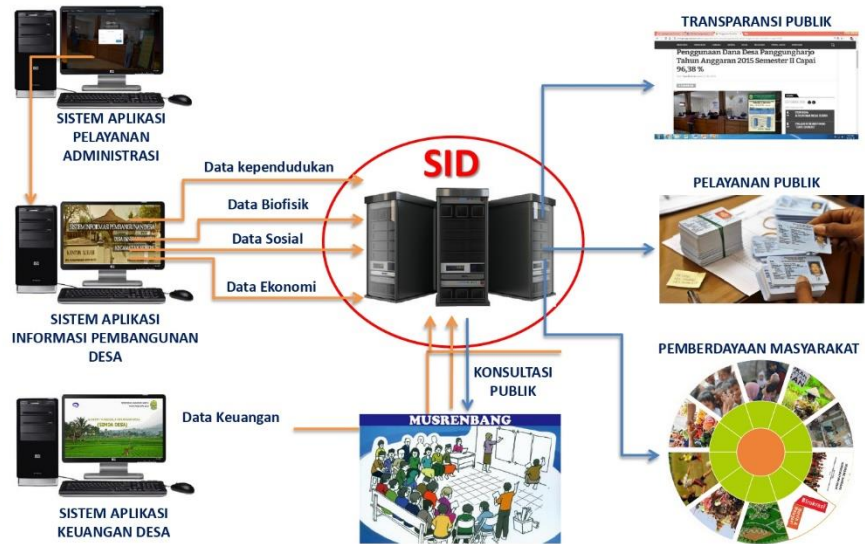


## KEMANDIRIAN DESA

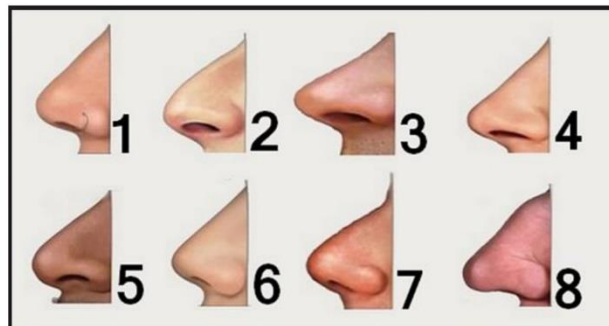




# PENGELOLAAN SISTEM DATA DAN INFORMASI



# Apa itu data

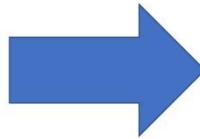


Data atau informasi?

#### Pengertian Data

Data bisa dibilang sebagai sebuah fakta yang belum diolah sehingga tidak bisa disajikan begitu saja ke publik atau pembaca. Data terkadang masih dalam bentuk potongan atau sepele kata yang jika dibaca orang awam tidak akan bisa dimengerti dengan mudah. Data bisa berupa angka, karakter, simbol, gambar, suara, dan tanda apapun yang bisa diolah menjadi informasi.

Diproses/diolah



#### Pengertian Informasi

Informasi adalah serangkaian data yang sudah diolah sehingga bisa disampaikan dan lebih mudah dimengerti oleh pembaca. Di dalam informasi terdapat sekumpulan data yang dirangkai dalam satu, dua, atau lebih kalimat.



- Merupakan fakta mentah yang sulit dipahami orang lain
- Tidak memiliki makna
- Berupa angka, huruf, simbol, fakta, rincian, dan hasil pengamatan dasar
- Lebih detail dan bersifat teknis.

- Mudah dipahami orang lain
- Terdiri dari kumpulan data yang sudah diolah dengan teknik dan gaya penulisan tertentu
- Bersifat menjelaskan sesuatu
- Bisa digunakan untuk mengambil keputusan.

Dalam penyusunan perencanaan pembangunan tidak lepas dari data sebagai persyaratannya, dalam hal ini desa sebagai sumber data merupakan :

- Wilayah administrasi terdepan;
- Desa sebagai sumberdata yang mewakili keadaan yang sebenarnya;
- Sumber data yang valid dan akurat;
- Semuanya terangkum dalam profil desa;

**Persoalan-persoalan apa saya yang dihadapi desa bapak/ibu terkait data?**

Realita di desa, saat ini adalah banyak memiliki data namun belum dikelola dengan baik, sumber daya manusia yang terbatas, pembangunan sarana prasarana lebih banyak focus pada fisik bangunan.

Sedangkan infrastruktur TIK sangat kurang, beban kerja berbanding terbalik dengan reward serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa kurang. Sehingga menimbulkan masalah bagi desa, antara lain :

- Kemiskinan
- Desa kurang berkembang
- Pembangunan yang tidak sesuai kebutuhan desa karena data yang kurang akurat

Dari realita di atas, apa solusi yang bisa dimungkinkan di desa?

## Sistem informasi Desa

Keadaan yang diinginkan, dengan dibangunnya SID bertujuan ingin mewujudkan *single data* untuk menunjang perencanaan pembangunan, sehingga :

1. Basis data pembangunan yang akurat, terpusat dan terintegrasi;
2. Menghasilkan analisis kebijakan pembangunan yang tepat;
3. Perencanaan pembangunan yang terukur dan komprehensif;
4. Mewujudkan monitoring dan evaluasi yang dapat dipertanggungjawabkan;
5. Informasi pembangunan yang akurat

PENGANTAR  
**TRANSFORMASI BUMK  
PASKA PP.11/ 2021**



Sanggar Inovasi Desa @sanggardesa www.sanggarinovasidesa.id

**PERUBAHAN PARADIGMA PEMBANGUNAN DESA: DESA SEBAGAI SUBYEK UTAMA PEMBANGUNAN**

**DESA LAMA** Objek Pembangunan

**DESA BARU** Subyek Pembangunan: Partisipatoris

**PERTAMA, PEMBERIAN KEWENANGAN BERDASARKAN AZAS REKOGNISI DAN SUBSIDIARITAS.**  
Rekognisi berarti pengakuan dan penghormatan terhadap keberadaan (eksistensi) desa. Sedangkan subsidiaritas berarti penggunaan kewenangan skala lokal.

**KEDUA, KEDUDUKAN DESA SEBAGAI PEMERINTAHAN BERBASIS MASYARAKAT,** yaitu campuran dari komunitas yang mengatur dirinya sendiri (self governing community) dan pemerintahan lokal (local self government).

REDISTRIB USI ASET

REKOGNISI KEWENANGAN

KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DALAM SEMULA ASPEK

KEMANDIRIAN DESA

TANTANGAN KEDEPAN

1. "KEKANGAN" PENGGUNAAN ADD & DD
2. DINAMIKA KEBIJAKAN PASKA 2024
3. PADES MERUPAKAN POS PALING FLEKSIBEL

BAGAIMANA KITA HARUS MENYIKAPI ?

Sanggar Inovasi Desa @sanggardesa www.sanggarinovasidesa.id



## INILAH MOMENTUMNYA !!



### DALAM KONTEKS GLOBAL

- PANDEMI MEMBAWA DAMPAK HAMPIR PADA SELURUH SEKTOR
- KOLABORASI – *ECONOMIC OF SHARING* – SOLIDARITAS MEJADI *VALUE* YANG TERUS MENGUAT

### DALAM KONTEKS NASIONAL

- UU DESA MERUBAH RELASI ANTARA NEGARA – DESA
- TRANSFORMASI BUMDES SEBAGAI BADAN HUKUM MEMBUKA PELUANG SEKALIGUS TANTANGAN

### DALAM KONTEKS LOKAL

- RAGAM KARAKTERISTIK DESA MEMBAWA RAGAM POTENSI
- DESA SEBAGAI BASIS PRODUKSI SEKALIGUS BASIS KONSUMSI

- ✓ BUMDES ADALAH SALAH SATU STRATEGI TERBAIK MENINGKATKAN PADES
- ✓ BUMDES SEBAGAI BENTENG PERLINDUNGAN ATAS PRIVATISASI BARANG PUBLIK DESA
- ✓ BUMDES SEBAGAI DINAMISATOR EKONOMI DESA, MEMBERI DAMPAK EKONOMIS BAGI MASYARAKAT

Sanggar Inovasi Desa

@sanggardesa

[www.sanggarinovasidesa.id](http://www.sanggarinovasidesa.id)

## LANDASAN

### YURIDIS DAN HUKUM BUM DESA PASCA UU CIPTA KERJA - TATA KELOLA BUM DESA PASCA PP 11/2021

#### UU 11/2020 PASAL 117 ANGKA 1

BADAN USAHA MILIK DESA SELANJUTNYA DISEBUT BUM DESA, ADALAH BADAN HUKUM YANG DIDIRIKAN OLEH **DESA** DAN/ATAU BERSAMA SAMA DESA GUNA MENGELOLA USAHA, MEMANFAATKAN ASET, MENGEMBANGKAN INVESTASI DAN PRODUKTIFITAS, MENYEDIKAN JASA PELAYANAN DAN/ATAU MENYEDIKAN JENIS USAHA LAINNYA UNTUK SEBESAR BESARNYA **KESEJAHTERAAN** MASYARAKAT DESA



### PP 11/2021 TENTANG BUM DESA

Sanggar Inovasi Desa

@sanggardesa

[www.sanggarinovasidesa.id](http://www.sanggarinovasidesa.id)

## LANDASAN FILOSOFIS

### PERSPEKTIF EKONOMI

**BADAN USAHA MILIK DESA** - entitas ekonomi yang oleh karena perilakunya harus bisa dipahami dari perspektif bisnis.  
**Basis pendekatannya – Entrepreneurship**  
**Ukuran keberhasilannya – Profit/keuntungan**



### PERSPEKTIF SOSIAL

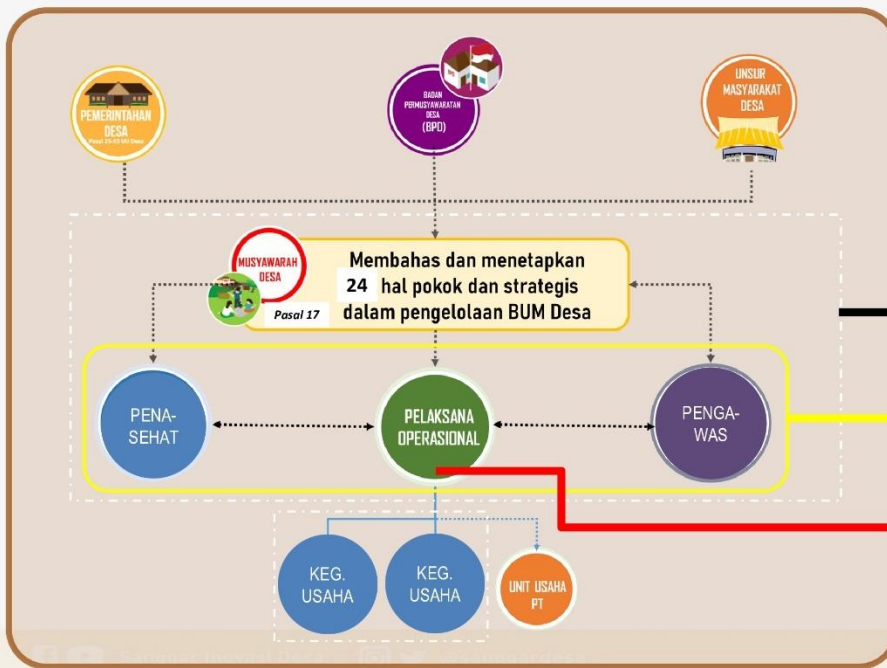
**BADAN USAHA MILIK DESA** – meskipun merupakan badan usaha, tetapi milik desa sehingga pada waktu yang sama BUM Desa juga merupakan entitas sosial, yang oleh karena perilakunya harus juga bisa dipahami dari perspektif sosial  
**Basis pendekatannya – social perspektif**  
**Ukuran keberhasilannya – Benefit /kemanfaatan**



### PERSPEKTIF POLITIK

**BADAN USAHA MILIK DESA** – merupakan lembaga yang didirikan oleh Desa dalam rangka untuk menjalankan sebagian kewenangan pemerintah desa, sehingga pada batasannya BUM Desa merupakan entitas politik, yang oleh karena perilakunya harus mencerminkan perilaku negara, sehingga BUM Desa harus menjadi alat politik setidaknya untuk dua hal

- Menjadi alat politik bagi pemerintah desa untuk mendidik warga negara
- Menjadi alat politik untuk mewujudkan desa sebagai arena demokratisasi ekonomi lokal.



## TATA KELOLA BUM DESA

PP 11/2021 TENTANG BUM DESA

MENJALANKAN FUNGSI PENGELOLAAN

MENJALANKAN FUNGSI PENGURUSAN

MENJALANKAN FUNGSI PELAKSANA OPERASIONAL

## 2 FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN BUMDES

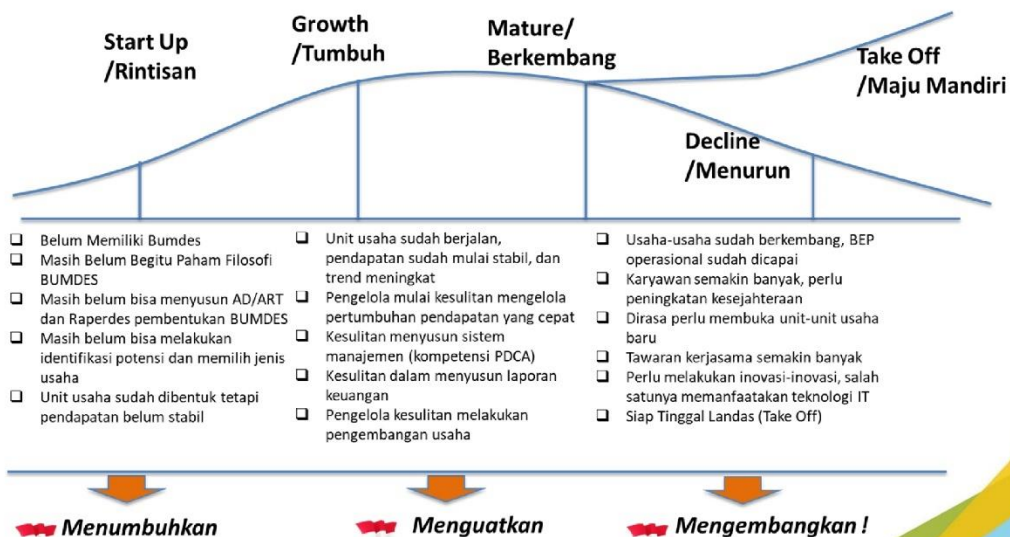
### ▪ KUALITAS MUSYAWARAH DESA

- DESAIN KELEMBAGAAN BUM Desa
- RENCANA USAHA BUM Desa

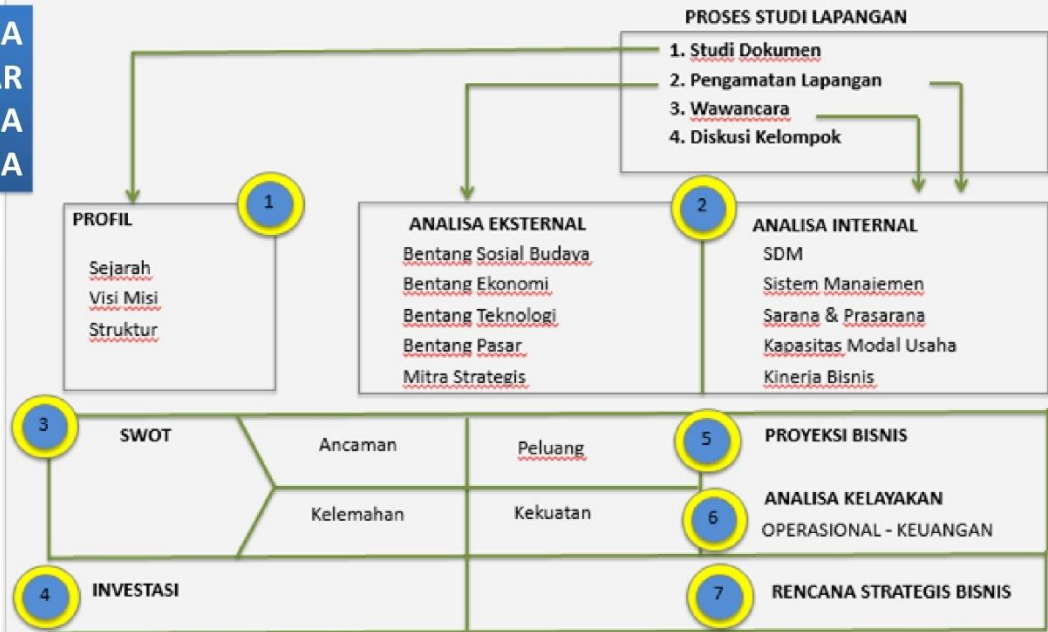
### ▪ KAPASITAS DIREKTUR BUMDES

- SUBYEK HUKUM YANG MEWAKILI BUM Desa - BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA BUM Desa
- MENSYARATKAN 5 KAPASITAS DASAR - KOMPETENSI LEADERSHIP - ENTREPRENEURSHIP

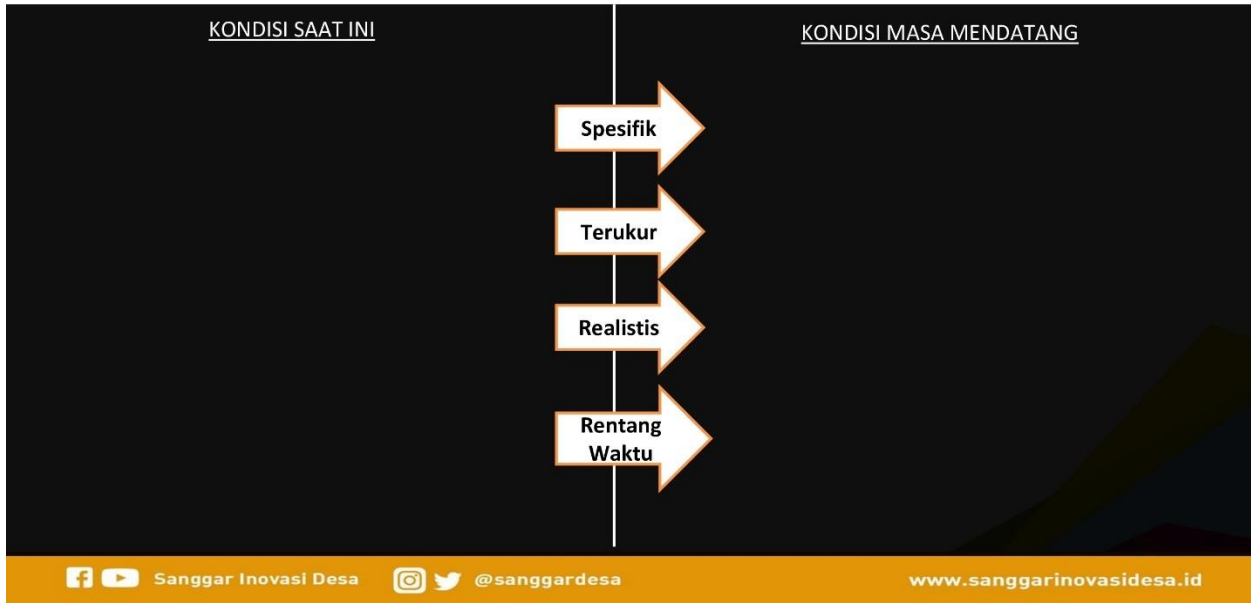
## POSISI ANDA DIMANA?



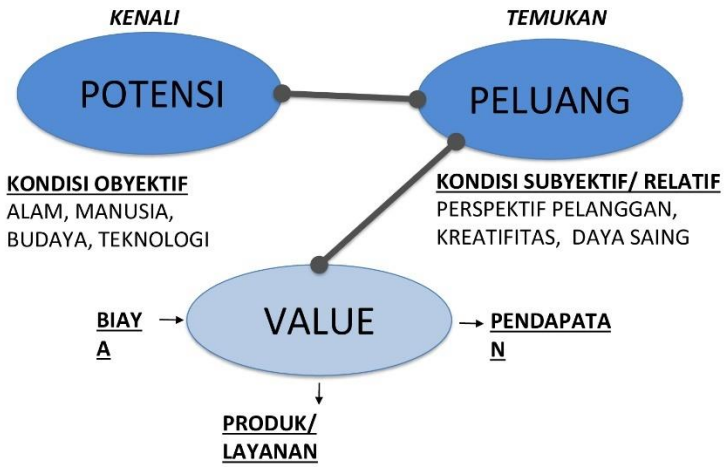
# KERANGKA DASAR RENCANA USAHA



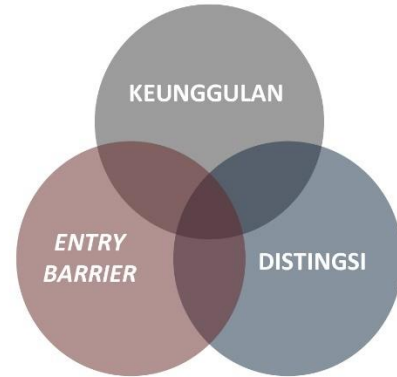
## Semua bermula dari Mimpi



## CREATING VALUE ≠ CREATING PRODUCT



## VALUE MAP



# TRANSFORMASI BUMK PASKA PP.11/ 2021: LEGALITAS DAN TATA KELOLA



PEJUANG  
SYGAP  
SEJAHTERA

Konservasi  
Alam Nusantara  
Untuk Indonesia Lestari



Sanggar  
Inovasi Desa

Sanggar Inovasi Desa

@sanggardesa

[www.sanggarinovasidesa.id](http://www.sanggarinovasidesa.id)

## Dasar Hukum



1. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
2. UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
3. PP No. 11 Tahun 2021 tentang BUMDesa
4. Permendes PDPT 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa BUMDesa/BUM Desa Bersama

Sanggar Inovasi Desa

@sanggardesa

[www.sanggarinovasidesa.id](http://www.sanggarinovasidesa.id)

# BUMK dalam PP 11/2021

## Kegiatan Usaha dan Unit Usaha BUM Desa

Sebagai Badan Hukum, BUM Desa bisa langsung menjalankan usahanya (Operating Company) maupun menjadi induk bagi unit usaha berbadan hukum (Investment Company)

### Organisasi BUM Desa

Organisasi BUM Desa terpisah dari Pemerintah Desa, terdiri atas: (1) Musyawarah Desa/MAD; (2) Penasihat; (3) Pelaksana Operasional; dan (4) Pengawas. Telah ditentukan wewenang dan tugas masing-masing organ dengan lebih terperinci.



### Pendataan, Pembinaan dan Pengembangan, serta Peningkatan BUM Desa

memastikan *treatment* yang sesuai dengan kebutuhan BUM Desa yang selama ini ada, tapi belum terfasilitasi dengan baik.

### MODAL DAN ASET BUM Desa

Terkait dengan kejelasan penyertaan modal Desa berupa barang selain tanah dan bangunan yang dipindahtangankan menjadi aset BUM Desa. Tanah dan bangunan tetap bisa diambil manfaat ekonominya oleh BUM Desa melalui skema kerja sama usaha.

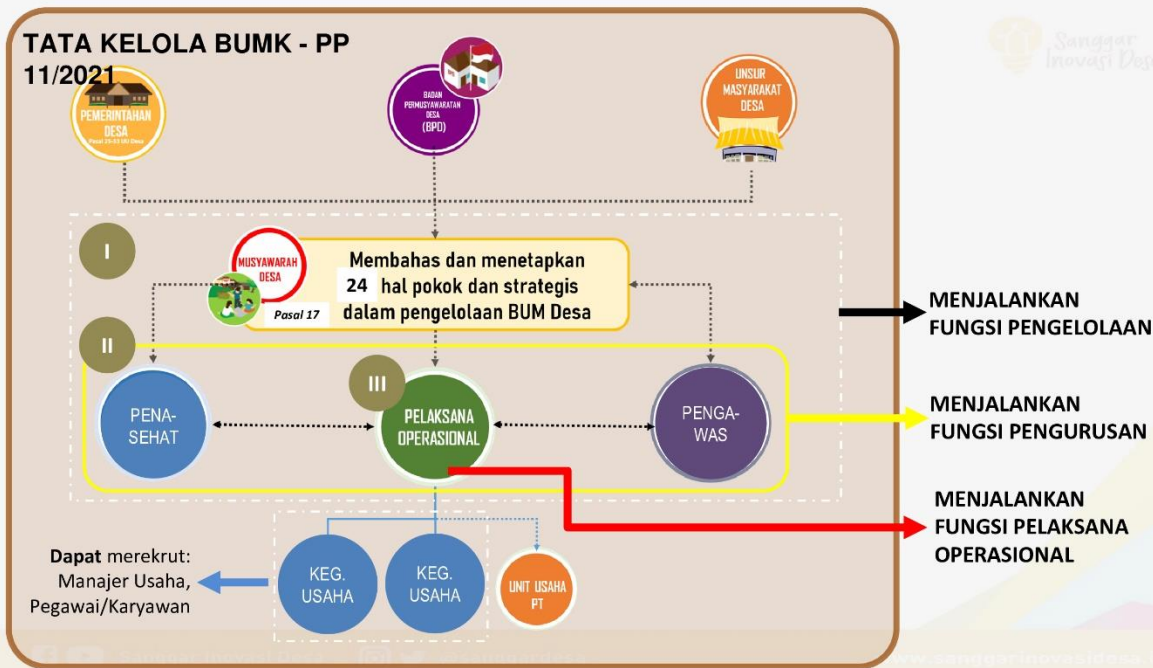
## Siapa Institusi BUMK?

Institusi BUMK adalah **KESATUAN 4 PELAKU** utama:

1. Musyawarah Kampung
2. Penasehat
3. Pelaksana Operasional
4. Pengawas

# HAL-HAL KRUSIAL DALAM ORGANISASI BUMK

1. Muskam adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam **pengelolaan** BUMK, dalam pengambilan keputusan strategis
2. Direktur tidak bertanggungjawab kepada Kepala Kampung (dalam posisi Kepala Kampung sebagai kepala pemerintahan kampung).
3. Penasehat, Direktur, dan Pengawas adalah **satu kesatuan** dalam **pengurusan** BUMK, namun dibedakan fungsinya. **Kolaborasi** ketiganya adalah penentu kesatuan langkah BUMK.
4. Kepala Kampung adalah **1 tubuh dengan 2 kedudukan dan fungsi**, yaitu:
  - a. Kepala Pemerintahan Kampung: bertanggungjawab mengurus kepentingan kampung dan masyarakat kampung terhadap BUMK
  - b. Penasehat BUMK: bertanggungjawab agar BUMK dapat mengurus bisnis dengan baik.
5. Dengan demikian, posisi kepala kampung sebagai penasehat sangat strategis, dan harus menjadi mitra strategis dari Direktur.
6. Pengawas sangat strategis memerankan fungsi agar SISTEM KONTROL INTERNAL (internal control system – ICS) berjalan baik di BUMK.



## Wewenang Muskam (1) (PP 11/2021, Ps. 17)



1. menetapkan pendirian BUM Desa/ BUM Desa bersama;
2. menetapkan Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama dan perubahannya;
3. membahas dan memutuskan jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak penerima kuasa fungsi kepenasihatatan pada BUM Desa.:
4. membahas dan menyepakati penataan dan pergiliran penasihat BUM Desa bersama;
5. mengangkat dan memberhentikan secara tetap pelaksana operasional BUM Desa/BUM Desa bersama;
6. mengangkat pengawas BUM Desa/BUM Desa bersama;
7. mengangkat sekretaris dan bendahara BUM Desa/BUM Desa bersama
8. memberikan persetujuan atas penyertaan modal pada BUM Desa/BUM Desa bersama;



Sanggar Inovasi Desa



@sanggardesa

www.sanggarinovasidesa.id

## Wewenang Muskam (2)



9. memberikan persetujuan atas rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional setelah ditelaah pengawas dan penasihat;
10. memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa/BUM Desa bersama dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama:
11. memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa/BIJM Desa bersama dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama;
12. menetapkan pembagian besaran laba bersih BUM Desa/BUM Desa bersama;
13. menetapkan tujuan penggunaan laba bersih BUM Desa/BUM Desa bersama;
14. memutuskan penugasan Desa kepada BUM Desa/ BUM Desa bersama untuk melaksanakan kegiatan tertentu;
15. memutuskan penutupan Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama;
16. menetapkan prioritas penggunaan pembagian hasil Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama dan/atau Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama yang diserahkan kepada Desa;



Sanggar Inovasi Desa



@sanggardesa

www.sanggarinovasidesa.id

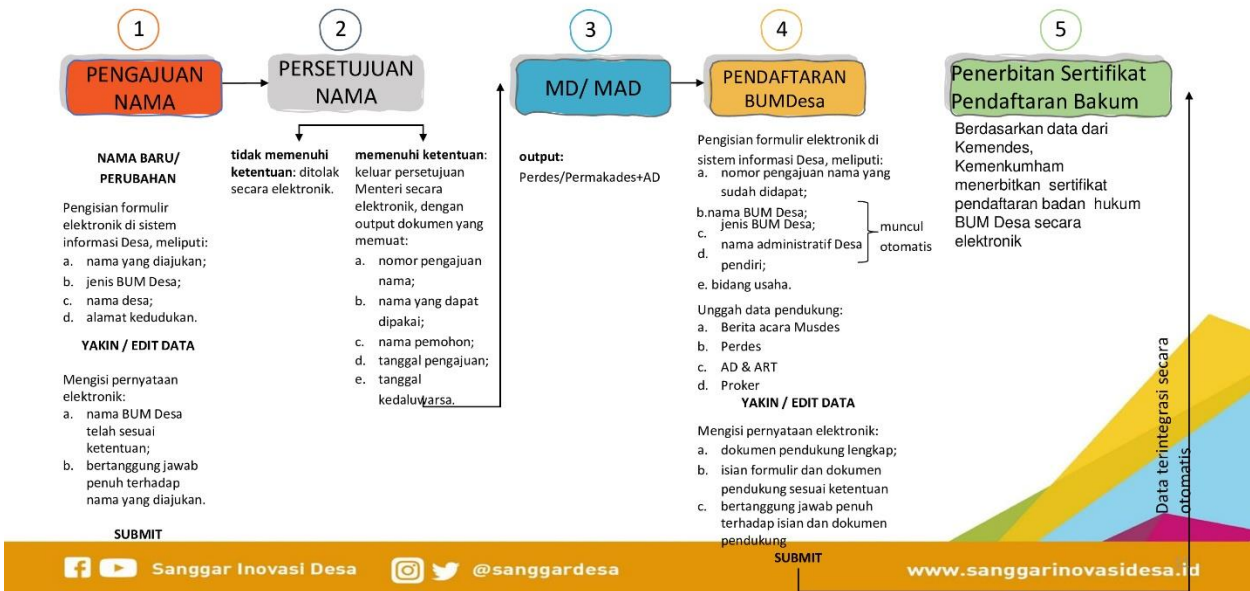
# Wewenang Muskam (3)

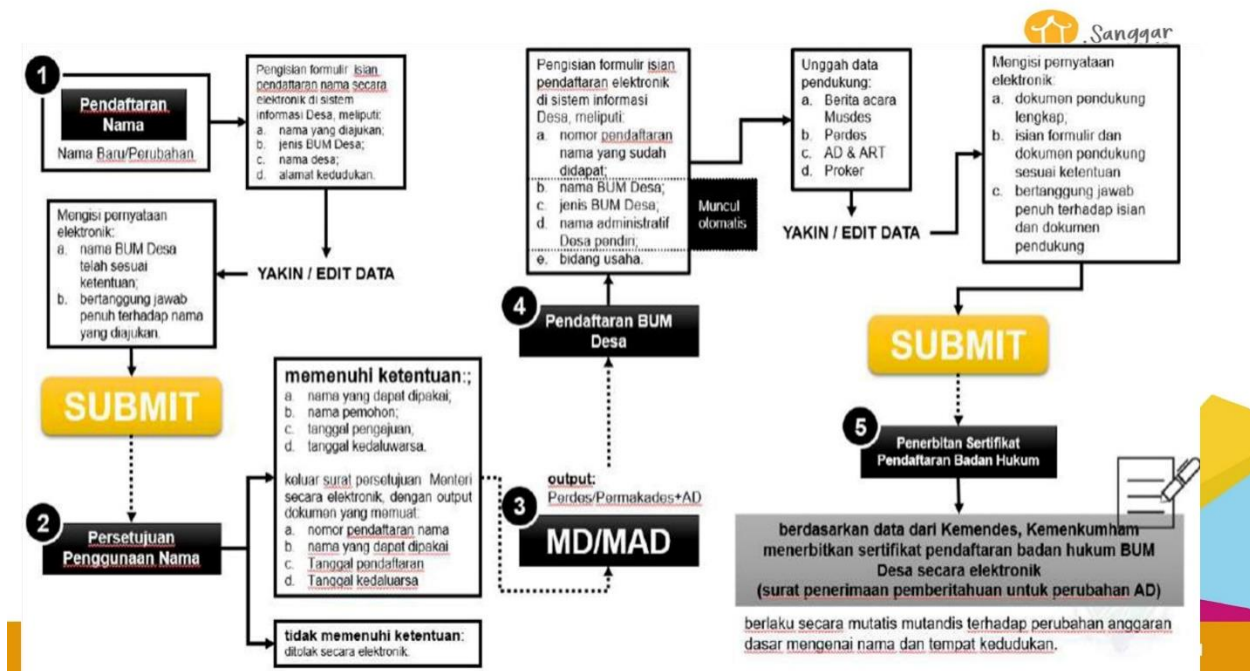


17. menerima laporan tahunan BUM Desa/BUM Desa bersama dan menyatakan pembebasan tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
18. membahas dan memutuskan penutupan kerugian BUM Desa/BUM Desa bersama dengan Aset BUM Desa/BUM Desa bersama;
19. membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas dalam hal terjadi kerugian BUM Desa/BUM Desa bersama yang diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian;
20. memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum dalam hal penasihat, pelaksana operasional, dan atau pengawas tidak menunjukkan iktikad baik melaksanakan pertanggungjawaban;
21. memutuskan penghentian seluruh kegiatan operasional BUM Desa/BUM Desa bersama karena keadaan tertentu;
22. menunjuk penyelesaian dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama;
23. meminta dan menerima pertanggungjawaban penyelesaian; dan
24. memerintahkan pengawas atau menunjuk auditor independen untuk melakukan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama.

## ALUR PENDAFTARAN BADAN HUKUM BUM DESA

(BERDASARKAN PP 11 TAHUN 2021 DAN RAPERMEN DESA PD TT TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PEMBINAAN BUM DESA)





## Kelengkapan Dokumen Legalitas



- Perkam Pendirian/penyesuaian kelembagaan BUMK (Pendirian dan AD/Perubahan AD)
- Berita Acara Muskam
- Perkam ART BUMK
- Program Kerja BUMK



Sanggar Inovasi Desa



@sanggardesa

www.sanggarinovasidesa.id

# AD dan ART

- **Anggaran Dasar (AD)** adalah **peraturan pokok** yang menjadi dasar bagi peraturan lainnya bagi suatu organisasi (perusahaan, yayasan, perkumpulan, termasuk Bumdes).
- **Anggaran Rumah Tangga (ART)** adalah peraturan pelaksanaan dari Anggaran Dasar bagi suatu organisasi (perusahaan, perkumpulan, termasuk Bumdes).
- AD dan ART digunakan oleh organisasi (perusahaan, yayasan, perkumpulan, termasuk Bumdes) sebagai aturan main, untuk:
  - **Pedoman menjalankan pengurusan/menjalankan kegiatan** organisasi
  - **Mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan internal** organisasi.
- AD dan ART adalah **produk hukum** (sehingga mengikat internal organisasi pembuatnya) dan diakui legalitasnya oleh Negara (setelah didaftarkan sebagai badan hukum)
- Meski produk hukum, AD dan ART bukan peraturan perundang-undangan yang bersifat mengatur/berlaku/mengikat secara umum atau eksternal.

## Lingkup AD

- Paling sedikit memuat:
  - a. nama;
  - b. tempat kedudukan;
  - c. maksud dan tujuan pendirian;
  - d. modal;
  - e. jenis usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
  - f. nama dan jumlah penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
  - g. hak, kewajiban, tugas, tanggung jawab dan wewenang serta tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian penasihat, pelaksana-operasional, dan/atau pengawas; dan
  - h. ketentuan pokok penggunaan dan pembagian dan/atau pelaksanaan dan pemanfaatan hasil usaha.

## Lingkup ART

- Paling sedikit memuat:
  - a. hak dan kewajiban pegawai BUM Desa;
  - b. tata cara rekrutmen dan pemberhentian pegawai BUM Desa;
  - c. sistem dan besaran gaji pegawai BUM Desa
  - d. tata laksana kerja atau standar operasional prosedur; dan
  - e. penjabaran terperinci Anggaran Dasar BUM Desa.

## Rencana Program Kerja (Ps. 38, PP 11/2021)

- Rencana program kerja BUM Kampung sebagaimana dimaksud dalam paling sedikit memuat:
  - a. sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan, dan program kerja/kegiatan BUM Kampung;
  - b. anggaran BUM Kampung yang dirinci atas setiap anggaran program kerja/kegiatan; dan
  - c. hal lain yang memerlukan keputusan Musyawarah Desa.



## 8.3 MATERI KELAS BELAJAR 2

### 8.3.1 Materi Pemkam

# AKADEMI Kampung SYGAP



Konservasi  
Alam Nusantara  
Untuk Indonesia Lestari



Sanggar  
Inovasi Desa



## KELAS BELAJAR #2

No	Materi	Sub-Materi	Output
1	Pengelolaan Data Desa (1)	Data sebagai aset strategis	1. Peserta paham terkait pentingnya data untuk pembangunan desa 2. Peserta mampu memetakan data-data yang dimiliki dan data yang dibutuhkan terkait dengan rencana pembangunan
		Mengidentifikasi data desa	
		Pemetaan dan elaborasi data desa	
2	Pengelolaan Data Desa (2)	Pengkayaan Database	1. Peserta mampu melakukan <i>updating</i> database desa 2. Peserta mampu melakukan analisis terhadap data-data yang dimiliki
		Pengantar Analisis Data	
		Teknis Analisis Data	
3	Pengelolaan Media Desa (1)	Pengantar Jurnalisme	1. Peserta memahami prinsip-prinsip dalam penulisan berita 2. Peserta memahami teknik-teknik
		Prinsip-prinsip penulisan berita	
		Teknik penulisan berita	
4	Pengelolaan Media Desa (2)	Teknik pengambilan gambar	menulis dan mengambil gambar dalam pembuatan berita 1. Peserta mampu membuat berita 2. Peserta mampu mengelola website
		Praktik pembuatan berita	
		Praktik mengunggah berita ke website	

## Berita (News)

- Berita merupakan produk utama jurnalistik.
- Berita adalah laporan, cerita, atau keterangan tentang suatu peristiwa aktual dan penting, keadaan tertentu, ataupun gagasan, pikiran, atau perasaan manusia (misal : tanggapan masyarakat terhadap suatu masalah).

## Jenis Berita (1)

- Straight News (Berita Langsung)
  - Berita yang ditulis secara singkat, padat, dan lugas. Umumnya, straight news adalah berita tentang peristiwa tertentu.
  - *Hard News* adalah berita keras, serius, hangat, heboh, kadang menegangkan, mengerikan, mengagetkan, seperti berita politik atau bencana.
  - *Soft News* adalah berita ringan, tidak terlalu serius, seperti berita selebritas, info artis, kabar dari dunia hiburan, wisata, peluncuran produk baru.
- Opinion News (Berita Opini):
  - Berita yang berisi pendapat, analisis, komentar, atau pernyataan seseorang tentang sebuah peristiwa atau isu aktual.
  - *Berita opini* itu “melaporkan ucapan seseorang” yang bernilai berita.
- Interpretative News (Berita Interpretasi)
  - berita yang dikembangkan dengan pendapat atau penelitian yang dilakukan oleh wartawan.
  - Jenis berita ini adalah pengembangan berita langsung yang ditambah atau dilengkapi dengan berbagai informasi yang mendukung isu tersebut. Misalnya, berita kebakaran hutan dilengkapi dengan komentar pakar lingkungan dan masyarakat.

## Jenis Berita (2)

- **Depth news (Berita Mendalam)/Depth Reporting**
  - berita yang lebih lengkap dan lebih detail, dikembangkan dengan menggali fakta atau data baru dengan penekan unsur *why* dan *how*.
  - Biasanya, menjelaskan mengapa peristiwa tersebut bisa terjadi, bagaimana dampaknya, dan apa yang harus dilakukan.
  - Depth news juga merupakan pengembangan dari berita lama yang “belum selesai” dan dinilai perlu ditindaklanjuti dengan mendapat info baru. Misalnya, dengan cara mewawancarai berbagai pihak yang terkait dengan berita lama tersebut).
- **Investigation news (Berita Investigasi)**
  - Lebih lengkap dan mendalam dari depth news. Berita dikembangkan berdasarkan penelitian atau penyelidikan yang dilakukan dari berbagai sumber.
  - Berita investigasi ditulis berdasarkan penyelidikan. Data – data dicari atau diperoleh dari berbagai sumber.
  - Biasanya berita investigasi mengungkap peristiwa yang misterius atau penuh teka-teki karena banyaknya fakta yang tidak terungkap atau ditutupi.

## Nilai Berita (News Values, *newsworthy*)

- **Berita berawal dari peristiwa/kejadian. Tidak semua peristiwa layak dijadikan berita.**
- **Nilai berita (1): CEPAT, NYATA, MENARIK**
  - **Magnitude.** Seberapa luas pengaruh suatu peristiwa bagi masyarakat luas. Misal, kenaikan harga minyak goreng.
  - **Significance.** Seberapa penting arti suatu peristiwa bagi publik. Misal, wabah penyakit.
  - **Actuality/Timeliness.** Tingkat aktualitas peristiwa. Misal, peristiwa semenit, sejam, atau maksimal sehari lalu.
  - **Proximity.** Kedekatan secara geografis atau psikologis. Misal, banjir di Kelay menarik bagi warga Berau.
  - **Prominence.** Ketokohan orang yang terlibat dalam peristiwa. Misal, capres mencangkul di sawah.
  - **Dampak (impact).** Seberapa dampaknya terhadap orang banyak.
  - **Konflik.** Peristiwa ketegangan, perang
  - **Human Interest.** Menyentuh perasaan kemanusiaan.
  - **Keanehan (Unusualness).** Hal yang unik, tidak lazim.

## Unsur Berita: 5W 1 H



- **What** = Apa yang terjadi, peristiwa apa, acara apa, kejadian apa?
- **Where** = Di mana hal itu terjadi, lokasi, tempat, TKP di mana?
- **When** = Kapan peristiwa itu terjadi, waktu kejadian, hari tanggal dan jika perlu jamnya?
- **Who** = Siapa yang terlibat dalam kejadian itu, siapa pelakunya, siapa korbannya, siapa saksi, siapa yang melakukan?
- **Why** = Kenapa hal itu terjadi, latar belakang, tujuan, penyebab, pemicu.
- **How** = Bagaimana peristiwa itu terjadi, proses, detail kejadian, kronologis, suasana acara.
- Rumus 5W1H biasa digunakan secara ketat dalam penulisan berita langsung (*straight news*).

5 W + 1 H	Rincian	Materi Tulisan - Keterangan
<b>What</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apa tema yang ingin ditulis?</li> <li>• Apa saja hal-hal yang ingin dituangkan dalam tulisan.</li> </ul>	Penjelasan tentang isu sub bidang kegiatan program: infra, pendidikan, kesehatan, gender, dll.
<b>Who</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Siapa yang menjadi tokoh utama?</li> <li>• Siapa narasumber pendukung untuk memperkaya cerita?</li> </ul>	Penyebutan sumber dengan jelas baik dari: pelaku, pihak yang terlibat, masyarakat umum, <i>stakeholder</i> , fasilitator, dll.
<b>When</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kapan kegiatan itu terjadi?</li> <li>• Mulai kapan kegiatan itu dilaksanakan?</li> </ul>	Keterangan waktu yang bisa digunakan adalah: tahun, bulan, dan hari. Dengan adanya keterangan waktu, pembaca bisa mendapatkan gambaran tentang proses yang berjalan dalam kurun waktu tersebut yakni sebelum dan setelah kegiatan dilaksanakan.

<b>Where</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimana lokasi kegiatannya?</li> <li>• Bagaimana gambaran lokasi kegiatannya?</li> </ul>	Dalam menjelaskan lokasi kegiatan ini bisa ditambahkan keterangan tentang sejarah, budaya, adat istiadat, maupun hal lain di lokasi kegiatan
<b>Why</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengapa terjadi <i>what</i>?</li> <li>• Apa alasan dilakukannya kegiatan tersebut?</li> </ul>	Pemaparan tentang WHY ini merupakan materi yang paling menarik karena bisa dikupas dari berbagai sudut pandang
<b>How</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bagaimana <i>what</i> bisa terjadi?</li> <li>• Bagaimana proses kegiatan itu terjadi?</li> </ul>	<p>□□ Berisi penjelasan tentang alur, proses serta mekanisme kegiatan.</p> <p>□□ Jelaskan proses dari awal sampai dengan hasil akhir yang diperoleh.</p>

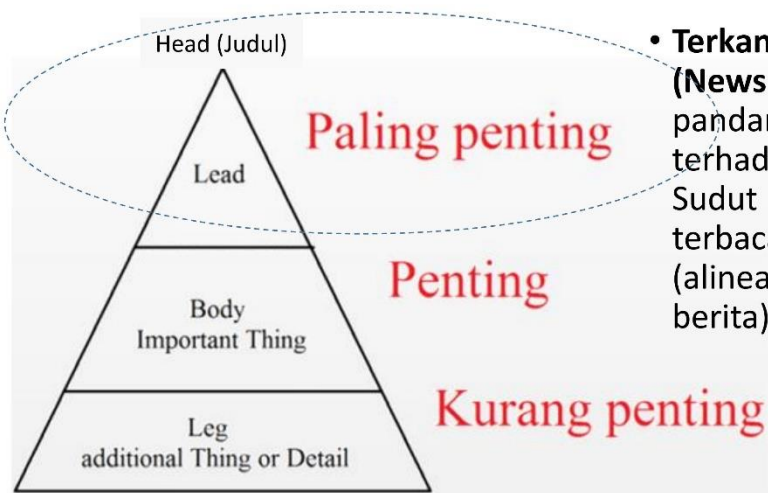
## Kode Etik Menulis Berita

- **Jangan campuradukkan fakta dan opini!**
- Faktual. Nyata terjadi, benar terjadi, tidak bohong, bukan karangan, bukan *hoax*.
- Akurat. Pastikan kebenarannya. Lakukan verifikasi, konfirmasi, cek dan cek ulang (*check and recheck*).
- Berimbang. Cover both side, balance, jika memberitakan dua pihak yang berselisih atau berseteru.
- Hindari Opini. Jangan beropini dalam menulis berita. Laporkan saja “apa adanya”, tanpa tambahan opini subjektif pribadi.

## Teknik Mencari Berita

- Melihat, mendatangi secara langsung peristiwa atau fakta seperti :
  - Mendatangi lokasi peristiwa
  - Menghadiri seminar, symposium atau keterangan pers
  - Mengembangkan data atau fakta yang didapat
  - Mewawancarai narasumber
  - Melakukan pengumpulan dan penambahan data melalui internet atau perpustakaan
  - Press release

## Struktur Berita: Straight News



- **Terkandung Angle Berita (News Angle)** → sudut pandang (*point of view*) terhadap sebuah peristiwa. Sudut pandang umumnya terbaca dari *head* dan *lead* (alinea pertama naskah berita).

## Teknik Penulisan Berita

- Temukan masalah (pahami bahwa ada masalah)
- Kumpulkan bahan fakta dan data pendukung
- Seleksi bahan
- Tentukan tema pokok/ide cerita
- Tentukan urutan logis (judul, lead, badan berita, dan penutup (ending)).
  - Judul: 2-5 kata yang disajikan secara ringkas serta mengasosiasikan dengan sesuatu yang langsung bisa diingat atau menarik minat pembaca.
  - Lead: 2 kalimat hingga 3 kalimat yang mengintisarikan berita atau artikel sehingga dengan membaca lead, pembaca menarik untuk membacanya.
  - Badan berita: sajian secara lengkap dari bahan yang akan ditulis.
  - Leg atau ending (penutup)

## Tugas

- Tulislah artikel berita straight news (hard atau soft) tentang kampung Anda (300 kata/1 halaman)
- Buat foto berita beserta berita foto (1 – 2 paragraf)

# AKADEMI Kampung SYGAP



PEJUANG  
**SYGAP**  
SEJAHTERA

Konservasi  
Alam Nusantara  
Untuk Indonesia Lestari



Sanggar  
Inovasi Desa



## KELAS BELAJAR #2

No	Materi	Sub-Materi	Output
1	Pengelolaan Data Desa (1)	Data sebagai aset strategis	1. Peserta paham terkait pentingnya data untuk pembangunan desa 2. Peserta mampu memetakan data-data yang dimiliki dan data yang dibutuhkan terkait dengan rencana pembangunan
		Mengidentifikasi data desa	
		Pemetaan dan elaborasi data desa	
2	Pengelolaan Data Desa (2)	Pengkayaan Database	1. Peserta mampu melakukan <i>updating</i> database desa 2. Peserta mampu melakukan analisis terhadap data-data yang dimiliki
		Pengantar Analisis Data	
		Teknis Analisis Data	
3	Pengelolaan Media Desa (1)	Pengantar Jurnalisme	1. Peserta memahami prinsip-prinsip dalam penulisan berita 2. Peserta memahami teknik-teknik
		Prinsip-prinsip penulisan berita	
		Teknik penulisan berita	
4	Pengelolaan Media Desa (2)	Teknik pengambilan gambar	menulis dan mengambil gambar dalam pembuatan berita 1. Peserta mampu membuat berita 2. Peserta mampu mengelola website
		Praktik pembuatan berita	
		Praktik mengunggah berita ke website	

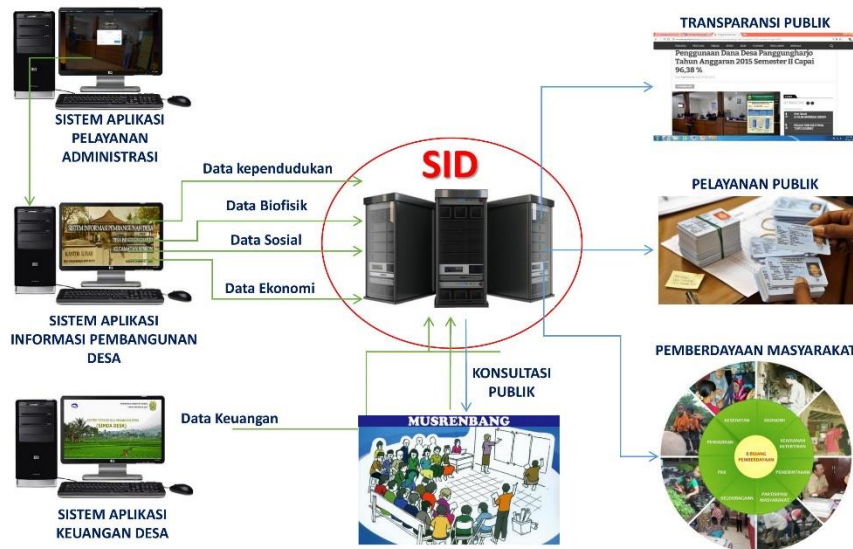
- Review kelas belajar #1
- Refresh lingkup data dan informasi kampung
- Data dan Kebijakan
- Jenis Data
- Mengenali jenis-jenis data di kampung

Pemanfaatan SIK bertujuan untuk mewujudkan data center untuk menunjang kebijakan pembangunan kampung, sehingga :

1. Basis data pembangunan yang akurat, terpusat dan terintegrasi;
2. Menghasilkan analisis kebijakan pembangunan yang tepat;
3. Perencanaan pembangunan yang terukur dan komprehensif;
4. Mewujudkan monitoring dan evaluasi yang dapat dipertanggungjawabkan;
5. Informasi pembangunan yang akurat



## PILAR DATA DAN INFORMASI DESA



- Efektif dan Efisien (mudah, cepat, murah)
- Akuntabel (data terlindungi dan tidak disalahgunakan)
- Memampukan pengguna (merespon masalah, menangkap peluang)



# (1) FAKTA, DATA, INFORMASI



## FAKTA, DATA, INFORMASI (1)

**Fakta**  
"PPKM diperpanjang."

**Data**  
"Januari, PPKM diperpanjang.  
Februari, PPKM diperpanjang.  
Maret, PPKM diperpanjang."

**Informasi**  
"PPKM diperpanjang tiga bulan berturut-turut."

### Manfaat Praktis: Informasi membantu untuk menyusun isu kebijakan

Dalam konteks lebih luas, kumpulan informasi membentuk **pengetahuan** tertentu terhadap suatu hal.

Pengetahuan yang tersistematisasi adalah **ilmu**.

Ilmu membantu memandu menjelaskan masalah yang sama/mirip melintasi ruang dan waktu (**obyektif**).

Namun, ilmu bukan segalanya, di atasnya ada **wisdom (kebijaksanaan)**.

## FAKTA, DATA, INFORMASI (2)

FAKTA	DATA	INFORMASI
Ibu A hamil, Ibu B hamil, Ibu C hamil	Ada 3 keluarga dengan ibu hamil, yaitu Ibu A, B, dan C	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keluarga di Kampung X menginginkan anak laki-laki sebagai anggota keluarganya, meskipun sudah memiliki beberapa anak.</li> <li>2. Keinginan keluarga untuk mendapat anak laki-laki, tidak mempedulikan kepemilikan mereka terhadap jaminan kesehatan</li> <li>3. 33,3% keluarga tidak memiliki jaminan kesehatan</li> </ol>
Ibu A sudah memiliki 3 anak perempuan Ibu B sudah memiliki 4 anak perempuan Ibu C sudah memiliki 5 anak perempuan	3 keluarga dengan ibu hamil belum memiliki anak laki-laki	
Ibu A memiliki jaminan kesehatan mandiri Ibu B memiliki jaminan kesehatan KIS Ibu C tidak memiliki jaminan kesehatan	2 keluarga dengan ibu hamil memiliki jaminan kesehatan, sedangkan 1 keluarga dengan ibu hamil memiliki jaminan kesehatan	

**Pengetahuan apa yang muncul?**

**Apa isu Kebijakan yang muncul?**

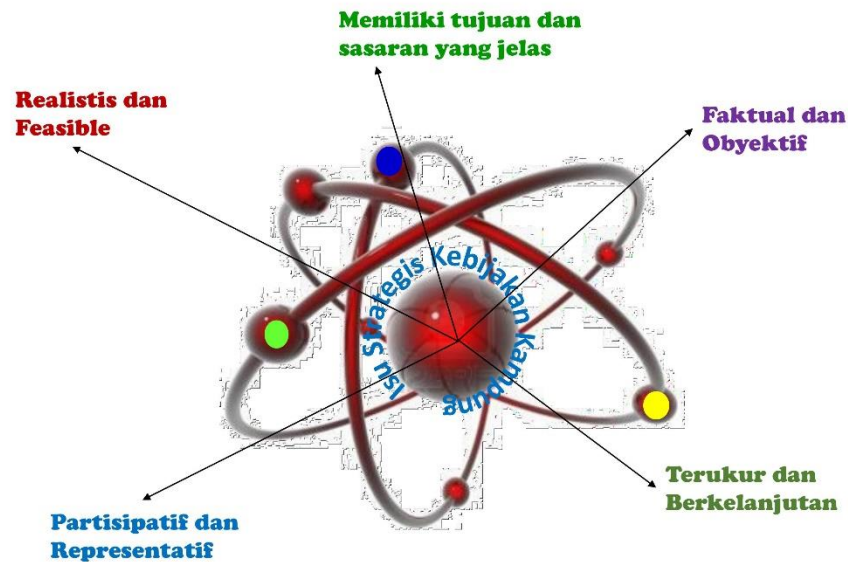
## (2) DATA DAN KEBIJAKAN PUBLIK

- Menurut Anda, seperti apakah kriteria kebijakan publik yang dapat dinilai baik?
- Bagaimana cara membuat kebijakan publik yang baik tersebut





## Isu Strategis Menyusun Kebijakan Kampung



## KARAKTERISTIK DATA

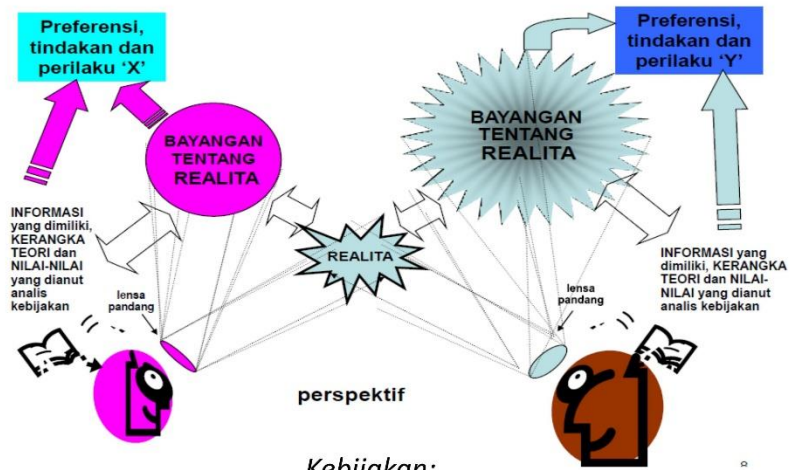
- **Data menurut Jenis:**
  - Data tidak selalu berupa angka (**kuantitatif**)
  - Data bisa juga berupa teks, gambar, simbol, atau lainnya (**kualitatif**)
- **Data menurut Sumber**
  - **Internal** pemerintah kampung
  - **Eksternal** pemerintah kampung
- **Data menurut Subyek (Satuan Subyek)**
  - Individu
  - Kelompok, termasuk keluarga
  - Satuan lainnya
- **Data menurut cara memperoleh**
  - **Primer**, dikumpulkan dari sumber data secara langsung
  - **Sekunder**, dikumpulkan dari data yang telah diambil dari pihak lainnya
- **Data menurut waktu pengumpulan**
  - **Cross section**, data yang dikumpulkan pada suatu waktu tertentu (at a point of time) untuk menggambarkan keadaan dan kegiatan pada waktu tersebut.
  - **Data berkala (time series data)**, yaitu data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk melihat perkembangan suatu kejadian/kegiatan selama periode tersebut.
- **Data menurut Sifat**
  - **Diskrit** adalah data yang nilainya adalah bilangan asli. Contoh: berat badan ibu-ibu di RT 4, nilai tukar dolar terhadap rupiah, frekuensi, dll.
  - **Kontinyu** adalah data yang nilainya ada pada suatu interval tertentu atau berada pada nilai yang satu ke nilai yang lainnya (tingkatan jarak/ukuran. Contoh: penggunaan kata sekitar, rata-rata, kurang lebih, dsb.

## Metode Pengumpulan Data

- **Angket (Kuesioner):** Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi beberapa pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab atau diisi.
- **Wawancara:** Pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka (offline/online) dan tanya jawab secara langsung antara pengumpul data peneliti terhadap sumber data.
- **Observasi:** Merekam berbagai fenomena yang terjadi berdasarkan situasi dan kondisi.
- **Dokumenter:** mengumpulkan dari bahan-bahan lain yang telah ada untuk diolah

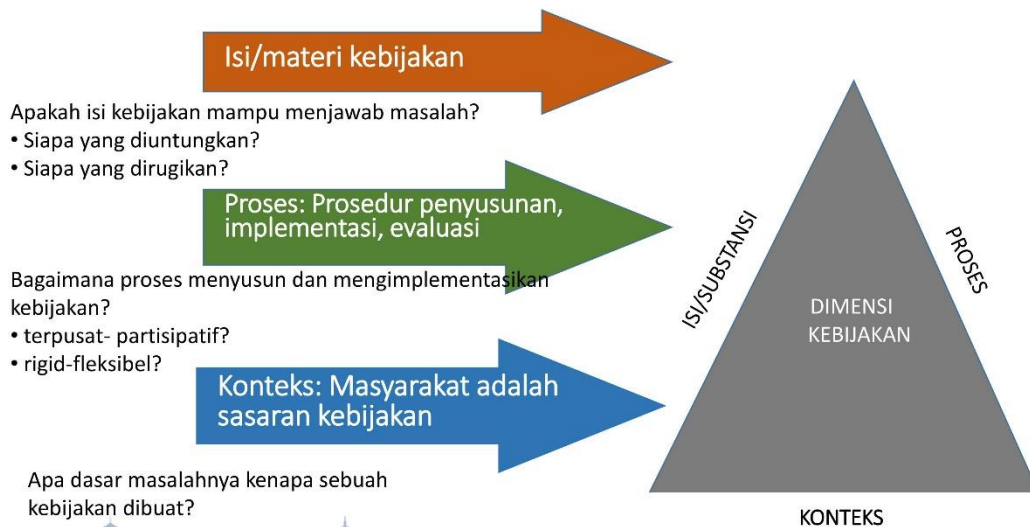
## Identifikasi Data untuk Kebijakan Desa

## Problema Kebijakan: Perspektif

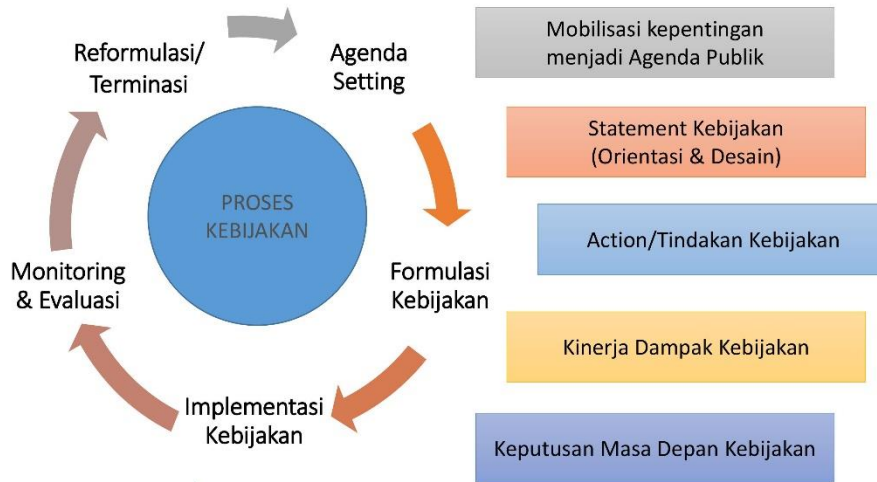


Kebijakan:  
Apa yang dipilih untuk dikerjakan dan apa yang tidak!

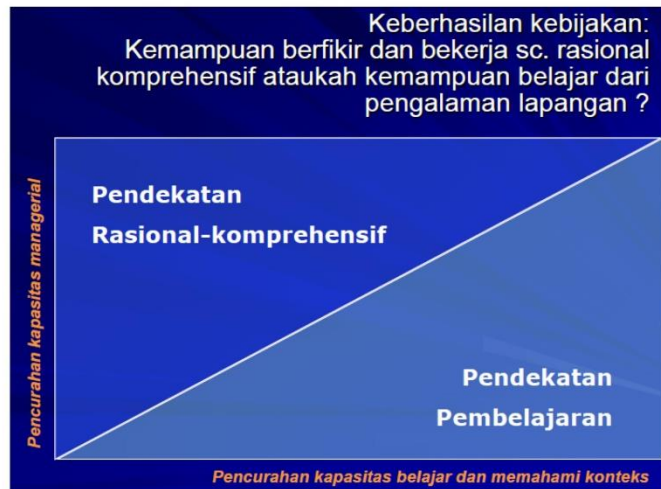
## DIMENSI KEBIJAKAN (PUBLIK): 3 TEPAT



## SIKLUS PROSES KEBIJAKAN PUBLIK



## Top Down dan Bottom Up (2)



## Teknokrasi Kebijakan Desa → Rasional Komprehensif

- Visi
  - Misi
  - Tujuan
  - Sasaran (outcome)
  - Luaran (output)
  - Program dan Kegiatan
- YANG TERPENTING DARI PROSES TEKNOKRASI KEBIJAKAN ADALAH INDIKATOR PENGUKURAN
  - INDIKATOR PENGUKURAN YANG BAIK TERSUSUN DARI DATA-DATA YANG DASARNYA **SMART**

## MEMANFAATKAN DATA: ILUSTRASI

### IRONI (ANEH TAPI NYATA)

- Warga punya pekerjaan dengan penghasilan cukup, tapi:
  - Anak putus sekolah
  - Anak gizi buruk
  - Rumah ngontrak terus
  - Kredit motor ditarik dealer
  - Tidak punya dana pensiun, dll
- Warga punya usaha yang ditekuni sejak lama, tapi:
  - Usaha tidak berkembang
  - Terjerat rentenir, dll

### *Dampak Buta Finansial!*



Terjerat Rentenir



Usaha tidak Maju-Maju



Gaya Hidup Boros



Pendidikan Rendah



Tidak ada Jaminan hari-Tua



Pola Berulang (Vicious Cycle)

**KEBIJAKAN APA YANG PERLU DISIAPKAN DESA TERHADAP DATA INI?**

## DATA KAMPUNG

- Persoalan apa yang hendak Anda selesaikan di kampung yang menjadi prioritas Anda? Sila diklasifikasikan, misalnya persoalan kependudukan, kesehatan, ekonomi, kemiskinan, atau lainnya.
- Apa solusi kebijakan yang Anda tawarkan?
- **Dari solusi tersebut, data apa saja yang Anda butuhkan?**

### Kebijakan Berbasis Data dan Bukti (Data & Evidence Based Policy)

## PENGOLAHAN DATA

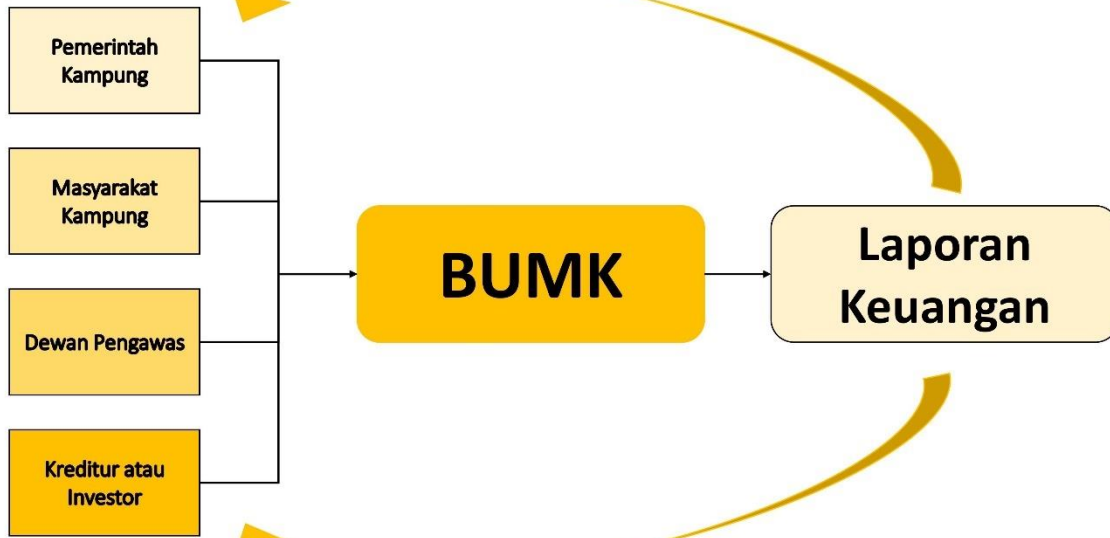
- **Data Nominal:** Bersifat kategorik. Data ini hanya memungkinkan setiap objek memiliki **satu kategori**. Contoh: jenis kelamin, agama, dll. Perbedaan kategori berfungsi untuk membedakan antara objek satu dengan lainnya.
- **Data Ordinal:** Bersifat kategorik, namun memperhatikan **tingkatan**. Data ordinal juga hanya memungkinkan setiap objeknya hanya memiliki satu kategori. Contoh dari data ini adalah urutan tingkat pendidikan (SD, SMP, SMA, Perguruan Tinggi), Juara dalam lomba lari (juara 1, 2, dan 3), suara partai A 60% sementara Partai B 30%, dll.
- **Data Interval:** Bersifat non kategorik (nol mutlak). Contoh: Rata – rata tinggi badan berdasarkan usia, untuk anak – anak yang berusia 6 – 12 memiliki rata – rata tinggi badan 130 – 145 cm, untuk remaja yang berusia 13 – 18 memiliki rata – rata tinggi badan 146 – 160 cm, dan untuk dewasa yang berusia 19 – 26 cm memiliki rata – rata tinggi badan 161 – 199 cm.
- **Data Rasio:** Bersifat non kategorik (nol tidak mutlak). Contoh: Berat bayi dimana bayi A beratnya adalah 3, B adalah 2, dan C adalah 1, jika dilihat menggunakan skala rasio berat badan bayi A tiga kalilipat dari berat badan bayi C, berat badan bayi B dua kalilipat dari C

# PENGANTAR PENGELOLAAN KEUANGAN BUMK

Pelatihan Pencatatan dan Pelaporan Keuangan BUMK  
Berau, Kalimantan Timur

## Pengertian Akuntansi BUMK

- **Akuntansi BUMK** adalah **alat** yang digunakan untuk memberikan **informasi kondisi keuangan BUMK** kepada pemerintah desa, masyarakat desa, dan pihak-pihak yang berkaitan dengan BUMK sebagai bentuk **pertanggungjawaban** dari pengurus BUMK
- **Akuntansi BUMK** ini juga digunakan untuk menunjukkan **akuntabilitas** dan **transparansi** keuangan BUMK
- Selain itu **akuntansi BUMK** juga digunakan untuk dasar **pengambilan keputusan** dan **perencanaan bisnis** kedepan agar perencanaan tersebut dapat didasarkan pada **data kondisi keuangan BUMK**



## Peran Laporan Keuangan

### Akuntabilitas

- Mempertanggungjawabkan kepada pemilik modal sebagai dasar tanggungjawab atas modal yang sudah diserahkan kepada BUMK

### Manajemen

- Memudahkan fungsi perencanaan, prngelolaan, dan pengendalian atas asset, kewajiban, dan ekuitas dana pemilik modal

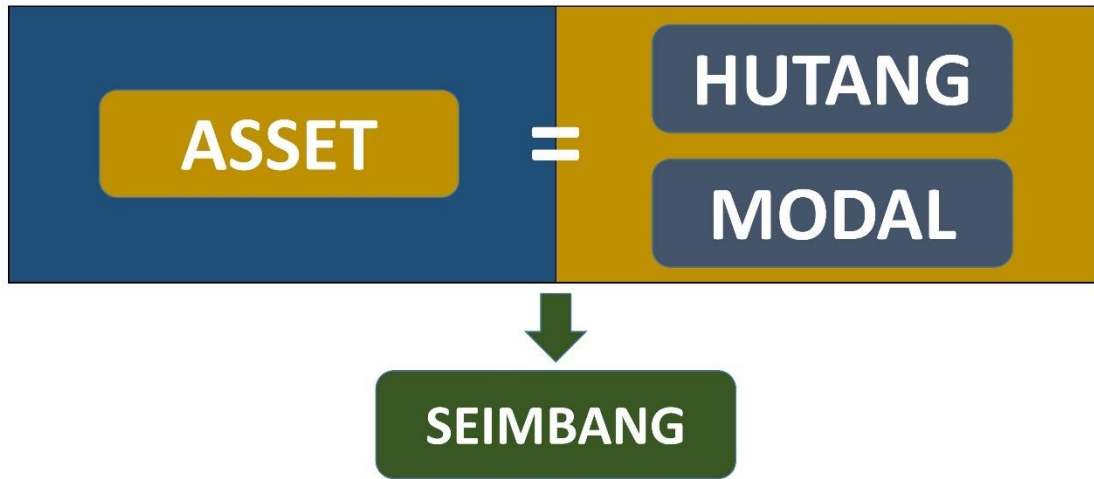
### Transparansi

- Memberikan informasi yang terbuka, jujur, dan menyeluruh kepada para pemilik modal dan pihak yang berkepentingan

### Evaluasi Kinerja

- Mengevaluasi kinerja BUMK, terutama dalam menggunakan sumber daya ekonomi

## Logika dan Persamaan Dasar Akuntansi

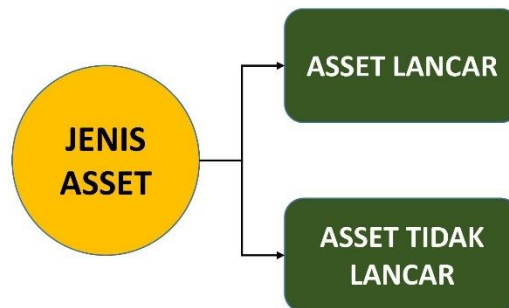


### ASSET

**Asset** adalah **kekayaan** yang **dimiliki** dan/atau **dikuasai** oleh BUMK baik **berwujud** maupun **tidak berwujud** guna mendapatkan **manfaat** di masa mendatang (untuk menghasilkan pendapatan)

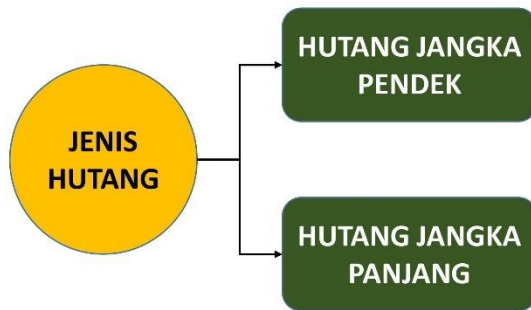
**Asset BUMK** dapat berasal dari :

- penyertaan modal
- bantuan tidak mengikat (hibah)
- hasil usaha
- pinjaman
- Sumber lain yang sah



## HUTANG

**Hutang** adalah **kewajiban** yang dimiliki oleh BUMK atas **perjanjian** yang dilakukan di **masa lalu** dan kewajiban tersebut harus dipenuhi dalam bentuk **penyerahan jasa** dan/atau **asset** sesuai dengan **keepakatan** antara kedua belah pihak yang terkait

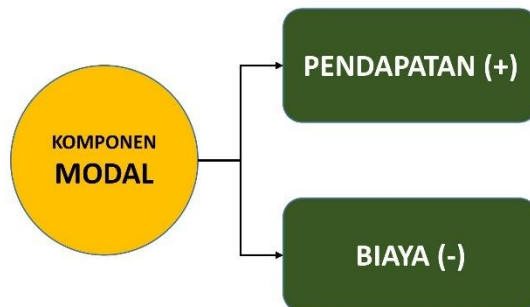


## MODAL

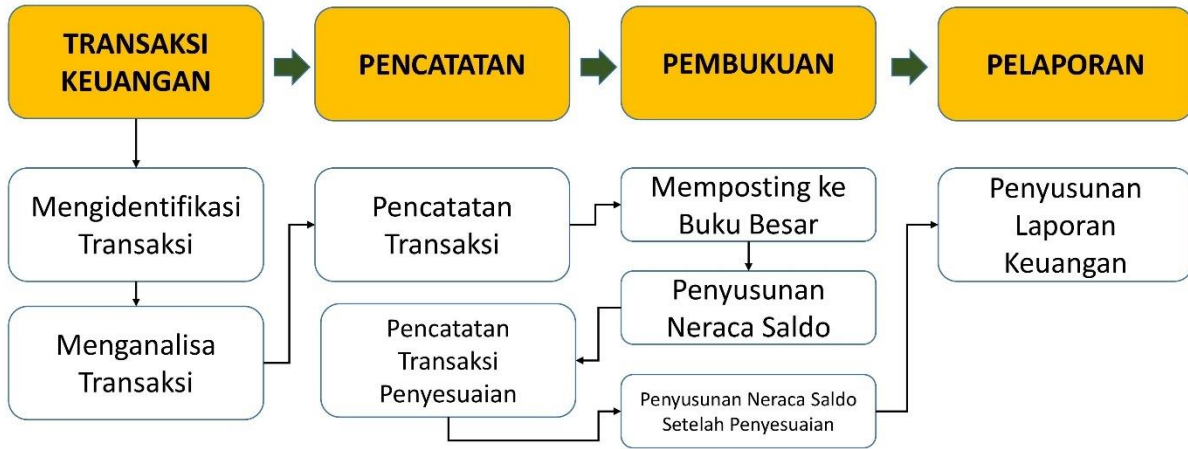
**Modal** adalah **kekayaan** yang dimiliki oleh **pemerintah kampung** yang diserahkan kepada BUMK untuk **dikelola** dan **dimanfaatkan** demi kepentingan BUMK dalam **menjalankan usahanya**

**Modal BUMK** terdiri dari :

- penyertaan modal oleh pemerintah kampung
- Utang direksi maupun kontribusi masyarakat kampung
- Saldo sisa hasil usaha kumulatif



## Alur Keuangan BUMK



## Struktur Pengelolaan Keuangan BUMK

- Inisiator – Pengelola Teknis
- Verifikator – Pengelolaan Keuangan
- Otorisator – Direktur
- Eksekutor – Bendahara

